



November 2016

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar - Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email:

t setiadi@bi.go.id umran u@bi.go.id putriana n@bi.go.id rai gdw@bi.go.id nm_wiwieks@bi.go.id trio_pa@bi.go.id





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali November 2016. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada *stakeholders*. Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ideide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 21 November 2016

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI

TTD

<u>Causa Iman Karana</u> Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	14
Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali	18
Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	23
1.1. KONDISI UMUM	25
1.2. SISI PERMINTAAN	25
1.2.1. Konsumsi	26
1.2.2. Investasi	29
1.2.3. Neraca Perdagangan	31
1.3. SISI PENAWARAN	35
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37
1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	39
1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi	40
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	r 40
1.3.5. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42
1.3.6. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	43
Bab II Keuangan Pemerintah	49
2.1. GAMBARAN UMUM	51
2.2. REALISASI APBD PROVINSI BALI TRIWULAN III 2016	51
2.2.1. Penyerapan Pendapatan Triwulan III 2016	52
2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan III 2016	56
2.3. REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI	58
2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Triwulan III 2016	58
2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Triwulan III 2016	61
2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI TRIWULAN III 2016	63
2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali Triwulan III 2016	63
Bab III Perkembangan Inflasi Daerah	65
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	67
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	68
3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	68

3.2.2. Inflasi Menurut Kota	73
3.3. DISAGREGASI INFLASI	75
a) <i>Volatile Food</i>	76
b) Administered Prices	77
c) Core Inflation	77
3.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI	78
3.5. INFLASI PERDESAAN	79
Bab IV Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	81
4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA	83
4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI	92
4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)	96
4.4. KINERJA BANK UMUM DI PROVINSI BALI	97
4.5. AKSES KEUANGAN	101
Bab V Penyelenggaraan Sistem Pembayaraan dan Pengelolaan Uang Rupiah	107
5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	109
Bab VI Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	119
6.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN	121
6.2. NILAI TUKAR PETANI	124
Bab VII Prospek Perekonomian Daerah	127
7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL	129
7.2. IINFLASI BALI TAHUN 2017	131
7.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI	132
Daftar Singkatan	133

Daftar Grafik

25
25
27
27
27
27
28
28
28
29
30
30
30
30
30
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
37
37
37
88
88
88
38
39

Grafik 1. 37 Jumlah Keberangkatan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai	39
Grafik 1. 38 Arus Penumpang Pelabuhan Benoa Provinsi Bali	40
Grafik 1. 39 Kegiatan Usaha Sektor Bangunan	40
Grafik 1. 40 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali	40
Grafik 1. 41 Perkembangan Total Penjualan Kelompok Komoditas	41
Grafik 1. 42 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor	41
Grafik 1. 43 Pendaftaran Kendaraan	41
Grafik 1. 44 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	41
Grafik 1. 45 Perkembangan Produksi Perikanan	42
Grafik 1. 46 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	42
Grafik 1. 47 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian	42
Grafik 1. 48 Perkembangan Produksi Padi di Bali	43
Grafik 1. 49 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)	43
Grafik 1. 50 Kredit Kategori Industri	43
Grafik 2. 1 <i>Share</i> Anggaran Komponen Pendapatan	54
Grafik 2. 2 Perkembangan Pagu Anggaran Belanja Provinsi Bali 2012-2016	58
Grafik 2. 3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016	63
Grafik 2. 4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015	64
Grafik 3. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)	67
Grafik 3. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)	67
Grafik 3. 3 Inflasi Bulanan Bali (%mtm)	67
Grafik 3. 4 Inflasi Kumulatif Bali (%ytd)	67
Grafik 3. 5 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali	68
Grafik 3. 6 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali	69
Grafik 3. 7 Pergerakan Harga Komoditas dalam Bahan Makanan (Denpasar)	69
Grafik 3. 8 Pergerakan Harga Komoditas dalam Bahan Makanan (Singaraja)	69
Grafik 3. 9 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali	69
Grafik 3. 10 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali	69
Grafik 3. 11 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	70
Grafik 3. 12 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	70
Grafik 3. 13 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali	71
Grafik 3. 14 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali	71
Grafik 3. 15 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali	71
Grafik 3. 16 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali	72
Grafik 3. 17 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali	72
Grafik 3. 18 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali	72
Grafik 3. 19 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali	72
Grafik 3. 20 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali	73
Grafik 3. 21 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	73

Grafik 3. 22 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja	/3
Grafik 3. 23 Disagregasi inflasi tahunan Denpasar	76
Grafik 3. 24 Disagregasi inflasi tahunan Singaraja	76
Grafik 3. 25 Pergerakan Inflasi Bulanan Komoditas Tarif Listrik	77
Grafik 3. 26 Nilai Penjualan Eceran	78
Grafik 3. 27 Ekspektasi Konsumen	78
Grafik 3. 28 Pergerakan Harga Konsumen Cabai Merah Besar	78
Grafik 3. 29 Pergerakan Harga Konsumen Cabai Rawit Merah	79
Grafik 3. 30 Pergerakan Harga Konsumen Bawang Merah	79
Grafik 3. 31 Pergerakan Harga Konsumen Telur Ayam Ras	79
Grafik 3. 32 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)	79
Grafik 3. 33 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)	80
Grafik 4. 1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali	83
Grafik 4. 2 Indeks Keyakinan Konsumen Rumah Tangga Bali	83
Grafik 4. 3 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini	83
Grafik 4. 4 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi 6 Bulan Mendatang	84
Grafik 4. 5 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang	84
Grafik 4. 6 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi	84
Grafik 4. 7 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali	85
Grafik 4. 8 Komposisi DPK Bali	86
Grafik 4. 9 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali	86
Grafik 4. 10 Komposisi DPK Perseorangan di Bali	88
Grafik 4. 11 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan	88
Grafik 4. 12 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan	88
Grafik 4. 13 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan	88
Grafik 4. 14 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali	88
Grafik 4. 15 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali	89
Grafik 4. 16 Komposisi Ekspor Bali	92
Grafik 4. 17 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan Liaison Triwulan III 2016	93
Grafik 4. 18 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali	94
Grafik 4. 19 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral	94
Grafik 4. 20 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi	95
Grafik 4. 21 Pertumbuhan Kredit Korporasi	95
Grafik 4. 22 NPL Kredit Korporasi	95
Grafik 4. 23 Perkembangan Aset Bank Umum	98
Grafik 4. 24 Pangsa Aset Berdasarkan Jenis Bank	98
Grafik 4. 25 Perkembangan DPK Bank Umum	99
Grafik 4. 26 Perkembangan Kredit Bank Umum	99
Grafik 4. 27 Pertumbuhan Kredit UMKM	101

Grafik 4. 28 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit	101
Grafik 4. 29 Pangsa Nominal Kredit UMKM	102
Grafik 4. 30 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten	102
Grafik 4. 31 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja	102
Grafik 4. 32 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja	102
Grafik 5. 1 Perkembangan Kliring	109
Grafik 5. 2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong	109
Grafik 5. 3 Perkembangan Uang Kartal di Bali	110
Grafik 5. 4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling	110
Grafik 5. 5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali	111
Grafik 5. 6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali	111
Grafik 5. 7 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali	111
Grafik 5. 8 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel	112
Grafik 6. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali	121
Grafik 6. 2 Perkembangan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU)	122
Grafik 6. 3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan usaha yang Akan Datang	122
Grafik 6. 4 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya	125
Grafik 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali	129
Grafik 7. 2 Proveksi Inflasi Bali	131

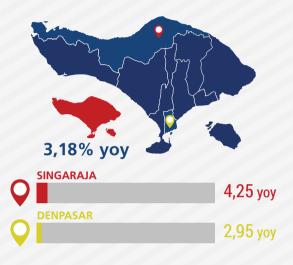
Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)	26
Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)	36
Tabel 2. 1 Anggaran & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	52
Tabel 2. 2 Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	53
Tabel 2. 3 Anggaran Belanja Provinsi Bali 2015-2016	56
Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Bali Triwulan III 2015-2016	56
Tabel 2. 5 Pagu Anggaran Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016	59
Tabel 2. 6 Realisasi Nominal Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah	
Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016	59
Tabel 2. 7 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota	
di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016	60
Tabel 2. 8 Pagu Anggaran Belanja 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016	61
Tabel 2. 9 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota	
di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016	62
Tabel 2. 10 Realisasi Persentase Belanja Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah	
Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016	62
Tabel 2. 11 Realisasi APBN Provinsi Bali Triwulan III 2015-2016	63
Tabel 3. 1 Penyesuaian Tarif Listrik Periode Juli – Oktober 2016	70
Tabel 3. 2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	73
Tabel 3. 3 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Denpasar Triwulan III 2016	74
Tabel 3. 4 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Denpasar Triwulan III 2016	74
Tabel 3. 5 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	75
Tabel 3. 6 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Singaraja Triwulan III 2016	75
Tabel 3. 7 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Singaraja Triwulan III 2016	75
Tabel 4. 1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan	85
Tabel 4. 2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	85
Tabel 4. 3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	86
Tabel 4. 4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali	87
Tabel 4. 5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan III 2016	89
Tabel 4. 6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali	91
Tabel 4. 7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali	91
Tabel 4. 8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan III 2016	91
Tabel 4. 9 NPL Kredit Multiguna	91
Tabel 4. 10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang	94
Tabel 4. 11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali	96

Tabel 4. 12 Perkembangan Perbankan Bali	96
Tabel 4. 13 Perkembangan Indikator Bank Umum Bali	98
Tabel 4. 14 Perkembangan Indikator BPR di Bali	100
Tabel 5. 1 Perkembangan Perputaran Kliring	109
Tabel 5. 2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali	110
Tabel 5. 3 Perkembangan Jumlah Agen LKD Tahun 2016	115
Tabel 6. 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)	121
Tabel 6. 2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan	
Pekerjaan Utama (orang)	123
Tabel 6. 3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang)	123
Tabel 6. 4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang)	124
Tabel 6. 5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan	
Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang)	124
Tabel 6. 6 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali	125
Tabel 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali	131
Daftar Boks	
BOKS A PERKEMBANGAN KINERJA DUNIA USAHA DIPERKIRAKAN SEMAKIN MEMBAIK	
PADA TRIWULAN III-2016	44
BOKS B KPW BI PROVINSI BALI ROADSHOW PANEN KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG	
INFLASI BALI	103
BOKS C MINIMALISASI KASUS PENIPUAN KUPVA BB TIDAK BERIZIN, BI BALI LUNCURKAN	
SIKUPVA	116

PERKEMBANGAN PEREKONOMI

Pada triwulan III 2016, inflasi Bali mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2016 inflasi Bali tercatat sebesar 3,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,07% (yoy).



PERKEMBANGAN INFLASI

2

3

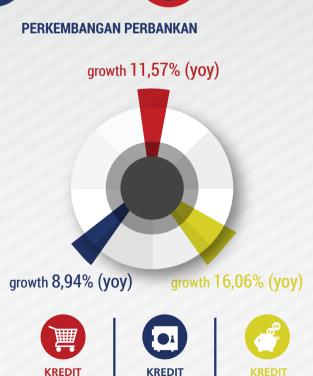
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

TUNAI INFLOW Rp5,2T Rp3,3T OUTFLOW Rp5,12T Rp5,1T NET OUTFLOW Rp1,7T (NET INFLOW) NON TUNAI

Rp18T (637 ribu lembar)
Rp21,4T (678 ribu lembar)

KLIRING

Tw II 2016 Tw II 2016



KORPORASI

UMKM

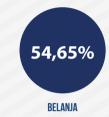
RUMAH TANGGA

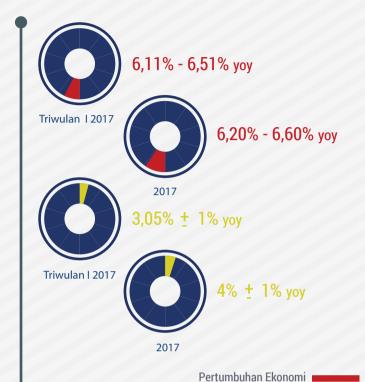
PROYEKSI PEREKONOMIAN

Inflasi



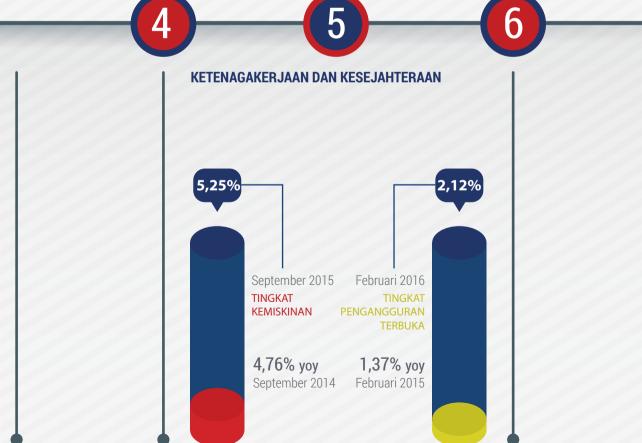






KEUANGAN PEMERINTAH TW III 2016





Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2016 mencatat perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 6,17% (yoy) dengan output riil mencapai Rp 34,9 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (triwulan II 2016) yang sebesar 6,54% (yoy). Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan III 2016 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan tersebut disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Sementara, dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan III 2016 disebabkan oleh perlambatan kinerja beberapa lapangan usaha, yaitu konstruksi, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan administrasi pemerintahan.

Perekonomian Bali triwulan III 2016 tumbuh melambat menjadi sebesar 6,17% (yoy)

Perkembangan berbagai indikator dan hasil liaison mengindikasikan potensi peningkatan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2016. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,06%-6,46% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja perekonomian bersumber dari sebagian besar komponen sisi permintaan seiring dengan masuknya periode *peak season* pariwisata akhir tahun (natal dan tahun baru serta musim dingin Eropa) dengan didukung kebijakan akomodatif Pemerintah untuk mendorong kinerja investasi dan kegiatan usaha di Provinsi Bali. Memasuki triwulan IV 2016, perkiraan peningkatan dari sisi penawaran didorong oleh peningkatan sebagian besar lapangan usaha utama Provinsi Bali. Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan masuknya periode *peak season* pariwisata di akhir tahun (Natal dan tahun baru). Sejalan dengan peningkatan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran turut mengalami peningkatan.

Perekonomian
Bali triwulan IV
2016 diperkirakan
mengalami
peningkatan pada
kisaran 6,06% - 6,46%

Perkembangan realisasi belanja pemerintah di triwulan III 2016 menunjukkan tendensi perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama. Hak ini terindikasi oleh nilai persentase realisasi belanja yang mengalami penurunan dari sebesar 54,65% dari nilai pagu di tahun 2015, menjadi 54,53% dari pagu tahun 2016. Perlambatan realisasi belanja pemerintah tersebut, terutama disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi belanja pada tingkat kabupaten/kota, sementara persentase realisasi belanja untuk tingkat provinsi dan APBN tetap menujukkan peningkatan persentase realisasi.

Realisasi Belanja daerah Provinsi Bali pada triwulan III 2016 tercatat melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara umum, perlambatan realisasi belanja dan pendapatan pemerintah pada triwulan III 2016, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi regional Bali triwulan III 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya. Kebijakan

pemerintah pusat yang sejak September 2016 melakukan penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) ke Provinsi Bali dan 3 kabupaten/kota di Bali, ikut menyebabkan perlambatan realisasi persentase belanja pemerintah khususnya pada tingkat kabupaten/kota di triwulan III 2016. Perlambatan realisasi persentase belanja pemerintah, juga disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi pendapatan daerah, yang disebabkan oleh perlambatan kinerja usaha sehingga mempengaruhi perlambatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Meskipun mengalami perlambatan, namun masih terdapat beberapa faktor yang dapat menahan laju perlambatan realisai belanja di triwulan laporan, antara lain berupa telah disetujuinya pagu anggaran perubahan untuk tahun 2016 baik APBN, APBD Provinsi maupun kabupaten/kota sehingga ikut mempengaruhi perkembangan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan III 2016. Selain itu, pembangunan proyek infrastruktur dalam upaya meningkatkan konektivitas, ikut mendorong peningkatan realisasi untuk belanja modal. Adanya faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan, juga merupakan faktor pendorong realisasi belanja pemerintah khususnya kegiatan sosial di triwulan laporan.

Tekanan inflasi Provinsi Bali pada triwulan III 2016, tercatat sebesar 3,18% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan II 2016 Setelah pada triwulan II 2016 inflasi Bali mengalami penurunan, pada triwulan III 2016 inflasi Bali kembali mengalami peningkatan. Namun demikian, pencapaian inflasi hingga triwulan III 2016 masih berada pada rentang proyeksi Bank Indonesia pada keseluruhan Tahun 2016 dan masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi, yaitu sebesar 4%±1%. Pada triwulan III 2016 inflasi Bali tercatat sebesar 3,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,07% (yoy). Peningkatan inflasi pada triwulan III disebabkan seiring dengan peningkatan permintaan karena adanya perayaan Galungan, Kuningan, dan Idul Adha di bulan September 2016. Dari dua kota sampel inflasi di Bali, inflasi Kota Singaraja tercatat sebesar 4,25% (yoy) pada triwulan III2016, lebih tinggi dari inflasi Kota Denpasar yang tercatat sebesar 2,95% (yoy). Inflasi Bali yang relatif rendah dan stabil merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan seperti memantau kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga, dan menggali informasi dari stakeholders/instansi terkait. Selain itu, melalui forum koordinasi TPID, telah diambil langkah - langkah antisipatif pengendalian inflasi.

Inflasi Bali tahun 2016 diproyeksikan pada kisaran 3,14±1% (yoy) Berdasarkan realisasi hingga November 2016 serta *tracking* pergerakan harga baik melalui Survei Pemantauan Harga (SPH) dan PIHPS Provinsi Bali "SiGapura", di Triwulan IV 2016, inflasi Bali diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan permintaan menjelang *peak season* liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Beberapa faktor yang menjadi sumber tekanan inflasi di Triwulan IV 2016 antara lain: peningkatan harga tiket angkutan udara, penyesuaian tarif listrik yang berlanjut, serta ekspektasi masyarakat seiring dengan kecenderungan peningkatan harga dan ketersediaan stok.

Stabilitas keuangan daerah masih terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi meskipun melambat, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga, berdampak minimal pada kerentanan sistem keuangan. Dari sisi sektor korporasi, kinerja korporasi utama masih rentan terhadap pelemahan ekonomi global. Meskipun demikian, masih kuatnya ekonomi domestik masih mendukung ketahanan stabilitas keuangan di Bali. Perkembangan penyaluran kredit UMKM menunjukkan peningkatan terlihat dari laju pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami peningkatan, dari yang semula tumbuh sebesar 15,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 16,06% (yoy) di periode laporan. Peningkatan laju penyaluran kredit UMKM didorong oleh peningkatan penyaluran kredit di kategori jasa-jasa seiring dengan peningkatan kinerja industri pariwisata yang semula tumbuh 8,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 14,63% (yoy). Perkembangan tersebut juga diiringi oleh masih terjaganya kualitas kredit UMKM dibawah threshold 5% yaitu sebesar 2,11%.

Kinerja kredit korporasi dan rumah tangga Provinsi Bali triwulan III 2016 masih terjaga baik. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2016 menunjukkan peningkatan.

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali pada triwulan III 2016 berada pada posisi *net inflow* sesuai dengan pola musimannya. Sejalan dengan kondisi tersebut, transaksi pembayaran nontunai (dengan mekanisme kliring) tercatat mengalami perlambatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Perlambatan tersebut seiring dengan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2016.

Sistem pembayaran nontunai tercatat mengalami perlambatan pada triwulan III 2016.

Perkembangan transaksi jual – beli valas di Provinsi Bali cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data transaksi Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali, total transaksi jual – beli valas tahun 2016 mencapai Rp22,91 triliun, meningkat sebesar 0,26% (ctc) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan total pembelian dan penjualan valas masing-masing sebesar Rp11,35 dan Rp11,56 triliun.

Perkembangan transaksi jual-beli valas di Provinsi Bali mengalami peningkatan pada triwulan III 2016.

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali pada Semester II 2016 mengalami peningkatan dibanding Semester I 2016, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 3,95% (yoy), sementara jumlah angkatan kerja yang menganggur menunjukkan penurunan sebesar 1,54%(yoy). Kondisi ini berdampak kepada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada Agustus 2016 tercatat sebesar 1,89%, lebih rendah dari Februari 2016 yang sebesar 2,12%. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 1,96%.

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
mengalami penurunan.
Di sisi lain kemiskinan
turut mengalami
penurunan dengan
diiringi kualitas hidup
masyarakat yang
terjaga seiring dengan
peningkatan IPM dan
penurunan Gini Ratio

Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali pada triwulan III-2016 mengalami peningkatan dibanding triwulan II-2016, mengindikasikan peningkatan kemampuan/daya beli petani. Peningkatan tersebut terjadi pada subsektor Hortikultura, Perkebunan rakyat, Peternakan dan Perikanan. Sementara NTP subsektor tanaman pangan menunjukkan penurunan pada periode yang sama.

Selanjutnya dari sisi distribusi, kesejahteraan antar penduduk mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari menurunnya angka gini ratio. Disisi lain, pembangunan manusia di Provinsi Bali berada dalam kondisi yang baik, tercermin dari nilai IPM yang jauh di atas rata-rata nasional dan merupakan IPM terbesar ke-5 di Indonesia.

Perekonomian Bali triwulan I 2017 diperkirakan tumbuh kisaran 6,11%-6,51% (yoy)

Perekonomian Bali tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,20%-6,60% (yoy)

Inflasi Bali 2017 diperkirakan berada dalam kisaran 4%±1% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2017 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu tumbuh pada kisaran 6,11%-6,51% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama didorong oleh sebagian besar komponen terutama konsumsi. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama antara lain lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Dengan berbagai perkembangan tersebut, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkiraan perekonomian Bali tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,20%-6,60% (yoy).

Inflasi Bali tahun 2017 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu berada pada kisaran 4%±1% (yoy), dan diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, tendensi peningkatan inflasi pada tahun 2017 terutama bersumber dari administered prices dan volatile foods. Sementara itu tekanan kelompok core inflation relatif stabil.

Tabel Indikator

PDRB DAN INFLASI

		20	115			2016		
Indikator		П	III	IV	2015		П	III
EKONOMI MAKRO REGIONAL								
Produk Domestik Regional Bruto (%)	5.99	5.92	6.30	5.96	6.04	6.06	6.54	6.17
Berdasarkan Kategori :								
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	3.54	4.90	2.41	2.81	3.41	0.13	(0.01)	4.77
- Pertambangan dan Penggalian	- 4.19	-6.53	-9.81	-6.57	-6.83	5.01	6.31	5.71
- Industri Pengolahan	6.73	8.57	6.88	6.34	7.13	4.76	2.08	3.23
- Pengadaan Listrik. Gas	3.32	-4.48	-1.88	1.46	-0.45	7.16	11.39	5.26
- Pengadaan Air	0.93	1.10	0.76	5.12	1.99	9.64	6.82	6.14
- Konstruksi	2.67	3.61	6.06	7.59	5.01	7.62	9.73	9.13
Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.66	6.87	8.86	7.60	7.75	8.78	6.87	6.39
- Transportasi dan Pergudangan	4.48	4.49	5.54	3.63	4.54	6.25	6.93	7.64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.90	5.85	5.49	4.87	5.76	6.61	7.24	7.86
- Informasi dan Komunikasi	9.79	9.05	10.77	10.12	9.94	8.67	8.91	8.06
- Jasa Keuangan	6.57	4.05	10.25	5.78	6.66	8.45	7.67	7.05
- Real Estate	5.86	4.95	4.92	5.09	5.20	5.79	5.53	4.52
- Jasa Perusahaan	5.23	6.91	7.15	8.54	6.99	10.14	6.39	6.27
Administrasi Pemerintahan. - Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.28	7.92	9.40	8.31	8.27	3.31	12.86	0.24
- Jasa Pendidikan	8.75	8.85	8.24	9.91	8.94	9.50	9.81	3.84
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.06	7.90	9.77	9.26	8.76	9.96	9.50	8.57
- Jasa lainnya	8.96	7.41	7.60	8.01	7.99	7.70	8.34	8.24
Berdasarkan Pengeluaran :								
- 1. Pengeluaran Konsumsi	7.81	6.44	6.69	8.16	7.27	7.11	8.02	3.43
- 1a. Konsumsi Rumah Tangga	8.42	7.33	7.29	7.04	7.50	7.36	7.65	4.84
- 1b. Konsumsi LNPRT	-1.90	-1.31	1.30	14.80	3.17	6.72	12.17	11.76
- 1c. Konsumsi Pemerintah	4.43	2.86	4.42	12.20	6.56	4.91	9.49	(4.46)
- 2. Investasi	5.32	4.91	4.17	5.62	5.00	9.66	9.51	9.14
- 2a. PMTB	7.43	7.61	6.09	5.76	6.69	9.52	9.49	9.00
- 2b. Perubahan Inventori	-83.08	-85.16	-80.77	-17.02	-77.76	45.99	16.15	44.21
- 3. Neraca Perdagangan Bersih	- 4.56	5.62	22.03	-139.59	-5.60	(18.26)	(45.60)	32.14
- 3a. Ekspor Luar Negeri	12.34	16.79	-4.63	-2.74	4.53	11.68	11.15	16.63
- 3b. Impor Luar Negeri	-31.84	25.14	9.03	12.49	-0.75	34.68	26.95	38.62
- 3c. Net Ekspor Antardaerah	55.87	16.35	-10.22	-2.24	7.76	14.54	14.72	8.58
Ekspor								
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	137.56	122.35	107.74	128.2	495.8	121.61	128.39	106.53
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	27.80	29.05	25.81	93.17	175.8	87.68	30.00	21.23
Impor								
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	32.1	30.7	21.6	25.5	109.73	46.1	25.3	22.48
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	30.87	2.00	3.10	7.99	43.97	17.94	1.65	1.68
Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	6.42	6.97	6.56	2.75	2.75	3.59	2.96	3.18

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

Miliar Rp

INDIKATOR 2014				2015				2016			
INDIKATOR		=	≡	IV		Ш	≡	IV		Ш	≡
DANA											
Total	45,396	46,308	48,278	49,859	48,684	49,544	50,655	52,619	49,957	51,841	51,975
Giro	3,153	3,169	3,373	3,363	2,977	3,145	3,177	3,314	3,047	3,077	3,077
Tabungan	27,550	27,506	28,778	29,404	28,416	28,377	29,358	30,741	29,305	30,922	31,065
Deposito	14,692	15,633	16,127	17,093	17,291	18,022	18,119	18,564	17,604	17,842	17,832

Miliar Rp

											ινιιιαι πρ	
INDIKATOR		20	14			20	15		2016			
INDIKATOR		Ш	III	IV		П	III	IV		Ш	Ш	
Kredit RT. Total	22,147	22,852	23,820	24,772	25,292	25,974	26,820	27,479	27,871	28,441	28,970	
KPR	10,694	11,263	11,380	11,743	11,875	12,012	12,227	12,435	12,448	12,408	11,739	
RT. KPR sd 21	3,115	3,235	3,253	3,259	3,200	3,180	3,174	3,127	3,088	3,007	2,621	
RT. KPR sd 70	3,274	3,423	3,513	3,598	3,636	3,711	3,799	3,946	3,992	3,963	3,795	
RT. KPR 70+	3,652	3,856	3,980	4,216	4,372	4,428	4,570	4,665	4,669	4,717	4,574	
RT. KPA sd 21	55	51	49	48	48	46	43	44	48	44	41	
RT. KPA sd 70	133	130	123	124	121	117	114	119	119	117	108	
RT. KPA 70+	86	92	72	69	67	71	66	62	54	51	48	
RT. Ruko	378	476	389	428	432	459	461	473	478	510	552	
KKB	1,870	2,013	2,139	2,259	2,376	2,451	2,556	2,289	2,266	2,253	2,299	
RT. KKB Rođa 4	1,682	1,799	1,916	2,040	2,158	2,236	2,354	2,096	2,084	2,080	2,114	
RT. KKB Roda 2	102	118	127	140	136	138	135	112	105	120	114	
RT. KKB Roda 6	40	47	52	46	52	51	44	56	52	27	46	
RT. KKB Lainnya	46	49	44	33	31	26	23	24	25	25	25	
RT. Multiguna	7,404	7,745	8,281	8,923	9,187	9,599	10,020	10,624	10,991	11,495	12,373	
NPL (Gross %)	0.53	0.52	0.55	0.63	0.63	0.70	0.74	0.76	1.09	1.13	28,970	

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

Miliar Rp

INDIKATOR		20	14			20	15	2016			
INDIKATOR		=		IV		=		IV		=	III
Kredit Korporasi	18,645	20,354	21,706	23,766	24,075	24,841	25,745	26,638	27,463	27,525	28,047
Modal Kerja	7,379	8,563	9,208	10,006	9,968	10,140	10,422	10,583	11,087	11,575	11,435
Investasi	11,193	11,703	12,412	13,665	14,020	14,607	15,241	15,975	16,289	15,867	16,529
NPL (Gross,%)	2.46	2.24	2.47	2.55	1.64	3.37	3.46	3.97	4.85	5.29	5.85

PERBANKAN – BANK UMUM (LOKASI BANK)

Indikator		20	14		2015				2016		
iliuikatoi	1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	Ш	III
PERBANKAN											
Total Asset (Rp Triliun)	75.05	79.50	83.83	85.78	85.39	88.52	92.28	92.84	91.46	94.37	98.10
DPK (Rp Triliun)	63.90	66.50	70.54	70.51	72.01	73.58	76.54	75.5	75.56	77.61	79.39
- Giro (Rp Triliun)	12.23	13.83	14.11	11.96	12.86	13.70	15.00	13.06	13.89	13.99	14.92
- Tabungan (Rp Triliun)	31.17	30.96	32.90	33.90	32.46	32.35	34.09	35.8	33.85	35.56	36.3
- Deposito (Rp Triliun)	20.49	21.71	23.53	24.72	26.69	27.51	27.44	26.54	27.81	28.04	28.16
Kredit (Rp Triliun) - lokasi bank	50.33	52.83	55.09	57.20	57.96	59.77	60.97	62.8	63.07	65.50	67.03
- Modal Kerja	19.99	21.29	22.26	22.75	22.94	23.76	24.01	24.50	24.41	25.85	26.28
- Investasi	11.35	11.90	12.55	13.40	13.62	13.87	14.14	14.58	14.44	15.04	15.53
- Konsumsi	18.99	19.64	20.28	21.05	21.40	22.13	22.81	23.76	24.21	24.70	25.21

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM

Miliar Rp

Kabupaten /Kota	to dilease.	2014				2015				2016		
	Indikator	1	- II	III	IV	1	H	III	IV	1	Ш	Ш
Landagaa	Kredit	1,316	1,393	1,447	1,523	1,568	1,663	1,729	1,843	1,904	2,042	2,093
Jembrana	DPK	882	967	1,045	1,043	1,073	1,058	1,118	1,187	1,173	1,191	1,256
Tabanan	Kredit	2,621	2,746	2,815	2,876	2,938	3,028	3,118	3,267	3,456	3,633	3,713
Tabanan	DPK	1,801	1,870	1,906	1,869	1,992	2,008	2,146	2,123	2,215	2,224	2,294
Dadusa	Kredit	4,713	4,908	5,109	6,868	7,160	7,363	7,530	7,780	7,681	8,041	8,442
Badung	DPK	7,826	8,286	8,509	11,307	11,724	11,831	12,610	12,059	12,103	12,728	13,220
Character	Kredit	2,219	2,370	2,472	2,580	2,634	2,754	2,861	2,998	3,147	3,339	3,436
Gianyar	DPK	2,217	2,225	2,391	2,336	2,402	2,487	2,723	2,639	2,678	2,772	2,971
IZI I	Kredit	1,113	1,159	1,214	1,258	1,280	1,317	1,367	1,397	1,446	1,520	1,568
Klungkung	DPK	843	935	975	959	1,037	1,098	1,159	1,076	1,113	1,220	1,232
D l'	Kredit	1,106	1,164	1,201	1,237	1,290	1,346	1,393	1,443	1,488	1,551	1,574
Bangli	DPK	699	742	837	829	827	853	915	867	859	926	1,024
V	Kredit	1,639	1,746	1,843	1,903	1,990	2,101	2,206	2,310	2,430	2,575	2,678
Karangasem	DPK	1,208	1,303	1,458	1,467	1,498	1,486	1,569	1,560	1,657	1,664	1,651
D. Liliana	Kredit	3,058	3,281	3,385	3,467	3,544	3,752	3,934	4,110	4,241	4,593	4,792
Buleleng	DPK	2,824	2,908	3,098	3,036	3,037	3,039	3,266	3,384	3,423	3,647	3,541
D	Kredit	32,542	34,058	35,602	35,497	35,563	36,452	36,833	37,707	37,281	38,309	38,743
Denpasar	DPK	45,596	47,263	50,318	47,664	48,425	49,721	51,039	50,611	50,346	51,412	52,206

SISTEM PEMBAYARAN

In dilentor		20	14			20)15		2016			
Indikator	(ator		III	IV	1	II.	III	IV	1	II.	III	
SISTEM PEMBAYARAN												
Transaksi Tunai												
<i>Inflow</i> (Rp Triliun)	3.33	2.60	3.26	2.39	4.08	2.81	3.66	2.50	5.07	3.39	5.28	
<i>Outflow</i> (Rp Triliun)	2.38	2.66	4.42	3.63	2.08	3.46	4.89	4.01	2.93	5.10	5.12	
Kliring :												
Nom. Kliring (Rp triliun)	12.85	12.83	13.75	14.50	13.54	10.09	14.00	18.37	19.86	21.42	18.00	
Vol. Kliring (ribu lembar)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637	
Nom. Tolakan Cek/BG Kosong (Rp miliar)	321	314	522	640	356	354	343	1.323	430	422	268	
Vol Tolakan Cek/BG Kosong (ribu lembar)	8.06	9.09	8.56	7.60	8.05	7.95	8.4	7.8	8.3	7.9	7.3	

Halaman ini sengaja dikosongkan





1.1. KONDISI UMUM

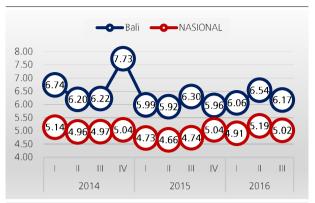


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 6,17% (yoy) dengan output riil mencapai Rp 34,9 triliun. Capaian tersebut menunjukkan perlambatan yang cukup siginifikan di¬ban¬dingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,54% (yoy). Meskipun mengalami perlam¬batan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan III 2016 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02% (yoy).

Dari sisi permintaan, perlambatan tersebut disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Sementara, dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan III 2016 disebabkan oleh perlambatan kinerja beberapa lapangan usaha, yaitu konstruksi, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan administrasi pemerintahan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali

1.2. SISI PERMINTAAN

Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Bali pada triwulan III 2016 terutama bersumber dari kinerja perlam-batan konsumsi dan investasi. Perlambatan konsumsi terutama disebabkan oleh kontraksi pertum-buhan konsumsi pemerintah yang disebabkan oleh pemo¬tong¬an anggaran APBN. Kebijakan tersebut berdampak pada realisasi belanja Kementerian dan Lembaga yang beroperasi di Provinsi Bali. Penundaan pen-cairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode September - Desember 2016 mencapai Rp 387,725 miliar yang meliputi Pemerintah Provinsi Bali dan tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar. Penundaan tersebut berdampak pada perlambatan kinerja investasi seiring dengan tertahannya keberlangsungan sejumlah program. Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga, perlambatan disebabkan oleh tendensi kenaikan harga (dido-rong oleh faktor musiman) sehingga daya beli masyarakat dan ketiadaan sumber pendapatan tambahan bagi PNS seperti pada triwulan sebelumnya (gaji ke 13 dan 14).

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)

Komponen		20	15		2015	2016			
	I	II	III	IV	2015	1	II	III	
Konsumsi	7.81	6.44	6.69	8.16	7.27	7.11	8.02	3.43	
Kons.RT	8.42	7.33	7.29	7.04	7.50	7.36	7.65	4.84	
Kons.LNPRT	-1.90	-1.31	1.30	14.80	3.17	6.72	12.17	11.76	
Kons. Pemerintah	4.43	2.86	4.42	12.20	6.56	4.91	9.49	(4.46)	
Investasi	5.32	4.91	4.17	5.62	5.00	9.66	9.51	9.14	
PMTB	7.43	7.61	6.09	5.76	6.69	9.52	9.49	9.00	
Perubahan Inv	-83.08	-85.16	-80.77	-17.02	-77.76	45.99	16.15	44.21	
Ekspor LN	12.34	16.79	-4.63	-2.74	4.53	11.68	11.15	16.63	
Impor LN	-31.84	25.14	9.03	12.49	-0.75	34.68	26.95	38.62	
Net Ekspor antar daerah	55.87	16.35	-10.22	-2.24	7.76	14.54	14.72	8.58	
PDRB	5.99	5.92	6.30	5.96	6.04	6.06	6.54	6.17	

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

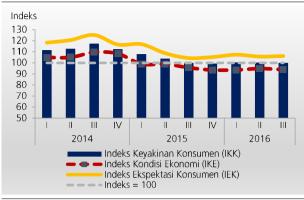
Perkembangan berbagai indikator dan hasil liaison mengindikasikan potensi peningkatan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2016 dan keseluruhan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,06% -6,46% (yoy). Dengan demikian, secara keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diperkirakan mengalami peningkatan pada kisaran 6,15% - 6,55%. Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja perekonomian bersumber dari sebagian besar komponen sisi permintaan seiring dengan masuknya periode peak season pariwisata akhir tahun (natal dan tahun baru serta musim dingin Eropa) dengan didukung kebijakan akomodatif Pemerintah untuk mendorong kinerja investasi dan kegiatan usaha di Provinsi Bali.

1.2.1. Konsumsi

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dengan *share* sebesar 48,81%, mengalami perlambatan pertumbuhan dari 7,65% (yoy) dari triwulan II 2016 menjadi sebesar 4,84% (yoy) pada

triwulan III 2016. Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut tercermin dari hasil survei konsumen Bank Indonesia yaitu penurunan rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 100,31 pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 100,06 pada triwulan triwulan III 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) turut menunjukkan penurunan dari sebesar 94,88 pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 93,89 pada triwulan III 2016. Secara lebih rinci, perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga bersumber dari perlambatan konsumsi pakaian, pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Secara keseluruhan, kecenderungan tersebut seiring dengan tendensi kenaikan harga (didorong oleh faktor musiman dan penyesuaian tarif listrik pada bulan Juli, September, dan Oktober 2016 pada ke-12 golongan tarif). Kondisi tersebut membatasi kemampuan belanja masyarakat serta tidak adanya sumber pendapatan tambahan bagi PNS seperti pada triwulan sebelumnya (gaji ke 13 dan 14). Selain itu, penurunan konsumsi pendi-dikan pada triwulan III 2016 antara lain karena gaji ke 13 dan 14 yang didapatkan pada akhir triwulan sebelumnya telah digunakan untuk pembayaran sekolah pada tahun ajaran baru.



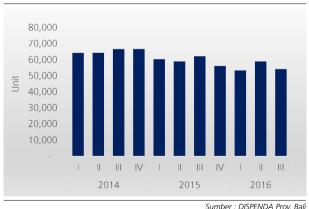
Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen

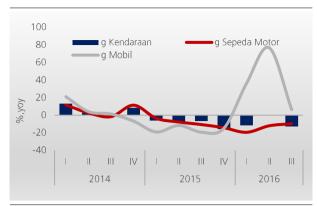


Sumber : Survei Konsumen

Grafik 1.4 Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama



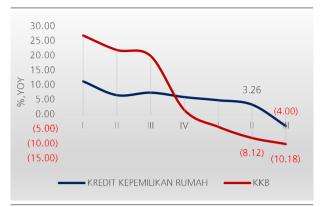
Grafik 1.5 Pendaftaran Kendaraan



Sumber : DISPENDA Prov. Bali

Grafik 1.6 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor

Perlambatan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2016 juga terindikasi dari penurunan rata-rata indeks ketepatan waktu pembelian barang tahan lama dari 92,96 pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 92,33 pada triwulan III 2016. Selain itu, perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari penurunan konsumsi barang tahan lama seperti kendaraan, sebagaimana tergambar dari penurunan pendaf-taran kendaraan baru dari sebesar 58 ribu unit pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 54 ribu unit. Penurunan tersebut sejalan dengan perlam-batan pertumbuhan pendaftaran kendaraan mobil dari 76,79% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 6,40% (yoy) pada triwulan III 2016, serta pertumbuhan pendaftaran kendaraan roda dua (motor) yang masih terkontraksi sebesar -9,71% (yoy) pada triwulan III 2016. Sejalan dengan itu. perkembangan pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) turut mengkonfirmasi perlam-batan konsumsi rumah tangga sebagaimana terlihat dari perlambatan pertumbuhan KPR dari 3,26% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi kontraksi sebesar -4,00% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu, pertumbuhan KKB mencatat kontraksi lebih dalam dari sebesar -8,12% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar -10,18% (yoy) pada triwulan III 2016.



Grafik 1.7 Kredit KPR dan KKB



Sumber : PLN distribusi Bali

Grafik 1.8 Konsumsi Listrik RT

Keberadaan Hari Raya Kuningan, Galungan, dan Idul Adha pada triwulan III 2016 ternyata belum mampu mendorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi khususnya konsumsi makan dan minum. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil *likert scale* penjualan domestik yang mengalami kenaikan dari sebesar 1,84% pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 1,93%.



Sumber : Liaison KPwBI Bali, diolah

Grafik 1.9 Likert Scale Penjualan Domestik

Perkembangan terakhir kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2016 menunjukan tendensi peningkatan seiring dengan pola musimannya di akhir tahun yang mengalami peningkatan seiring dengan adanya libur sekolah, hari raya natal, dan tahun baru. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata indeks keyakinan konsumen dari 100,06 sepanjang triwulan III 2016, menjadi sebesar 100,58 di Oktober 2016. Peningkatan konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari Indeks ekspektasi konsumen yang juga menunjukkan peningkatan pada periode Oktober 2016 menjadi sebesar 108, dibandingkan nilai rata-rata pada periode triwulan III-2016 yang sebesar 106,23. Perkiraan peningkatan tersebut juga terkonfirmasi dari perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) BPS Provinsi Bali yang memperkirakan perkiraan periode triwulan IV 2016 akan mencapai 105,88 dengan didorong oleh peningkatan indeks prediksi pendapatan sebesar 104,75. Peningkatan tersebut juga terjadi seiring dengan peningkatan optimisme konsumen seiring dengan penurunan suku bunga kredit konsumsi dan rencana implementasi ketentuan relaksasi LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) di Agustus 2016.

Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah turut mengalami perlambatan pada triwulan III 2016. Konsumsi LNPRT mengalami perlambatan dari sebesar 12,17% (yoy) di triwulan II 2016 menjadi sebesar 11,76% (yoy) pada triwulan III 2016. Perlambatan tersebut terutama lebih disebabkan oleh *base effect* terkait kegiatan MUNAS partai Golkar pada triwulan sebelumnya.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah yang memiliki pangsa sebesar 9,64%, tercatat sebagai satusatunya komponen yang mengalami kontraksi pertumbuhan dari 9,49% (yoy) pada triwulan II 2016

menjadi sebesar -4,46% (yoy) pada triwulan III 2016. Perlambatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh pemotongan APBN 2016 sebesar Rp 133 triliun yang berdampak pada pengurangan belanja Kementerian dan Lembaga yang berada wilayah Provinsi Bali. Selain itu, kontraksi pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah juga disebabkan oleh penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk APBD Provinsi Bali dan tiga Kabupaten/ Kota vaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem yang secara total mencapai Rp 387,7 miliar. Untuk APBD Provinsi Bali, penundaan pencairan DAU serta pencapaian pendapatan yang masih jauh di bawah target (sebagai dampak tidak tercapainya Pajak Kendaraan Bermotor), berdampak pada pemotongan APBD Bali untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 439 miliar serta belanja langsung sebesar Rp 80,58 miliar. Pemotongan serta penundaan pencairan tersebut berdampak signifikan kepada perekonomian mengingat peran pemerintah stimulan perekonomian. Perlambatan sebagai tersebut terlihat dari perlam-batan pertumbuhan belanja APBD Provinsi Bali dari 29,15% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 16,18% (yoy) pada triwulan III 2016.



Grafik 1.10 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali

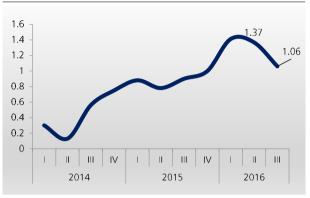
Perkembanga kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2016 diperkirakan masih mengalami perlambatan seiring dengan pemotongan APBN yang mempengaruhi kinerja Kementerian dan Lembaga di Provinsi Bali serta penundaan pencairan DAU untuk APBD Provinsi Bali dan tiga Kabupaten/Kota yaitu Karangasem, Badung, dan Denpasar. Meskipun demikian, komponen konsumsi pemerintahan masih berpotensi untuk tumbuh didorong oleh program *tax amnesty* yang menunjukkan perkembangan positif.

1.2.2. Investasi

Kinerja investasi Provinsi Bali triwulan III 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 9,14% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan II 2016 yang sebesar 9,51% (yoy). Perlambatan yang tejadi bersumber dari perlambatan pertum¬buhan PMTB dari sebesar 9,49% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 9,00% (yoy) pada triwulan III 2016. Perlambatan investasi tersebut terkonfirmasi dari *likert* investasi (hasil survei dan liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali) yang mengalami sedikit penurunan dari sebesar 1,37 poin pada triwulan II 2016 menjadi 1,06 poin di triwulan III 2016. Berdasarkan hasil survei dan liaison, perlambatan tersebut juga disebabkan oleh telah selesainya pelaksanaan investasi pada periode 2016 pada triwulan sebelumnya.

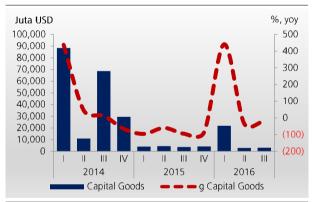
Berdasarkan subkomponennya, perlambatan PMTB bersumber dari perlambatan PMTB bangunan dari sebesar 12,15% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 7,15% (yoy) pada triwulan III 2016. Perlambatan tersebut juga terindikasi dari perlambatan pertum-buhan penjualan semen dari sebesar 0,28% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi kontraksi sebesar -3,73% (yoy) pada triwulan III 2016. Selain itu, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan III 2016 turut menunjukkan penurunan perkembangan investasi dari sebesar 7,9% (SBT) pada triwulan II 2016 menjadi 0,46% (SBT) pada triwulan III 2016. Sementara itu, perkembangan investasi bangunan Pemerintah turut mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan realisasi belanja modal APBD Provinsi Bali pada triwulan III 2016 yang mencapai 17,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang tercatat sebesar 87,05% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan pemotongan APBN dan penundaan pencairan DAU.

Peningkatan kinerja PMTB non bangunan belum mampu mendorong peningkatan kinerja PMTB secara keseluruhan. Peningkatan kinerja PMTB bangunan

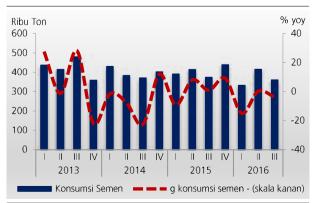


Sumber : Survei dan Liaison Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.11 Likert Investasi



Grafik 1.12 Perkembangan Volume Impor Barang Modal



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

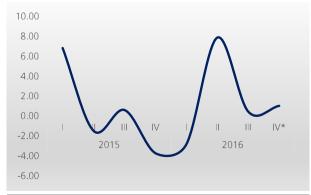
Grafik 1.13 Penjualan Semen Provinsi Bali

yang terlihat dari perbaikan pertumbuhan impor barang modal dari sebesar -34,39% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar -15,46% (yoy) pada triwulan III 2016.

Sementara itu, perkembangan investasi pada triwulan IV 2016 menunjukkan tendendi peningkatan i seiring dengan relaksasi ketentuan LTV, pemberlakuan Tax Amnesty serta suku bunga perbankan yang akomodatif, investasi pada triwulan IV 2016 diperkirakan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil survei dan liaison Bank Indonesia, pelaku usaha mengaku optimis terhadap perkembangan ekonomi dengan didukung oleh upaya Pemerintah untuk mempermudah investasi serta reformulasi kebijakan 7 days reverse repo rate yang telah efektif pada Agustus 2016 dan mengalami penurunan menjadi 4,75% pada Oktober 2016. Perkiraan peningkatan tersebut terkonfirmasi



Sumber : Hasil Survei dan Liaison Bank Indonesia Grafik 1.14 Llkert Scale Perkiraan Perkembangan Investasi



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.15 Perkiraan Perkembangan Investasi

dari hasil perkiraan perkembangan investasi SKDU yang mengalami peningkatan dari sebesar 0,46% (SBT) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 1,04% (SBT) pada triwulan IV 2016. Peningkatan investasi juga terkonfirmasi oleh peningkatan realisasi fisik APBD Provinsi Bali pada Oktober 2016 yang tercatat sebesar 81,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan Oktober 2015 yang tercatat sebesar 79,61%.

1.2.3. Neraca Perdagangan

Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Bali triwulan III 2016, mencatat perbaikan kinerja seperti tergambar dari nilai surplus yang meng-alami peningkatan yaitu sebesar Rp 4,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus triwulan II 2016 (Rp 3,5 triliun). Peningkatan nilai surplus tersebut didorong oleh penurunan defisit neraca perdagangan antar daerah dari sebesar Rp 11,4 triliun pada triwulan II 2016 menjadi sebesar Rp 10,9 triliun pada triwulan III 2016. Sementara itu, pada periode yang sama, neraca perdagangan luar negeri mencatatkan pening-katan surplus dari Rp 14,9 triliun di triwulan II 2016 menjadi sebesar Rp 15,5 triliun pada triwulan III 2016.

Net Ekspor antar Daerah

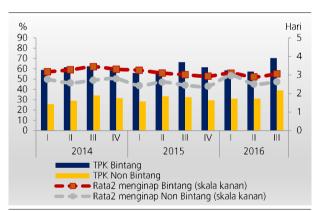
Kinerja net ekspor antar daerah menunjukan sedikit perlambatan, dengan pertumbuhan pada triwulan III 2016 tercatat sebesar 8,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2016 yang sebesar 14,72% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh terkontraksinya kinerja ekspor dan impor antar daerah menjadi sebesar -11,16% (yoy) dan -4,05% (yoy) pada triwulan III 2016. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan tingkat konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan harga TTL dan pengeluaran pendidikan pada periode sebelumnya serta ketersediaan pasokan yang terjaga.

Ekspor Luar Negeri

Pada triwulan III 2016, perkembangan kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) Provinsi Bali mencatat peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 16,63% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan II 2016 yang sebesar 11,15%(yoy). Peningkatan tersebut bersumber dari ekspor jasa luar negeri dan ekspor beberapa komoditas utama Bali pada triwulan III 2016.

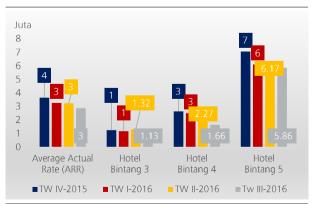
Ekspor jasa luar negeri mencatat pertumbuhan sebesar 18,23% (yoy) pada triwulan III 2016, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 13,78% (yoy). Kondisi ini seiring dengan i) mulai meningkatnya jumlah kunjungan wisman diperiode triwulan III 2016, seiring dengan periode high season pariwisata, ii) kondisi perekonomian Global, khususnya Australia yang semakin membaik, iii) kebijakan promosi dan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pelakku usaha dalam rangka perluasan dan pengembangan pasar serta pemberian benefit bagi pihak yang melakukan kerjasama, iv) peningkatan kualitas layanan/value added perusahaan melalui penambahan investasi, v) penurunan tarif harga jual, khususnya pada nilai kontrak perusahaan dengan travel agent mitra, vi) semakin intensifnya kerjasama pelaku usaha dengan konsultan pemasaran di luar negeri, vii) program kunjungan rutin ke even pariwisata di luar negeri, viii) upaya ekspansi pasar, dan ix) kerjasama pelaku usaha dengan perusahaan asuransi di luar negeri. Perkembangan tersebut terlihat dari peningkatan pertumbuhan kunjungan wisman dari sebesar 21,84% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 27,21% (yoy) pada triwulan III 2016. Kondisi tersebut juga tergambar dari peningkatan TPK hotel berbintang dari sebesar 57,3% pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 70,43% pada triwulan III 2016. Sejalan dengan peningkatan TPK hotel berbintang, TPK hotel non bintang turut menunjukan peningkatan dari sebesar 31,09% pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 39,02% pada triwulan III 2016. Meskipun demikian, berdasarkan hasil survei Perolehan Data Properti Komersial yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Average Room Rate Hotel bintang 3 s.d. bintang 5 di Provinsi Bali pada triwulan III 2016 mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan tertahannya pertumbuhan kinerja ekspor jasa luar negeri yang lebih tinggi.

Dari sisi ekspor barang, peningkatan kinerja ekspor luar negeri didorong oleh peningkatan kinerja ekspor komoditas perikanan yang menunjukkan peningkatan seiring dengan relaksasi ketentuan pelarangan transshipment pada 29 April 2016 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 yang mendorong hasil tangkapan ikan khususnya ikan tuna. Selain itu peningkatan produksi perikanan tangkap sesuai dengan pola musimannya termasuk periode panen tuna turut berkontribusi mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan. Selain perikanan, ekspor komoditas perhiasan turut mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei dan liaison, peningkatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Grafik 1.16 Tingkat Penghunian Kamar



Sumber: Survei PPKom Bank Indonesia

Grafik 1.17 Average Room Rate Bali

terjadi seiring dengan ekspansi pelaku usaha untuk meningkatan produksi didukung dengan permintaan yang terjaga.



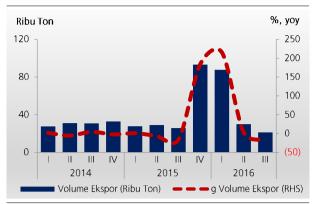
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1. 18 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

Meskipun demikian, ekspor barang luar negeri Provinsi Bali mengalami perlambatan terlihat dari kontraksi pertumbuhan nilai ekspor barang dari sebesar 4,94% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar -1,12% (yoy) pada triwulan III 2016 serta pertumbuhan volume ekspor luar negeri dari sebesar 3,27% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar -17,74% (yoy) pada triwulan III 2016 menahan peningkatan pertumbuhan ekspor luar negeri yang lebih tinggi.

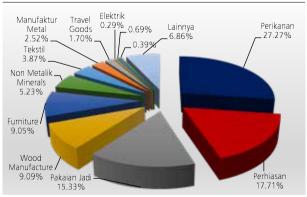


Grafik 1.19 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali



Grafik 1.20 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

komoditas utama Provinsi Ekspor Bali masih didominasi oleh perikanan (27,52%), perhiasan (14,97%), pakaian jadi (14,56%), produk olahan kayu (14,56%), dan furniture (8,42%). Perkembangan terakhir pertumbuhan beberapa komoditas utama tersebut cenderung mengalami perlambatan antara lain pakaian jadi, produk olahan kayu, dan furniture. Perlambatan ekspor pakaian jadi telah terjadi selama beberapa tahun terakhir disebabkan oleh kompetisi dengan Vietnam dan Kamboja memiliki biaya produksi (listrik, suku bunga, dsb) dan tenaga kerja yang lebih murah serta iklim usaha yang kondusif¹. Sementara itu, ekspor produk olahan kayu dan furniture mengalami perlambatan seiring dengan keterbatasan bahan baku serta perbaikan permintaan negara utama tujuan ekspor kayu (Amerika) yang belum sepenuhnya pulih.

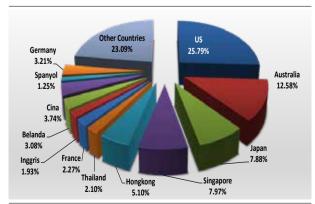


Grafik 1.21 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw III 2016



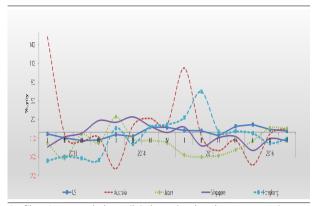
Grafik 1. 22 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

Negara tujuan ekspor Provinsi Bali masih didominasi oleh Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan Hongkong, dengan share masing-masing sebesar 25,79%, 12,58%, 7,88%, 7,97%, dan 5,10%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan nilai ekspor ke sebagian besar negara tujuan utama tersebut sepanjang triwulan III 2016 mengalami perlambatan. Perlambatan terjadi pada negara tujuan Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan Hongkong. Perlambatan ekspor ke negara tersebut seiring dengan perekonomian terutama Amerika yang belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, kinerja ekspor barang Provinsi Bali ke Australia justru mengalami peningkatan sejalan dengan perekonomian Australia yang mulai membaik, seiring dengan perbaikan harga komoditas dunia. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekspor Bali ke Australia dari sebesar -3,03% (yoy) pada triwuan II 2016 men-jadi 5,86% (yoy) pada triwulan III 2016.



Grafik 1. 23 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

¹ Berdasarkan Focus Group Discussion yang dilakukan den Pelaku Usaha



Grafik 1. 24 Pertumbuhan Nilai Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

Impor Luar Negeri

Perkembangan kinerja impor luar negeri pada triwulan III 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar 38,62% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan II 2016 yang sebesar 26,95% (yoy). Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan impor barang luar negeri dari sebesar 62,3% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 95,52%(yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari pertumbuhan nilai impor barang Provinsi Bali yang mengalami peningkatan dari sebesar -16,80% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 4,34%(yoy) pada triwulan III 2016. Meskipun demikian, pertumbuhan volume impor masih mengalami kontraksi pertumbuhan yang tercatat sebesar -45,78% (yoy) pada triwulan III 2016, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi periode triwulan II 2016 yang tercatat sebesar -17,57%(yoy).

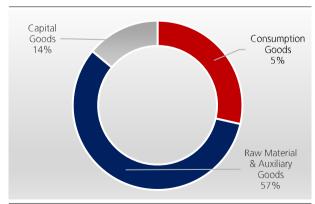


Grafik 1. 25 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali

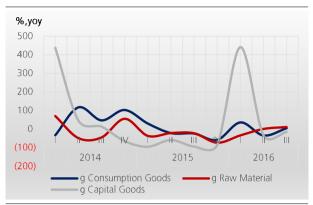


Grafik 1. 26 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

Peningkatan pertumbuhan nilai impor terjadi pada semua kelompok barang impor, yaitu capital goods, raw material goods dan consumption goods. Raw Material yang memiliki share terbesar sebesar 57%, mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,73% (yoy) pada triwulan III 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang tercatat sebesar 0,35%. Sejalan dengan kondisi tersebut, Capital goods yang memiliki share sebesar 14% dari total impor, menunjukkkan peningkatan dari kontraksi sebesar -34,39% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar -15,46% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan kedua kelompok barang impor tersebut terjadi sejalan dengan peningkatan kegiatan industri pengolahan pada triwulan III 2016. Sementara itu, impor barang konsumsi pada triwulan III 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 4,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan -34,36% (yoy)



Grafik 1. 27 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC



Grafik 1. 28 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

pada triwulan Il 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman dan peningkatan TPK hotel yang mendorong permintaan kebutuhan pangan impor salah satunya seperti ikan salmon.

Kinerja impor jasa Provinsi Bali turut menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 19,1% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 27,48% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan tenaga kerja asing pasca implementasi MEA di akhir 2016. Peningkatan terutama terjadi pada tenaga pariwisata untuk perhotelan terutama hotel dengan jaringan internasional antara lain untuk tenaga *chef*, serta *top level manager*.

Tracking triwulan berjalan

Kinerja ekspor triwulan IV 2016 diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan masuknya periode *peak season* pariwisata sesuai dengan pola musimannya sebagai dampak libur natal, tahun baru, dan liburan sekolah serta musim dingin di Eropa. Dari sisi ekspor barang, peningkatan didorong oleh kinerja ekspor seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi beberapa negara tujuan ekspor salah satunya Australia dengan didukung upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor oleh pelaku ekspor. Selain itu, mengikuti pola musimannya, permintaan ekspor akan mengalami peningkatan di akhir tahun

terutama untuk produk olahan kayu dan *furniture*. Meskipun demikian, pemogokan 401 kapal ATLI pada Oktober s.d. 8 November 2016 lalu berpotensi berdampak pada penurunan produksi ikan tuna yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama perekonanan di Provinsi Bali.

1.3. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2016 disebabkan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, dan administrasi Pemerintahan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh tekanan harga yang menyebabkan keterbatasan daya beli sehingga berpengaruh pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Sementara lapangan usaha administrasi pemerintahan mengalami perlambatan disebabkan oleh pemotongan APBN untuk Kementerian dan Lembaga di Wilayah Bali serta penundaan pencairan DAU untuk APBD Provinsi Bali. Kondisi tersebut juga berdampak pada terhambatnya beberapa pembangunan yang menyebabkan perlambatan pada lapangan usaha konstruksi.

Berlangsungnya periode *peak season* pariwisata pada triwulan III 2016 yang mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian juga belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali keseluruhan pada triwulan III 2016.

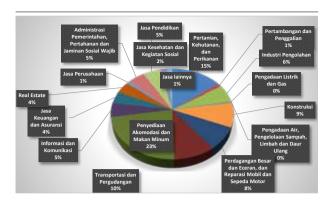
Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)*

V		20)15		2015	2016				
Komponen	1	II	III	IV	2015	I	II	Ш		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.54	4.9	2.4	2.81	3.41	0.15	-0.05	4.77		
Pertambangan dan Penggalian	-4.19	(6.5)	(9.8)	-6.57	-6.83	5.01	6.31	5.71		
Industri Pengolahan	6.73	8.6	6.9	6.34	7.13	4.76	2.08	3.23		
Pengadaan Listrik, Gas	3.32	(4.5)	(1.9)	1.46	-0.45	7.16	11.39	5.26		
Pengadaan Air	0.93	1.1	0.8	5.12	1.99	9.64	6.82	6.14		
Konstruksi	2.67	3.6	6.1	7.59	5.01	7.62	9.73	9.13		
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.66	6.9	8.9	7.60	7.75	8.78	6.85	6.39		
Transportasi dan Pergudangan	4.48	4.5	5.5	3.63	4.54	6.25	6.93	7.64		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.90	5.8	5.5	4.87	5.76	6.61	7.24	7.86		
Informasi dan Komunikasi	9.79	9.0	10.8	10.12	9.94	8.67	8.91	8.06		
Jasa Keuangan	6.57	4.1	10.3	5.78	6.66	8.51	7.68	7.05		
Real Estate	5.86	4.9	4.9	5.09	5.20	5.79	5.53	4.52		
Jasa Perusahaan	5.23	6.9	7.2	8.54	6.99	10.14	6.39	6.27		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.28	7.9	9.4	8.31	8.27	3.06	12.86	0.24		
Jasa Pendidikan	8.75	8.8	8.2	9.91	8.94	9.50	9.81	3.84		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.06	7.9	9.8	9.26	8.76	9.96	9.50	8.57		
Jasa lainnya	8.96	7.4	7.6	8.01	7.99	7.70	8.34	8.24		
PDRB	5.99	5.92	6.30	5.96	6.04	6.05	6.53	6.17		

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali * Tahun Dasar 2010

Struktur perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2016, masih didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha utama antara lain: (1) penyediaan akomodasi makan dan minum (23%), (2) pertanian, kehutanan dan perikanan (15%), (3) konstruksi (9%), (4) transportasi dan pergudangan (9%), dan (5) perdagangan besar dan eceran (8%). Dominasi industri pariwisata masih terlihat dari total pangsa lapangan usaha terkait dengan industri pariwisata yang mencapai 31%. Sementara itu, berdasarkan dari

sumbangan pertumbuhan ekonominya, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta lapangan usaha konstruksi menjadi lapangan usaha yang memiliki sumbangan tertinggi masing-masing sebesar 1,54% dan 0,84%. Lapangan usaha pertanian yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan III 2016, mencatat peningkatan sumbangan secara signifikan menjadi 0,68%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1.29 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan III 2016

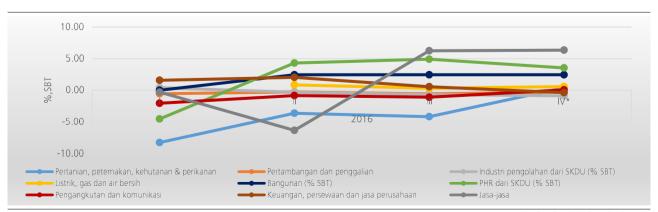


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1.30 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan III 2016

Memasuki triwulan IV 2016, sebagian besar lapangan usaha menunjukkan peningkatan terlihat dari peningkatan sebagian besar lapangan utama perkiraan kegiatan dunia usaha (Survei Kegiatan Dunia Usaha) pada triwulan IV 2016 antara lain pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, bangunan dan jasa-jasa.

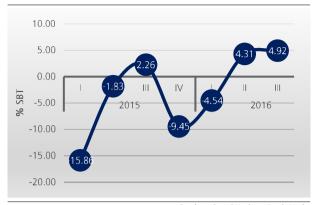
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan kinerja pada triwulan III 2016 yang tercatat tumbuh sebesar 7,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang sebesar 7,24% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang menunjukkan peningkatan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dari sebesar 4,31% (SBT) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 4,92% (SBT) di triwulan III 2016. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga didorong oleh adanya faktor musiman, vaitu periode Idul Adha, Galungan, dan Kuningan serta libur musim panas di Eropa dan musim dingin di Australia. Kondisi tersebut mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik (wisdom) dan wisatawan mancanegara (wisman). Peningkatan kunjungan wisman juga didorong oleh kebijakan bebas visa yang telah mencapai 169 negara. Dampak dari pembebaan visa tersebut sudah mulai terlihat dari pertumbuhan wisman asal India dan Inggris yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, juga terkonfirmasi dari informasi PT. Angkasa Pura I, yang mengkonfirmasi kedatangan 10.500 turis dari Tiongkok di periode Juli 2016 dan informasi dari Panorama Tours yang mengkonfirmasi kedatangan 5.000 wisman asal



Grafik 1.31 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.32 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan



2015

gWisman

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

2016

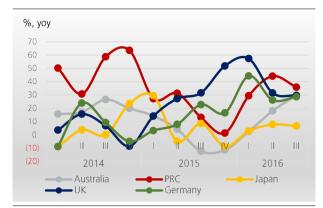
Grafik 1.33 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

Wisman

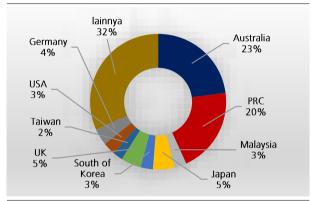
2014

Polandia. Kondisi tersebut terkonfirmasi juga dari peningkatan kunjungan wisman pada triwulan III 2016 tercatat sebesar 27,21%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2016 yang tercatat sebesar 21,84%(yoy).

Perkembangan negara asal wisman pada triwulan III 2016 menunjukkan perubahan dengan Inggris dan Jerman masuk ke dalam lima negara utama asal wisman dengan *share* masing-masing sebesar 5% dan 4%. Perkembangan tersebut sebagai dampak dari pembebasan visa ke Indonesia untuk 169 negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Pertumbuhan wisman asal Jerman mencatat peningkatan pada triwulan III 2016, yaitu sebesar 28,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 1.34 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.35 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali

yang tercatat sebesar 26,19% (yoy). Sementara itu, wisman Australia yang masih mencatat *share* negara asal wisman tertinggi masih mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar 17,97% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 29,79% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan mulai membaiknya perekonomian Australia sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat² (disebabkan oleh penurunan suku bunga), serta periode musim dingin pada Juni-Agustus sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisman asal Australia ke Bali.

Memasuki triwulan IV 2016 Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan masuknya periode *peak season* pariwisata di akhir tahun (Natal dan tahun baru). Penetapan negara

² Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) November 2016: "Consumption growth has continued to be supported by low interest rates, rising household wealth and further increases in employment"

bebas visa berpotensi semakin mendorong kunjungan wisman ke Provinsi Bali yang sudah terkonfirmasi dari peningkatan kunjungan wisman asal Inggris dan Jerman masuk ke dalam lima besar negara asal wisman terbesar pada triwulan III 2016. Garuda Indonesia juga telah menargetkan untuk mengangkut 80.000 turis Indonesia ke Australia melalui kerja sama *Tourism Australia* selama periode September 2016 hingga April 2017 yang berpotensi mendorong kunjungan wisman ke Provinsi Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan juga didukung oleh peresmian rute Maumere – Denpasar dengan maskapai Garuda Indonesia, untuk mendorong kunjungan wisatawan dan mendukung Bali sebagai pintu masuk (hub) pariwisata Indonesia.

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Kategori transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan dari sebesar 6,93%(yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 7,64% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan industri pariwisata, sebagaimana terlihat dari peningkatan pertumbuhan jumlah kunjungan wisman yang mendorong peningkatan penggunaan transportasi ke Pulau Bali baik transportasi udara maupun transportasi laut.

Transportasi Udara

Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi terkonfirmasi dari peningkatan kinerja transportasi udara baik penumpang dan kargo. Seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan keberangkatan jumlah penumpang mengalami peningkatan dari sebesar 5,71% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 19,88% (yoy) pada triwulan III 2016. Selaras dengan jumlah kedatangan penumpang, kargo internasional turut mengalami peningkatan pertumbuhan kedatangan dari sebesar 0,26% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 0,87% (yoy) pada triwulan III 2016.



Sumber : BUMN

Grafik 1.36 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai

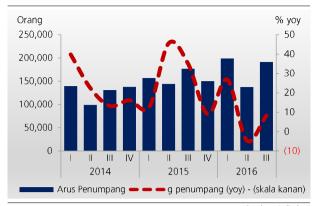


Sumber : BUMN

Grafik 1.37 Jumlah Keberangkatan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai

<u>Transportasi Laut</u>

Pada triwulan III 2016 perkembangan kinerja transportasi laut turut mengalami peningkatan seiring dengan libur sekolah pasca Idul Fitri serta *long weekend* yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan pertumbuhan arus penumpang dari sebesar -4,60% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 8,26%% (yoy) pada triwulan III 2016.

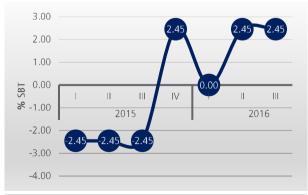


Sumber : Pelindo III

Grafik 1.38 Arus Penumpang Pelabuhan Benoa Provinsi Bali

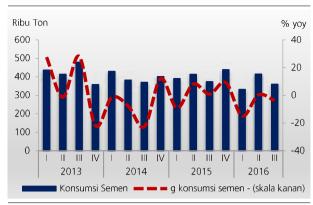
1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi

Seiring dengan perlambatan kinerja komponen investasi, lapangan usaha konstruksi mengalami perlambatan. Lapangan usaha konstruksi mengalami perlambatan dari sebesar 9,73% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 9,13% (yoy) pada triwulan III 2016. Perlambatan ini diindikasikan oleh perlambatan pertumbuhan penjualan semen dari sebesar 0,28% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar -3,73% (yoy) pada triwulan III 2016. Selain itu, perlambatan kinerja lapangan usaha ini terlihat dari perkembangan kegiatan usaha sektor bangunan yang stagnan sebesar 2,45% pada triwulan III 2016. Perlambatan tersebut seiring dengan pemotongan APBN dan penundaan pencairan DAU yang menghambat sejumlah pembangunan di Provinsi Bali.



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.39 Kegiatan Usaha Sektor Bangunan



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.40 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali

Memasuki triwulan IV 2016, lapangan usaha konstruksi menunjukkan tendensi peningkatan, seiring dengan relaksasi ketentuan LTV untuk KPR dan penurunan suku bunga KPR berpotensi mendorong peningkatan permintaan rumah yang pada gilirannya meningkatkan lapangan usaha konstruksi. Selain itu, lapangan usaha konstruksi juga diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan penurunan BI 7 Days Reverse Repo Rate pada Oktober 2016 menjadi sebesar 4,75% yang diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan. Perkembangan positif program tax amnesty juga berpotensi mendorong peningkatan permintaan rumah tinggal.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada triwulan III 2016, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan perlambatan pertumbuhan dari sebesar 6,87% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 6,39% (yoy) pada triwulan III 2016. Perlambatan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran yang menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi pada triwulan III 2016 sebesar -10,87% (yoy). Perlambatan pada lapangan usaha ini seiring dengan perlambatan kinerja konsumsi sebagai dampak tendensi kenaikan harga (didorong oleh faktor musiman dan penyesuaian tarif listrik pada bulan Juli, September, dan Oktober 2016 pada ke-

12 golongan tarif) sehingga membatasi kemampuan belanja masyarakat serta tidak adanya lagi sumber pendapatan tambahan bagi PNS seperti pada triwulan sebelumnya (gaji ke 13 dan 14). Berlangsungnya hari raya Idul Fitri, Galungan, Kuningan dan Idul Adha belum mampu mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran secara keseluruhan. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang menunjukkan kontraksi pertumbuhan pada sebagian besar kelompok komoditas antara lain kelompok suku cadang, bahan kimia, peralatan tulis, dan bahan konstruksi.



Sumber : Survei Penjualan Eceran

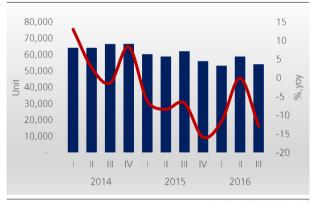
Grafik 1.41 Perkembangan Total Penjualan Kelompok Komoditas

Perlambatan terlihat dari iuga pertumbuhan pendaftaran kendaraan bermotor roda dua yang masih terkontraksi sebesar -9,71% (yoy) pada triwulan III 2016. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan pendaftaran kendaraan roda empat turut mengalami perlambatan dari sebesar 76,96% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 6,40% (yoy) pada triwulan III 2016. Sehingga secara keseluruhan pertumbuhan pendaftaran kendaraan bermotor di Provinsi Bali pada triwulan III 2016 mengalami kontraksi sebesar -12,83% (yoy) pada triwulan III 2016. Kondisi tersebut juga terkonfirmasi dari penurunan rata-rata indeks ketepatan waktu pembelian barang tahan lama dari sebesar 92,96 pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 92,33 pada triwulan III 2016. Perlambatan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran ini juga terlihat dari perlambatan pertumbuhan kredit perdagangan besar dan eceran 19,30% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 18,08% (yoy) pada triwulan III 2016.



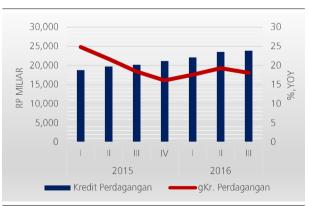
Sumber : DISPENDA Prov. Bali

Grafik 1.42 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor



Sumber : DISPENDA Prov. Bali

Grafik 1.43 Pendaftaran Kendaraan



Sumber : DISPENDA Prov. Bali

Grafik 1.44 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Seialan dengan peningkatan lapangan usaha akomodasi penyediaan makan dan minum. perkembangan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada triwulan IV 2016 turut mengalami peningkatan yang terkonfirmasi oleh hasil survei penjualan eceran yang menunjukkan perbaikan perkiraan rata-rata pertumbuhan tahunan total penjualan eceran dari sebesar -4,31% (yoy) pada triwulan III 2016, menjadi sebesar -2,89% (yoy) pada periode triwulan IV 2016 (Oktober 2016). Peningkatan lapangan usaha ini, juga didorong oleh membaiknya daya beli masyarakat dan adanya perayaan hari keagamaan.

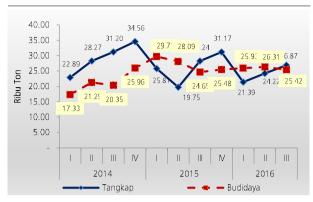
1.3.5. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar -0,01% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 4,77% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja subkategori perkebunan seiring dengan peningkatan produksi pisang dan jeruk yang mengalami panen. Peningkatan subkategori perikanan turut mendorong peningkatan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, terlihat dari peningkatan produksi perikanan dari 54,53 ribu ton pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 56,65 ribu ton pada triwulan III 2016.



Sumber : Dinas Perikanan

Grafik 1.45 Perkembangan Produksi Perikanan



Sumber : Dinas Perikanan

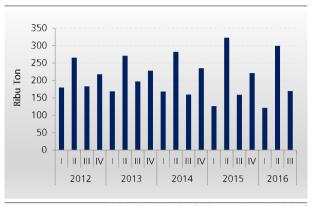
Grafik 1.46 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dari sebesar 24,22 ribu ton pada triwulan II 2016 menjadi sbeear 26,87 ribu ton seiring dengan kondisi cuaca yang mendukung untuk penangkapan ikan.

Di sisi lain, subkategori tanaman bahan makanan mengalami penurunan dari sebesar 299,29 ribu ton pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 169,45 ribu ton pada triwulan III 2016 seiring dengan tidak adanya musim panen pada triwulan III 2016. Sejalan dengan perkembangan tersebut pertumbuhan kredit pertanian masih mengalami perlambatan dari sebesar dari sebesar 19% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 14,72% (yoy) pada triwulan III 2016.



Grafik 1.47 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

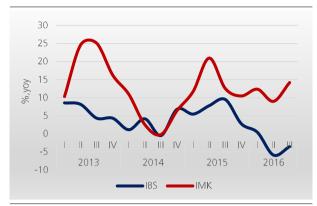


Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Grafik 1.48 Perkembangan Produksi Padi di Bali

Perkembangan lapangan usaha pertanian pada triwulan IV 2016 menunjukkan tendensi peningkatan didorong oleh musim panen komoditas tabama yaitu padi dan juga didukung oleh telah selesainya perbaikan jaringan irigasi primer (menggunakan anggaran APBN yang merupakan pengelolaan Balai Sungai). Perbaikan irigasi mencakup luasan lahan sebesar 6.204 hektar yang tersebar di Kab. Gianyar, Tabanan, Klungkung.

1.3.6. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan III 2016, pertumbuhan lapangan industri pengolahan tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,08%(yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan kinerja ekspor yang didorong oleh peningkatan permintaan dari beberapa negara tujuan ekspor Bali. Relaksasi transshipment serta musim panen tuna turut berkontribusi mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Peningkatan tersebut juga tercermin dari perbaikan pertumbuhan Indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Indeks Manufaktur Mikro Kecil dan Menengah (IMK). IBS mengalami perbaikan dari sebesar -5,89% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 3,53% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu, IMK mengalami peningkatan dari sebesar 8,99% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 14,19%



Sumber: BPS Provinsi Bali Grafik 1.49 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri

Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)



Grafik 1.50 Kredit Kategori Industri

(yoy) pada triwulan III 2016. Meskipun demikian, pertumbuhan kredit industri pengolahan masih mengalami perlambatan dari sebesar 17,5% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 12,02% (yoy) pada triwulan III 2016.

Memasuki triwulan IV 2016, industri pengolahan menunjukkan tendensi peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan pada akhir tahun khususnya produk olahan kayu dan *furniture* untuk ekspor. Selain itu, ekspor industri pengolahan diperkirakan mengalami peningkatan permintaan dengan didukung oleh diversifikasi negara tujuan ekspor berpotensi mendorong peningkatan lapangan usaha ini.



PERKEMBANGAN KINERJA DUNIA USAHA DIPERKIRAKAN SEMAKIN MEMBAIK PADA TRIWULAN III-2016

Kineria dunia usaha pada Triwulan III-2016 diperkirakan semakin membaik. Kondisi tersebut terungkap dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Hasil survei menunjukkan perbaikan, yang tercermin dari banyaknya responden yang menjawab terjadinya peningkatan/perbaikan, yang dituangkan dalam Saldo Bersih Tertimbang (SBT) secara total, dari -1,78% pada triwulan II-2016 menjadi 7,97% pada triwulan III-2016. Peningkatan kinerja terindikasi terjadi pada beberapa sektor utama perekonomian Bali. Sektor perdagangan hotel dan restoran menunjukkan kenaikan SBT dari 4,31% pada triwulan II-2016 menjadi 4,92% di triwulan III-2016. Sektor jasa-jasa juga menunjukkan peningkatan dari -6,35% di menjadi 6,25% pada periode yang sama. Sementara itu, sektor pertanian menunjukkan kinerja yang melambat, sebagaimana terindikasi dari penurunan nilai SBT dari -3,64% pada triwulan II-2016 menjadi -4,19% di triwulan III-2016.

Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi dari perbaikan kondisi likuiditas, rentabilitas, dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Saldo bersih kondisi likuiditas selama 3 bulan terakhir tercatat sebesar 40,16%, meningkat dari triwulan II-2016 yang sebesar 32,06%. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk mencetak laba (rentabilitas) juga meningkat

dari saldo bersih kondisi rentabilitas sebesar 32,82% pada triwulan II-2016 menjadi sebesar 39,37% pada triwulan III-2016.

Selanjutnya, peningkatan kinerja usaha juga tercermin dari peningkatan penggunaan tenaga kerja. SBT penggunaan tenaga kerja pada triwulan III-2016 mencapai -0,31%, lebih tinggi dibanding SBT triwulan sebelumnya yang sebesar -2,41%. Peningkatan penggunaan tenaga kerja, antara lain terjadi pada sektor perdagangan hotel dan restauran dengan nilai SBT -0,24%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -1,06%. Sementara untuk sektor jasa-jasa meningkat dari 0% di triwulan III-2016 menjadi 6,35% pada triwulan III-2016.

Meskipun demikian, rata-rata kapasitas produksi terpakai pada triwulan III-2016 sedikit menunjukkan penurunan yaitu pada level 76,93%, lebih rendah dibanding 79,53% di triwulan sebelumnya. Penurunan kapasitas produksi di triwulan III-2016, terutama terjadi pada sektor pertanian dengan tingkat kapasitas produksi sebesar 86,25%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 89,83%.

Meskipun secara umum terjadi peningkatan usaha, namun beberapa pelaku usaha yang disurvei mengkonfirmasi untuk belum melakukan

Metodologi:

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei triwulanan yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Pada triwulan III-2016, jumlah responden mencapai 127 responden yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Bali dan dipilih secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden baik melalui *hardcopy* kuesioner maupun secara online melalui website. Metode perhitungan dilakukan dengan metode saldo bersih (SB-*net balance*), yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama". Khusus untuk perhitungan saldo bersih kegiatan usaha, harga jual, penggunaan tenaga kerja, kondisi investasi dilakukan dengan metode saldo bersih tertimbang (SBT-Weighted net balance) yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/ sub sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/sub sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

penambahan investasi. Hal ini terkonfirmasi oleh penurunan nilai SBT menjadi 0,46% pada triwulan III-2016 dari triwulan sebelumnya 7,90%. Sebagian dari sektor utama yang menunjukkan penurunan investasi antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran (nilai SBT turun dari 3,42% pada triwulan III-2016 menjadi 2,25% di triwulan III-2016). Sektor pertanian juga mengalami penurunan kinerja investasi dari -1,05% di triwulan III-2016 menjadi -3,64% pada triwulan III-2016. Selain itu, sektor bangunan dan sektor pengakutan dan komunikasi juga menunjukkan penurunan investasi pada triwulan III-2016 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tekanan harga jual pada triwulan III-2016 terindikasi meningkat, tercermin dari nilai SBT harga jual yang meningkat menjadi sebesar 22,84%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 1,39%. Peningkatan harga jual, terutama terjadi pada sektor perdagangan hotel dan restoran dengan nilai SBT sebesar 4,78% lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,02%. Sektor lain yang juga menunjukkan peningkatan harga jual adalah sektor pertanian dengan nilai SBT sebesar 6,88% di triwulan III-2016, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -3,54%.

Untuk triwulan IV-2016, peningkatan kinerja usaha diperkirakan akan berlanjut. Secara triwulanan,

perkembangan usaha diperkirakan mengalami ekspansi pada triwulan IV-2016 seperti tercermin dari SBT perkiraan kinerja usaha triwulan IV-2016 sebesar 11,84%. Ekspansi kegiatan dunia usaha, diperkirakan terjadi pada sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasajasa. Dengan ekspektasi peningkatan kinerja pada triwulan IV-2016 tersebut, beberapa pelaku usaha berencana meningkatkan investasi yang terindikasi dari peningkatan nilai SBT triwulan IV-2016 sebesar 1,04%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 0,46%. Pelaku usaha yang diperkirakan menunjukkan peningkatan investasi adalah sektor perdagangan hotel dan restauran dengan nilai SBT sebesar 2,53%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2016 yang sebesar 2,25%.

Sementaraitu, terkaitdengan perkiraan perkembangan harga jual, pelaku usaha memperkirakan akan terjadinya perlambatan kenaikan harga jual pada triwulan IV-2016, seiring dengan semakin meningkatnya tingkat persaingan. Akibatnya, para pelaku usaha berupaya untuk menjaga kenaikan harga jual agar tidak terlalu tinggi. Perlambatan kenaikan harga jual terindikasi oleh penurunan nilai SBT perkiraan harga jual sebesar 18,88% lebih rendah dibandingkan realisasi SBT triwulan III-2016 yang sebesar 22,84%.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Kegiatan Usaha (Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Sektor		20	14			20	115		2016			
Sektor	- 1	ll l	III	IV	- 1	II.	III	IV	- 1	ll l	III	IV*
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	5,18	13,95	9,02	-1,10	-2,29	-8,82	-12,66	-8,22	-8,27	-3,64	-4,19	0,40
Pertambangan dan penggalian	-0,41	0,83	0,28	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	-0,55	-0,28	-0,55	-0,28
Industri pengolahan	0,10	0,97	-0,80	-0,62	-1,86	-0,90	-3,33	-1,24	0,41	-0,33	-0,67	-0,88
Listrik, gas dan air bersih	-0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	-0,58	0,58		0,85	0,31	0,58
Bangunan	3,27	2,45	2,45	2,45	-2,45	-2,45	-2,45	2,45	0,00	2,45	2,45	2,45
Perdagangan, hotel dan restoran	-0,76	1,41	8,08	-5,44	-15,86	-1,83	2,26	-9,45	-4,54	4,31	4,92	3,54
Pengangkutan dan komunikasi	-3,77	-2,05	-0,67	-2,08	-0,60	-3,95	2,05	-2,26	-2,06	-0,84	-1,10	0,06
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,95	2,95	3,33	3,38	2,38	3,86	1,52	2,41	1,58	2,04	0,56	-0,38
Jasa-jasa	6,30	6,45	0,15	6,15	0,00	0,00	6,15	-6,15	-0,30	-6,35	6,25	6,35
Total	11,28	27,54	22,41	3,32	-20,93	-13,52	-7,05	-21,88	-13,73	-1,78	7,97	11,84

Tabel 2. Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai (Persentase)

Sektor		2014				20	15			2016	
	- 1	ll l	III .	IV	- 1	- 11	III	IV	- 1	- 11	III
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	85,50	83,33	73,88	81,78	54,44	53,75	52,00	50,42	82,78	89,83	86,25
Pertambangan dan penggalian	40,00	81,67	98,33	93,75	80,00	56,67	81,67	65,00	66,67	70,00	66,67
Industri pengolahan	78,08	75,60	64,16	65,40	70,24	74,91	66,69	70,29	79,16	78,79	78,79
Listrik, gas, dan air bersih	52,00	100,00	50,00	70,00	94,00	88,00	54,00	94,00	0,00	79,50	76,00
Agregat seluruh sektor	63,89	85,15	71,59	77,73	74,67	68,33	63,59	69,93	76,20	79,53	76,93

Tabel 3. Perkembangan Indikator Lainnya (Persentase)

		20	1./			20	15		2016		
KETERANGAN	1	II	III	IV	- 1	II	 	IV	1	2010	III
	1	- 11	111	IV	1	- 11	III	IV	1	- 11	1111
Kondisi keuangan selama 3 bulan terakhir											
Likuiditas											
Baik	44,19	39,51	38,64	37,65	37,00	22,03	27,27	32,71	34,65	38,93	44,09
Cukup	52,33	58,02	55,68	50,59	51,00	60,17	52,07	57,94	59,84	54,20	51,97
Buruk	3,49	2,47	5,68	11,76	12,00	17,80	20,66	9,35	5,51	6,87	3,94
Saldo Bersih (%baik-%buruk)	40,70	37,04	32,95	25,88	25,00	4,24	6,61	23,36	29,13	32,06	40,16
Rentabilitas											
Baik	37,21	32,10	38,64	37,65	32,00	23,73	24,79	28,97	30,71	39,69	43,31
Cukup	60,47	60,49	55,68	48,24	55,00	56,78	54,55	61,68	61,42	53,44	52,76
Buruk	2,33	7,41	5,68	14,12	13,00	19,49	20,66	9,35	7,87	6,87	3,94
Saldo Bersih (%baik-%buruk)	34,88	24,69	32,95	23,53	19,00	4,24	4,13	19,63	22,83	32,82	39,37
Akses kredit selama 3 bulan terakhir											
Mudah	13,64	10,00	9,09	25,00	8,70	10,71	11,76	0,00	18,75	7,69	3,85
Normal	77,27	65,00	63,64	50,00	69,57	67,86	61,76	77,78	59,38	65,38	73,08
Sulit	9,09	25,00	27,27	25,00	21,74	21,43	26,47	22,22	21,88	26,92	23,08
Saldo Bersih (%Mudah-%Sulit)	4,55	-15,00	-18,18	0,00	-13,04	-10,71	-14,71	-22,22	-3,13	-19,23	-19,23

Tabel 4. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Penggunaan Tenaga Kerja (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Sektor		2014				20	15			20	16	
	- 1	ll l	III	IV	- 1	II.	III	IV	- 1	ll l	III	IV*
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	-5,28	-2,59	-1,35	5,18	-0,50	-2,29	-3,54	-8,77	-0,50	-2,29	-2,29	-2,29
Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri pengolahan	-1,31	-1,19	-0,02	0,27	-2,73	-0,71	-0,95	-0,79	-0,80	-0,68	-0,81	-0,74
Listrik, gas dan air bersih	-0,58	-0,58	0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	0,00	0,31	0,31	-0,58
Bangunan	1,64	0,00	2,45	-2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	2,45	2,45	0,00
Perdagangan, hotel dan restoran	8,01	-1,41	3,83	-2,72	-1,68	-2,65	-3,68	-5,24	0,41	-1,14	-5,82	-7,39
Pengangkutan dan komunikasi	0,46	0,46	-1,41	0,00	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87	-0,35	-1,06	-0,24	0,00
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,93	0,93	1,45	1,33	-1,40	1,32	0,00	1,11	0,00	0,00	-0,27	2,63
Jasa-jasa	0,00	-0,30	-0,15	-0,30	0,00	-0,15	-0,15	-6,45	-6,65	0,00	6,35	-0,10
Total	3,87	-4,67	5,38	0,95	-6,59	-4,48	-8,32	-20,14	-7,89	-2,41	-0,33	-8,47

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Investasi (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Sektor		20	14			20	15			20	16	
	- 1	ll l	III	IV	- 1	ll l	III	IV	- 1	ll l	III	IV*
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	2,59	0,00	3,94	5,18	5,98	-6,23	-4,88	-6,88	-4,09	-1,05	-3,64	-3,64
Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,28	0,21	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Industri pengolahan	1,06	0,16	0,85	-0,58	-0,58	-0,51	-0,35	-1,09	-0,07	-0,07	-0,07	-0,15
Listrik, gas dan air bersih	-0,58	-0,58	0,58	-0,58	-0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,85	0,31	0,31
Bangunan	1,64	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00
Perdagangan, hotel dan restoran	6,08	-3,78	2,91	5,65	1,00	3,56	2,42	-0,11	-1,03	3,42	2,25	2,53
Pengangkutan dan komunikasi	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,57	-0,14	-0,71	-0,71
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,41	1,53	1,92	1,46	1,45	1,41	2,39	3,33	1,90	2,42	2,42	2,42
Jasa-jasa	0,15	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,30	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10	0,00
Total	11,82	-0,22	12,93	11,81	6,85	-1,47	0,62	-3,71	-2,82	7,90	0,46	1,04

Tabel 6. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan harga Jual (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Sektor		20	14			20	15		2016			
Sektor	- 1	- 11	III	IV	- 1	- II	III	IV	- 1	II.	III	IV*
Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	-2,59	6,18	-1,25	9,07	4,53	-3,54	-4,78	11,46	-4,88	-3,54	6,88	8,22
Pertambangan dan penggalian	0,00	0,28	0,55	0,21	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
Industri pengolahan	1,51	1,03	1,27	1,17	0,81	0,50	0,12	0,45	1,18	0,82	1,00	0,07
Listrik, gas dan air bersih	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00	0,85	0,31	-0,27
Bangunan	1,64	2,45	2,45	4,91	-2,45	0,00	-2,45	4,91	0,00	0,00	2,45	2,45
Perdagangan, hotel dan restoran	1,21	8,61	5,46	2,49	2,15	9,50	7,11	1,79	0,19	2,02	4,78	0,88
Pengangkutan dan komunikasi	-0,98	-0,18	-0,18	0,16	1,41	-1,59	-1,59	-1,46	2,18	1,83	0,71	0,71
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	-0,57	-0,38	0,52	0,62	0,00	0,47	-0,55	0,76	0,41	-0,49	0,00	0,00
Jasa-jasa	6,45	0,00	6,60	0,00	6,60	0,30	0,00	0,00	0,00	-0,10	6,45	6,55
Total	7,24	17,99	16,01	18,62	13,35	6,23	-1,57	18,48	-0,91	1,39	22,84	18,88

Halaman ini sengaja dikosongkan





2.1. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah dan belanja-transfer daerah. Adapun Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dengan demikian, APBD menggambarkan arah dan skala prirotas serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan kebijakan penganggaran dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat.

Anggaran keuangan pemerintah daerah di Bali terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan keuangan pemerintah pusat di daerah (APBN di Bali), dengan share terbesar adalah anggaran APBD Kabupaten/ Kota. Sehubungan dengan adanya perubahan APBN dan APBD untuk tahun anggaran 2016, pagu anggaran belanja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Bali mengalami perubahan untuk tahun 2016. Sebelumnya, pagu anggaran pemerintah di Bali mencapai Rp 31,42 triliun yang terbagi atas APBD Provinsi 19%, APBD Kabupaten/Kota sebesar 54% dan APBN di Bali 27%. Pagu anggaran untuk tahun 2016 berubah menjadi Rp 32,32 triliun yang terdiri atas APBD Provinsi dengan pangsa 18,40%, APBD kabupaten/kota sebesar 55,51% dan APBN di Bali sebesar 26,08%. Sementara itu, pagu pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp 22,24 triliun terbagi atas APBD Provinsi sebesar 25,27% dan APBD Kabupaten/Kota sebesar 74,73%.

Realisasi belanja sampai dengan triwulan III 2016 mencatat porsi terbesar dikontribusikan oleh realisasi belanja APBD Kab/Kota. Realisasi belanja APBD Kab/ Kota di triwulan III 2016 mencapai Rp 9,07 triliun atau sebesar 51,47% dari total realisasi belanja Pemerintah di Provinsi Bali. Sementara itu, realisasi belanja APBN di Provinsi Bali pada triwulan III 2016 mencapai Rp 5,3 triliun atau sebesar 30,09% dari total realisasi belanja pemerintah di Provinsi Bali. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi mencapai Rp 3,25 triliun atau sebesar 18,44% dari total realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2016. Perkembangan realisasi belanja pemerintah di triwulan III 2016 menunjukkan tendensi perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama. Hak ini terindikasi oleh nilai persentase realisasi belanja yang mengalami penurunan dari sebesar 54,65% dari nilai pagu di tahun 2015, menjadi 54,53% dari pagu tahun 2016. Perlambatan realisasi belanja pemerintah tersebut, terutama disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi belanja pada tingkat kabupaten/kota, sementara persentase realisasi belanja untuk tingkat provinsi dan APBN tetap menujukkan peningkatan persentase realisasi.

Secara umum, perlambatan realisasi belanja dan pendapatan pemerintah pada triwulan III 2016, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi regional Bali triwulan III 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya. Kebijakan pemerintah pusat yang sejak September 2016 melakukan penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) ke Provinsi Bali dan 3 kabupaten/ kota di Bali, ikut menyebabkan perlambatan realisasi persentase belanja pemerintah khususnya pada tingkat kabupaten/kota di triwulan III 2016. Perlambatan realisasi persentase belanja pemerintah, juga disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi pendapatan daerah, yang disebabkan oleh perlambatan kinerja usaha sehingga mempengaruhi perlambatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Meskipun mengalami perlambatan, namun masih terdapat beberapa faktor yang dapat menahan laju perlambatan realisai belanja di triwulan laporan. antara lain berupa telah disetujuinya pagu anggaran perubahan untuk tahun 2016 baik APBN, APBD Provinsi maupun kabupaten/kota sehingga ikut mempengaruhi perkembangan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan III 2016. Selain itu, pembangunan proyek infrastruktur dalam upaya konektivitas, meningkatkan ikut mendorong peningkatan realisasi untuk belanja modal. Adanya faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan, juga merupakan faktor pendorong realisasi belanja pemerintah khususnya kegiatan sosial di triwulan laporan.

2.2. REALISASI APBD PROVINSI BALI TRIWULAN III 2016

Realisasi pendapatan pemerintah daerah menunjukkan perlambatan di periode triwulan III 2016 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja mesih menunjukkan peningkatan di periode yang sama. Serapan pendapatan triwulan III 2016 tercatat sebesar Rp 3,72 triliun atau sebesar 66,22% terhadap pagu APBD 2016. Capaian ini, lebih rendah bila

dibandingkan dengan serapan pendapatan pada triwulan III 2015 yang tercatat sebesar 77,44%. Sementara itu, realisasi belanja triwulan III 2016 tercatat sebesar Rp 3,25 triliun atau sebesar 54,65% dari pagu anggaran, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan III 2015 yang terserap sebesar 52,90%.

Secara nominal, jumlah pendapatan yang terserap pada triwulan III 2016 lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2015. Realisasi pendapatan daerah di triwulan III 2016 mencapai Rp 3,72 triliun, meningkat sebesar 4,27% dibandingkan jumlah pendapatan daerah di triwulan III 2015, yang sebesar Rp 3,57 triliun. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp 2,57 triliun, serapan pendapatan daerah di triwulan III 2016 mengalami peningkatan sebesar 44,67%.

Pemerintah Provinsi Bali tercatat mengalami surplus pada triwulan III 2016, yaitu sebesar Rp 470,48 miliar. Kondisi yang mencatatkan surplus ini, serupa dengan pola belanja pemerintah triwulan III selama kurun waktu lima tahun terakhir. Suprlus pada triwulan III 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2015 yang tercatat sebesar Rp 929,66 miliar.

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	APBD P 2015	Realisasi apbd Tw III 2015	%	APBD 2016	realisasi apbd Tw III 2016	%
PENDAPATAN DAERAH	4.608,61	3.569,11	77,44	5.619,45	3.721,41	66,22
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	2.840,93	2.184,04	76,88	3.379,08	2.165,75	64,09
PENDAPATAN TRANSFER	1.025,95	831,42	81,04	1.946,34	1.367,25	70,25
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	741,73	553,65	74,64	294,03	188,42	64,08
Belanja daerah	4.989,47	2.639,44	52,90	5.948,13	3.250,73	54,65
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.463,28	1.834,04	52,96	4.266,91	2.286,96	53,60
BELANJA LANGSUNG	1.526,18	805,40	52,77	1.681,22	963,77	57,33
SURPLUS/(DEFISIT)	- 380,86	929,66	-244,10	- 328,68	470,68	- 143,20

2.2.1. Penyerapan Pendapatan Triwulan III 2016

Total anggaran pendapatan Pemprov Bali tahun 2016 sebesar Rp 5,62 triliun atau meningkat sebesar 21,93% dibandingkan APBD-P tahun 2015. Peningkatan tertinggi, berasal dari pendapatan transfer (dana perimbangan) yang meningkat 89,71%, yang terutama didorong oleh peningkatan Dana Alokasi Khusus, dengan *share* anggaran terbesar dipergunakan untuk anggaran untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS). Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya dana alokasi khusus (DAK) untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang sejak tahun 2016 BOS SMA/SMK dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dari sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota. Peningkatan juga terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

meningkat sebesar 18,94%. Sementara itu, pagu komponen lain-lain pendapatan yang sah di APBD tahun 2016 turun sebesar 60,36%, dibanding APBD 2015.

2.2.1.1. Penyerapan Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan III 2016

Penyerapan pendapatan Provinsi Bali sampai dengan triwulan III 2016 mencapai 66,22% dari pagu APBD 2016. Capaian ini, jauh lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan pendapatan daerah di triwulan II 2015 yang mencapai 77,44%. Realisasi penyerapan pendapatan di triwulan III 2016, juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata realisasi penyerapan pendapatan di triwulan III dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang mencapai 75,83%. Rendahnya

Tabel 2.2 Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	APBD P 2015	REALISASI APBD TW III 2015	%	APBD 2016	REALISASI APBD TW III 2016	%
Pendapatan daerah	4.608,61	3.569,11	77,44	5.619,45	3.721,41	66,22
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	2.840,93	2.184,04	76,88	3.379,08	2.165,75	64,09
- Pendapatan Pajak Daerah	2.583,39	1.911,88	74,01	3.049,73	1.818,11	59,62
- Retribusi Daerah	37,39	34,82	93,11	47,23	42,89	90,81
- Hsl Pengelolaan. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	87,04	105,13	120,79	107,65	172,41	160,15
- Lain-Lain PAD yg Sah	133,11	132,20	99,32	174,46	132,34	75,86
PENDAPATAN TRANSFER	1.025,95	831,42	81,04	1.946,34	1.367,25	70,25
-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	149,85	102,79	68,60	153,66	130,09	84,66
- Dana Alokasi Umum (DAU)	831,60	693,00	83,33	850,14	631,49	74,28
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	44,50	35,62	80,06	942,54	605,67	64,26
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	741,73	553,65	74,64	294,03	188,42	64,08
- Pendapatan Hibah	4,32	2,73	63,16	4,67	3,67	78,48
- Dana Penyesuaian & otonomi khusus	525,65	394,69	75,09	5,00	5,00	100,00
- Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lain	211,77	156,24	73,78	284,36	179,75	63,21

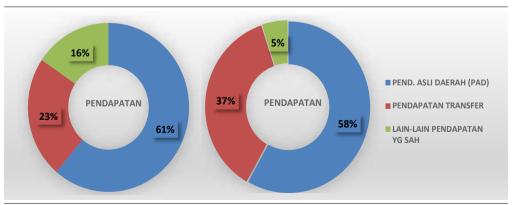
pencapaian realisasi pendapatan daerah tersebut, terutama bersumber dari penerimaan yang lebih rendah untuk seluruh komponen pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer, dan lainlain pendapatan yang sah. Secara nominal, realisasi pendapatan daerah di periode triwulan III 2016 tetap lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2015, dengan pertumbuhan sebesar 4,27%. Peningkatan pendapatan daerah secara nominal ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan dari komponen dana transfer. Sementara itu di sisi lain, untuk komponen yang lain secara nominal justru mengalami penurunan baik untuk PAD maupun lainlain pendapatan yang sah.

Penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan penyebab utama penurunan realisasi penyerapan pendapatan daerah di periode triwulan III 2016. Hal tersebut dikarenakan sumber utama pendapatan daerah untuk Provinsi Bali berasal dari komponen PAD dengan pangsa mencapai 58,20% terhadap total penerimaan daerah di triwulan III 2016. Pangsa ini lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 61,19%. Penurunan pangsa ini, terutama disebabkan oleh adanya penurunan nilai penerimaan untuk sub komponen Pendapatan Pajak Daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sub komponen PAD yang menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan yaitu sub komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan realisasi pendapatan dari laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali di perusahaan milik daerah/BUMD, yang tumbuh sebesar 63,99% (yoy) pada triwulan III 2016, yaitu menjadi sebesar Rp 172,41 miliar dari triwulan III 2015 yang sebesar Rp 105,13 miliar.

Pangsa realisasi komponen penyerapan dana pendapatan transfer terhadap realisasi total pendapatan daerah di triwulan III 2016 mencapai 36,74%, lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa di triwulan III 2015 yang sebesar 23,29%. Peningkatan ini, terutama berasal dari peningkatan alokasi DAK terkait dengan pemberian BOS kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, pangsa realisasi komponen lain-lain pendapatan yang sah terhadap realisasi penyerapan total pendapatan daerah sebesar 5,06%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 15,51%.

Berdasarkan struktur komponen PAD, realisasi pendapatan pajak daerah merupakan sub komponen PAD dengan pangsa terbesar yang mencapai 83,95% terhadap realisasi PAD. Selanjutnya diikuti oleh hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan (7,96%), dan lain-lain PAD yang sah (6,11%), serta retribusi daerah sebesar 1,98%. Pada periode triwulan III 2016, realisasi penerimaan pajak daerah cenderung lebih rendah, sehingga menyebabkan



Grafik 2.1 Share Anggaran Komponen Pendapatan

Sumber : Biro Keuangan, diolah

penurunan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan. Tercatat, realisasi pendapatan pajak daerah sebesar 59,62%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi sub komponen ini pada triwulan III 2015 dengan capaian sebesar 74,01%. Rendahnya realisasi pajak daerah ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan baru pada periode triwulan III 2016 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan jenis niaga (pick up) dan perlambatan penjualan kendaraan bermotor roda dua. Masyarakat yang masih memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan primer, cenderung untuk menunda pembelian kendaraan baru. Faktor lain penyebab perlambatan penjualan antara lain adalah persaingan transportasi wisata yang makin ketat serta moratorium penambangan pasir. Selain itu, adanya pembebasan denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku sejak 20 Juni 2016, ikut mendorong penurunan pendapatan pajak daerah. Seiring dengan kondisi tersebut, turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) sepanjang tahun 2016 menyebabkan turunnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang diterima oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, penurunan pajak daerah ini dapat sedikit ditahan oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan peningkatan retribusi daerah. Dengan demikian, penurunan realisasi pendapatan asli daerah tidak terlalu dalam. Pada triwulan III 2016, nilai nominal realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dibandingkan periode triwulan III 2015, vaitu tumbuh sebesar 63,99%.

Komponen Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), sumber pendapatan utamanya dikontribusikan oleh DAU, dengan pangsa sebesar 46,19% dari realisasi pendapatan transfer di triwulan III 2016. Posisi berikutnya adalah Dana Alokasi Khusus/DAK (pangsa 44,3%) dan Dana Bagi Hasil (pangsa 9,51%). Realisasi

penyerapan komponen pendapatan transfer pada periode triwulan III 2016 tercatat sebesar 70,25% terhadap pagu APBD 2016. Capaian ini, lebih rendah dibandingkan periode triwulan III 2015 yang sebesar 81,04%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi penerimaan komponen pendapatan transfer menunjukkan peningkatan di triwulan III 2016 dibandingkan triwulan III 2015 yang tumbuh sebesar 64,45%. Peningkatan realisasi nominal penyerapan komponen ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi nominal penyerapan DAK dari Rp 35,62 miliar di triwulan II 2015 menjadi Rp 605,67 miliar pada triwulan III 2016, atau tumbuh sebesar 1.261%. Peningkatan realisasi penyerapan DAK yang sangat signifikan ini, akibat adanya kebijakan penyesuaian pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah di kabupaten/ kota menjadi pemerintah daerah di tingkat provinsi sejak tahun 2016. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan SMA/SMK saat ini berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Adapun alokasi anggaran dana BOS untuk tahun 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 759 miliar. Peningkatan realisasi nominal penerimaan juga terjadi pada DBH yang meningkat dari sebesar Rp 102,79 miliar di triwulan III 2015 menjadi sebesar Rp 130,09 miliar pada triwulan III 2016 atau tumbuh sebesar 26,55%. Sementara itu di periode yang sama, nominal realisasi penyerapan DAU justru mengalami penurunan sebesar -8,88% bila membandingkan penerimaan sub komponen tersebut di triwulan III 2015 dengan triwulan III 2016.

Realisasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah secara nominal tercatat mengalami penurunan yang signifikan. Pada triwulan III 2016, realisasi nominal penerimaan pos ini tercatat sebesar Rp 188,42 miliar dengan persentase penyerapan sebesar 64,08% terhadap pagu anggaran 2016, menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang sebesar Rp 553,65 miliar atau dengan persentase

penyerapan sebesar 74,64% dari pagu APBD 2015. Secara nominal, realiasi penyerapan komponen ini mengalami penurunan sebesar 65,97% dibandingkan realisasi penyerapan pada triwulan yang sama tahun 2015. Penurunan ini, terutama disebabkan oleh penurunan realisasi pendapatan dana penyesuaian otonomi khusus dari Rp 394,69 miliar pada triwulan III 2015, menjadi hanya sebesar Rp 5 miliar pada triwulan III 2016.

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan III 2016

Pada tahun 2016, pagu anggaran belanja dalam APBD Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 5,95 triliun atau meningkat sebesar 19,21% dibandingkan pagu anggaran dalam APBD-P tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 4,99 triliun. Peningkatan tertinggi bersumber dari komponen belanja tidak langsung, yang meningkat sebesar 23,20% menjadi Rp 4,27 triliun, lebih tinggi dibandingkan pagu angggaran

tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 3,46 triliun. Peningkatan pagu anggaran belanja tidak langsung ini, terutama didorong oleh meningkatnya pagu anggaran seluruh sub komponen dari pembentuk belanja tidak langsung terutama pagu belanja hibah, pagu belanja bagi hasil dan pagu belanja bantuan keuangan yang meningkat signifikan secara nominal.

Sementara itu, pagu anggaran belanja langsung juga mengalami peningkatan dalam APBD 2016 dibandingkan pagu anggaran APBD-P tahun 2015. Nominal pagu anggaran belanja langsung meningkat menjadi Rp 1,68 triliun, atau meningkat sebesar 10,16% dari pagu anggaran APBD-P 2015 yang sebesar Rp 1,53 triliun. Peningkatan ini, terutama disebabkan oleh peningkatan pagu anggaran belanja modal yang mencapai 50,59%, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk tahun 2016,

Tabel 2.3 Anggaran Belanja Provinsi Bali 2015-2016

			% Perubahan 2015-2016
URAIAN	APBD-P 2015	APBD 2016	Pagu Anggaran
BELANJA DAERAH	4.989,47	5.948,13	19,21%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.463,28	4.266,91	23,20%
- Belanja Pegawai	903,50	941,09	4,16%
- Belanja Subsidi	10,00	10,00	0,00%
- Belanja Hibah	734,61	1.218,24	65,84%
- Belanja Bantuan Sosial	159,28	179,54	12,72%
- Belanja Bagi Hsl kpd Prov/Kab/Kota & Pemda	977,28	1.149,56	17,63%
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Desa dan Partai Politik	648,61	753,48	16,17%
- Belanja Tidak Terduga	30,00	15,00	-50,00%
BELANJA LANGSUNG	1.526,18	1.681,22	10,16%
- Belanja Pegawai	91,03	102,53	12,63%
- Belanja Barang dan Jasa	900,64	773,74	-14,09%
- Belanja Modal	534,52	804,95	50,59%

antara lain berupa pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan rumah sakit Indera serta rumah sakit provinsi Bali Mandara.

Selanjutnya, komposisi pagu anggaran belanja tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pola historis beberapa tahun terakhir. Pagu anggaran belanja pada APBD tahun 2016 masih didominasi oleh belanja tidak langsung dengan pangsa 71,74%, meningkat dibandingkan APBD tahun 2015 dengan pangsa 69,41%. Sementara itu, porsi pagu anggaran belanja langsung dalam APBD tahun 2016 tercatat sebesar 28,26%, menurun dibandingkan APBD tahun 2015 dengan pangsa sebesar 30,58%.

Pada periode triwulan III 2016, realisasi belanja Provinsi Bali mencapai Rp 3,25 triliun atau 54,65% dari pagu anggaran belanja tahun 2016. Pencapaian realisasi belanja ini, lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase realisasi di periode yang sama tahun 2015 yang sebesar 52,90%. Meningkatnya realisasi belanja ini, terjadi baik pada realiasi belanja langsung maupun realisasi belanja tidak langsung.

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung mengalami peningkatan pada triwulan III 2016 dibanding triwulan III 2015. Persentase realisasi pada triwulan III 2016 tercatat sebesar 53,60% dari pagu anggaran di APBD tahun 2016, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase realisasi belanja di periode triwulan III 2015 yang sebesar 52,96%. Apabila ditinjau dari komponen pembentuknya, belanja tidak langsung terutama dipergunakan untuk kegiatan belanja hibah, dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemda dan belanja bantuan keuangan, dengan pangsa masing-masing sebesar 29,31%; 19,39% dan 21,29% dari realisasi belanja belanja tidak langsung di periode triwulan III 2016.

Nominal realisasi belanja bagi hasil kepada Prov/ Kab/Kota dan Pemda mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Bali Triwulan III 2015-2016

URAIAN	APBD P 2015	REALISASI APBD TW III 2015	%	APBD 2016	REALISASI APBD TW III 2016	%
BELANJA DAERAH	4.989,47	2.639,44	52,90	5.948,13	3.250,73	54,65
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.463,28	1.834,04	52,96	4.266,91	2.286,96	53,60
- Belanja Pegawai	903,50	514,93	56,99	941,09	530,61	56,38
- Belanja Subsidi	10,00		-	10,00	2,53	25,28
- Belanja Hibah	734,61	546,22	74,36	1.218,24	670,31	55,02
- Belanja Bantuan Sosial	159,28	93,05	58,42	179,54	153,24	85,35
- Belanja Bagi Hsl kpd Prov/Kab/Kota & Pemda	977,28	385,88	39,49	1.149,56	443,46	38,58
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Desa dan Partai Politik	648,61	293,75	45,29	753,48	486,81	64,61
- Belanja Tidak Terduga	30,00	0,20	0,68	15,00	-	-
BELANJA LANGSUNG	1.526,18	805,40	52,77	1.681,22	963,77	57,33
- Belanja Pegawai	91,03	51,67	56,76	102,53	60,91	59,40
- Belanja Barang dan Jasa	900,64	494,90	54,95	773,74	491,51	63,52
- Belanja Modal	534,52	258,84	48,42	804,95	411,36	51,10
SURPLUS/(DEFISIT)	- 380,86	929,66	-244,10	- 328,68	470,68	- 143,20

Pada periode triwulan III 2016, nominal realisasi sub komponen tersebut sebesar tercatat sebesar Rp 443,46 miliar, lebih tinggi dibandingkan nominal realisasi di triwulan II 2015 yang tercatat sebesar Rp 385,88 miliar. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan target pagu anggaran, persentase realisasi sub komponen ini, mengalami penurunan, yaitu dari 39,49% di triwulan III 2015 menjadi 38,58% pada triwulan III 2016. Penurunan persentase realisasi ini, sejalan dengan menurunnya persentase realisasi PAD provinsi sehingga kemudian berdampak pada belanja bagi hasil yang diberikan kepada Kab/Kota seperti terangkum pada tabel di atas.



Sumber : Biro Keuangan, diolah

Grafik 2.2 Perkembangan Pagu Anggaran Belanja Provinsi Bali 2012-

Pada komponen belanja langsung, terjadi peningkatan realisasi penyerapan anggaran belanja di triwulan III 2016 dibandingkan triwulan II 2015. Persentase realisasi Penyerapan Belanja Langsung meningkat dari 52,77% di periode triwulan III 2015 menjadi 57,33% pada triwulan III 2016. Peningkatan persentase realisasi belanja, terjadi pada semua jenis sub komponen pembentuk belanja langsung baik belanja pegawai, belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Realisasi belanja barang dan jasa di triwulan III 2016 tercatat sebesar Rp 491,51 miliar atau telah terserap sebesar 63,52% dari pagu anggaran APBD 2016. Persentase realisasi ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 54,95%. Peningkatan juga terjadi pada realisasi sub komponen belanja pegawai yang tercatat sebesar Rp 60,91 miliar atau persentase realisasi sebesar 59,4% dari pagu anggaran 2016. Capaian ini, lebih tinggi dibandingkan persentase penyerapan anggaran belanja di periode yang sama tahun lalu yang sebesar 56,76%, atau dengan nilai nominal sebesar Rp 51,67 miliar.

Sementara itu, persentase realiasi belanja modal pada triwulan III 2016 meningkat menjadi 51,10% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp 411,36 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2015 yang persentase realisasinya sebesar 48,42% atau dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp 258.84 miliar. Peningkatan realisasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi pada awal tahun dan upaya untuk mengejar realisasi pembangunan beberapa proyek infrastruktur fisik dan pengadaan mesin-peralatan merupakan faktor pendorona meningkatnya serapan anggaran untuk keseluruhan pos belanja modal pada triwulan III 2016. Realisasi belanja modal antara lain dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase, gedung termasuk penyelesaian pembangunan rumah sakit Indera dan rumah sakit provinsi Bali Mandara.

2.3. REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI TRIWULAN III 2016

2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Triwulan III 2016

Pagu anggaran pendapatan (APBD) 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu anggaran pendapatan tahun 2015. Sejalan dengan telah dilaksanakannya penyesuaian APBD oleh beberapa kabupaten/Kota melalui penetapan APBD-P tahun 2016 oleh DPRD di beberapa kabupaten/kota, menyebabkan terjadinya peningkatan pagu anggaran pendapatan tahun 2016 untuk 9 kabupaten/kota dari Rp 15,99 triliun sebelum APBD-Perubahan 2016 ditetapkan menjadi Rp 16,62 triliun setelah

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016

Kabupaten		Anggaran 201	5 (Rp Miliar)			Anggaran 20	16 (Rp Miliar)		Perubahan Triwulan ∥ 2015-2016 (%)				
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	
Kota Denpasar	681,26	702,31	348,22	1.731,78	740,01	1.089,24	307,06	2.136,31	8,62	55,09	-11,82	23,36	
Kabupaten Tabanan	243,79	821,44	377,71	1.442,95	304,92	1.224,91	384,94	1.914,77	25,07	49,12	1,91	32,70	
Kabupaten Klungkung	89,56	557,24	192,07	838,87	121,98	714,62	231,20	1.067,80	36,19	28,24	20,37	27,29	
Kabupaten Karangasem	205,27	726,11	307,32	1.238,71	233,61	1.258,49	274,86	1.766,96	13,80	73,32	-10,56	42,65	
Kabupaten Gianyar	370,68	666,64	302,67	1.339,99	506,53	967,64	210,07	1.684,24	36,65	45,15	-30,59	25,69	
Kabupaten Badung	2.581,90	349,55	319,82	3.251,27	2.938,01	655,50	239,98	3.833,48	13,79	87,52	-24,96	17,91	
Kabupaten Buleleng	221,90	977,02	469,80	1.668,72	273,61	1.356,83	466,00	2.096,44	23,30	38,87	-0,81	25,63	
Kabupaten Bangli	82,00	573,91	170,12	826,03	92,00	772,97	165,71	1.030,68	12,20	34,68	-2,59	24,78	
Kabupaten Jemberana	72,83	570,38	193,49	836,70	100,75	751,41	238,62	1.090,78	38,33	31,74	23,33	30,37	
Total	4.549,20	5.944,60	2.681,21	13.175,01	5.311,41	8.791,61	2.518,44	16.621,46	16,75	47,89	-6,07	26,16	

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali

ditetapkannya APBD-P tersebut. Sementara itu, bila dibandingkan dengan APBD tahun 2015, maka pagu anggaran pendapatan daerah untuk seluruh APBD-P kabupaten/kota tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 26, 16% (yoy), yaitu meningkat dari Rp 13,18 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 16,62 triliun di tahun 2016. Berdasarkan jenisnya, peningkatan pagu tertinggi adalah komponen pendapatan transfer, yang meningkat sebesar 47,89% (yoy). Sementara PAD tumbuh sebesar 16,75% (yoy) dan lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan menjadi sebesar -6,07% (yoy).

Berdasarkan daerahnya, peningkatan pagu anggaran tertinggi diperoleh Kabupaten Karangasem yang

meningkat sebesar 42,65% (yoy), dengan nilai nominal pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,77 triliun. Sedangkan peningkatan pagu anggaran pendapatan terendah, tercatat di Kabupaten Badung, yang hanya tumbuh sebesar 17,91% (yoy), dengan nilai nominal sebesar Rp 3,83 triliun. Selanjutnya, daerah dengan pagu anggaran tertinggi di tahun 2016 adalah Kabupaten Badung dengan nilai nominal pagu anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp 3,83 triliun, atau dengan pangsa mencapai 23,06% dari total pagu anggaran seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2016. Sementara itu, daerah dengan pagu anggaran pendapatan terendah adalah Kabupaten Bangli dengan nominal sebesar Rp 1,03

Tabel 2.6 Realisasi Nominal Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016

Kabupaten	Realisasi Triwulan III 2015 (Rp Miliar)			Re	alisasi Triwulan	III 2016 (Rp Milia	ar)	Perubahan Triwulan III 2015-2016 (%)				
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	522,51	506,16	191,70	1.220,37	517,08	619,85	82,30	1.219,23	-1,04	22,46	-57,07	-0,09
Kabupaten Tabanan	207,65	674,86	275,02	1.157,53	224,59	885,14	177,12	1.286,85	8,16	31,16	-35,60	11,17
Kabupaten Klungkung	80,82	424,27	132,47	637,56	101,32	563,83	84,74	749,89	25,37	32,89	-36,03	17,62
Kabupaten Karangasem	108,94	417,73	95,09	621,76	109,01	591,53	67,46	768,00	0,07	41,60	-29,05	23,52
Kabupaten Gianyar	273,17	557,40	224,58	1.055,15	382,47	711,40	130,01	1.223,88	40,01	27,63	-42,11	15,99
Kabupaten Badung	2.008,11	257,39	130,65	2.396,15	2.313,86	301,33	219,52	2.834,71	15,23	17,07	68,02	18,30
Kabupaten Buleleng	196,20	818,82	294,94	1.309,96	186,59	917,94	181,68	1.286,21	-4,90	12,11	-38,40	-1,81
Kabupaten Bangli	45,73	371,56	86,87	504,16	35,00	514,10	73,71	622,81	-23,46	38,36	-15,15	23,53
Kabupaten Jemberana	69,19	461,34	110,13	640,66	86,36	523,68	136,04	746,08	24,82	13,51	23,53	16,45
Total	3.512,32	4.489,53	1.541,45	9.543,30	3.956,28	5.628,80	1.152,58	10.737,66	12,64	25,38	-25,23	12,52

triliun. Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya, Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten dengan pagu anggaran pendapatan terendah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk 9 kabupaten/kota pada triwulan III 2016 menunjukkan peningkatan secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Adapun daerah dengan realisasi nominal pendapatan tertinggi dicatat oleh Kabupaten Badung, yang tercatat sebesar Rp 2,83 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 18,30% (yoy). Peningkatan ini, terutama didorong oleh tingginya realisasi PAD yang tumbuh mencapai 15,23%% (yoy) di triwulan III 2016. Peningkatan pendapatan transfer Kota Denpasar yang tumbuh sebesar 68,02% (yoy), juga ikut mendorong peningkatan realisasi pendapatan daerah di triwulan III 2016. Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tertinggi di triwulan III 2016 adalah Kabupaten Jembrana, yang tumbuh sebesar 23,53% (yoy). Kebijakan pemerintah pusat yang menunda realisasi transfer DAU untuk 3 kabupaten/ kota di Provinsi Bali mulai periode September 2016, ikut mempengaruhi terbatasnya realisasi pendapatan daerah untuk ketiga kabupaten tersebut.

Selanjutnya, daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah terendah pada periode laporan adalah Kota Denpasar, yang justru mengalami penurunan pendapatan yang tercatat sebesar -0,09 % (yoy), dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp 1,21 triliun. Pencapaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1,22 triliun. Rendahnya pertumbuhan realisasi nominal pendapatan di Kota Denpasar, terutama disebabkan penurunan realisasi pendapatan asli daerah sebesar -1,04% (yoy) dan juga penurunan lain-lain pendapatan yang sah sebesar -57,07% (yoy) di triwulan III 2016 yang antara lain disebabkan kebijakan penundaan transfer DAU oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Bangli mencatat realisasi nominal pendapatan daerah terendah pada triwulan III 2016, mengulang capaian di triwulan III 2015. Meskipun demikian, pertumbuhan realisasi Kabupaten Bangli di triwulan III-2016 menjadi yang tertinggi terutama didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan dana transfer.

Selanjutnya, realisasi penyerapan pendapatan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan III 2016 menunjukkan penurunan, yaitu dari 72,43% di triwulan III 2015 menjadi 64,60% pada periode triwulan III 2016. Jika memperhatikan realisasi penyerapan pendapatan setiap kabupaten/kota di

Tabel 2.7 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016

Kabupaten		Realisasi Triwula	an III 2015 (%)		Realisasi Triwulan III 2016 (%)				
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	
Kota Denpasar	76,70	72,07	55,05	70,47	69,87	56,91	26,80	57,07	
Kabupaten Tabanan	85,17	82,16	72,81	80,22	73,66	72,26	46,01	67,21	
Kabupaten Klungkung	90,24	76,14	68,97	76,00	83,06	78,90	36,65	70,23	
Kabupaten Karangasem	53,07	57,53	30,94	50,19	46,66	47,00	24,55	43,46	
Kabupaten Gianyar	73,69	83,61	74,20	78,74	75,51	73,52	61,89	72,67	
Kabupaten Badung	77,78	73,63	40,85	73,70	78,76	45,97	91,48	73,95	
Kabupaten Buleleng	88,42	83,81	62,78	78,50	68,20	67,65	38,99	61,35	
Kabupaten Bangli	55,77	64,74	51,06	61,03	38,04	66,51	44,48	60,43	
Kabupaten Jemberana	95,00	80,88	56,92	76,57	85,72	69,69	57,01	68,40	
Total	77,21	75,52	57,49	72,43	74,49	64,02	45,77	64,60	

triwulan III 2016, hanya kabupaten Badung yang menunjukkan peningkatan persentase realisasi penyerapan pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan 8 daerah kabupaten/kota lainnya menunjukkan penurunan persentase realisasi penyerapan pendapatan.

Daerah dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi di triwulan III 2016 adalah Kabupaten Klungkung, dengan persentase mencapai 70,23%. Tingginya realisasi Kabupaten Klungkung didorong oleh tingginya realisasi PAD yang mencapai 83,06% dan pendapatan transfer yang mencapai 78,90%. Sedangkan daerah dengan persentase realisasi penyerapan pendapatan terendah di triwulan III 2016 adalah Kabupaten Karangasem, dengan persentase 43,46% yang disebabkan menurunnya realisasi penyerapan pendapatan dari seluruh komponen pendapatan daerah di periode laporan dibandingkan triwulan II 2015.

2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Triwulan III 2016

Pagu anggaran belanja APBD Kabupaten/Kota pada periode tahun 2016 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Sehubungan dengan adanya perubahan APBD tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota (APBD-P tahun 2016), mendorong peningkatan jumlah pagu

anggaran belanja dari sebelumnya sebesar Rp 17,36 triliun menjadi Rp 17,94 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah pagu anggaran belanja kab/kota untuk tahun 2016 tercatat meningkat sebesar 28,23 % (yoy) atau tercatat sebesar Rp 17,94 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 13,99 triliun. Peningkatan pagu angggaran belanja terjadi baik untuk belanja tidak langsung (18,14%) dan belanja tidak langsung (46,26%). Seluruh kab/kota di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan pagu anggaran di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, peningkatan pagu anggaran belanja tertinggi diperoleh Kabupaten Karangasem dengan persentase mencapai 41,29%, dengan nilai nominal anggaran belanja sebesar Rp 1,81 triliun, sedangkan peningkatan anggaran belanja terendah adalah Kabupaten Badung, dengan peningkatan sebesar 15,12%, dengan nilai nominal Rp 4,06 triliun, sekaligus merupakan kabupaten dengan anggaran belanja tertinggi di tahun 2016. Sementara daerah dengan nominal pagu anggaran terendah di tahun 2016 adalah Kabupaten Klungkung dengan nilai nominal sebesar Rp 1,13 triliun.

Realisasi belanja Kabupaten/kota pada triwulan III 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan triwulan III 2015. Realisasi belanja

Anggaran Perubahan 2016 (Rp Miliar) Kabupaten Anggaran 2015 (Rp Miliar) Perubahan 2015-2016 (%) Belanja Tidak Belanja Total Belanja Belanja Tidak Belanja Total Belanja Belanja Tidak Belanja Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Belanja Kota Denpasar 1.022,86 744,10 1.766,96 1.304,22 1.000,61 2.304,83 27,51 34,47 30,44 Kabupaten Tabanan 1.066,05 401,62 1.467,67 1.321,29 739,60 2.060,89 23,94 84,16 40,42 Kabupaten Klungkung 597,79 314,92 912,71 692,78 524,18 1.216,96 15,89 66,45 33,34 Kabupaten Karangasem 908.20 373.90 1.282,10 1.226,78 584.66 1.811,44 35,08 56,37 41,29 Kabupaten Gianyar 1.054,26 390,86 1.445,12 1.238,46 735,56 1.974,02 17,47 88,19 36,60 Kabupaten Badung 1.901,57 1.625,64 3.527,20 2.157,15 1.903,41 4.060,56 13,44 17,09 15,12 Kabupaten Buleleng 1.176,32 608,88 1.785,20 1.323,63 850.19 2.173,82 12,52 39,63 21,77 Kabupaten Bangli 755,52 710,50 220,40 930,90 380,47 1.136,00 6,34 72,63 22,03 Kabupaten Jemberana 535,45 339,65 581,16 1.204,72 83,59 37,67 875,10 623,56 5.019,96 7.342,24 8.973,00 13.992,96 10.601,00 17.943,24 18,14 46,26 28,23

Tabel 2.8 Pagu Anggaran Belanja 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016

di triwulan III 2016 tercatat sebesar Rp 9,07 triliun, meningkat sebesar 14,28% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 7,94 triliun.

Daerah dengan pertumbuhan tertinggi untuk realisasi belanja di triwulan III 2016 adalah Kabupaten Tabanan yang meningkat mencapai 28,11%, yaitu dari Rp 879,65 miliar di triwulan III 2015 menjadi Rp 1,13 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan belanja langsung (68,84%) dan belanja tidak langsung (17,84%). Peningkatan tersebut, didorong oleh upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur berupa pembangunan/perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan gedung. Upaya yang ditempuh antara lain melalui

percepatan kegiatan pengadaan dan lelang proyek sehingga mendorong peningkatan realiasasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan di triwulan III 2016. Sementara itu, pertumbuhan realisasi belanja terendah dialami oleh Kabupaten Bangli, yang mengalami pertumbuhan negatif -0,89%(yoy) dengan nilai nominal realisasi belanja tercatat sebesar Rp 532,28 miliar di triwulan III 2016.

Persentase serapan realisasi belanja Pemda kab/kota pada triwulan III 2016 menunjukkan peningkatan bila dibanding triwulan III 2015. Kebijakan Pemerintah daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal mendorong peningkatan realisasi belanja di triwulan III 2016. Secara umum, persentase penyerapan anggaran belanja kab/kota di triwulan III 2016 telah

Tabel 2.9 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016

Kabupaten	Realisasi Triwulan III 2015 (Rp Miliar)			Realisasi Triwulan III 2016 (Rp Miliar)			Perubahan Triwulan III 2015-2016 (%)		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
Kota Denpasar	642,31	369,38	1.011,69	665,46	396,87	1.062,33	3,60	7,44	5,01
Kabupaten Tabanan	702,60	177,05	879,65	827,94	298,94	1.126,88	17,84	68,84	28,11
Kabupaten Klungkung	364,97	115,38	480,35	410,40	186,95	597,35	12,45	62,03	24,36
Kabupaten Karangasem	611,54	169,93	781,47	660,57	216,23	876,80	8,02	27,25	12,20
Kabupaten Gianyar	657,26	186,48	843,74	734,55	299,39	1.033,94	11,76	60,55	22,54
Kabupaten Badung	1.090,01	679,64	1.769,65	1.228,01	765,27	1.993,28	12,66	12,60	12,64
Kabupaten Buleleng	768,69	308,25	1.076,94	884,42	323,56	1.207,98	15,06	4,97	12,17
Kabupaten Bangli	463,59	73,45	537,04	470,95	61,33	532,28	1,59	-16,50	-0,89
Kabupaten Jemberana	373,24	183,48	556,72	392,79	246,83	639,62	5,24	34,53	14,89
Total	5.674,21	2.263,04	7.937,25	6.275,09	2.795,37	9.070,46	10,59	23,52	14,28

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali

Tabel 2.10 Realisasi Persentase Belanja Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan III 2015-2016

Kabupaten	Realisasi	Triwulan III 20)15 (%)	Realisasi Triwulan III 2016 (%)			
	Belanja Tidak	Belanja	Total Belanja	Belanja Tidak	Belanja	Total Belanja	
	Langsung	Langsung		Langsung	Langsung		
Kota Denpasar	62,80	49,64	57,26	51,02	39,66	46,09	
Kabupaten Tabanan	65,91	44,08	59,94	62,66	40,42	54,68	
Kabupaten Klungkung	61,05	36,64	52,63	59,24	35,67	49,09	
Kabupaten Karangasem	67,34	45,45	60,95	53,85	36,98	48,40	
Kabupaten Gianyar	62,34	47,71	58,39	59,31	40,70	52,38	
Kabupaten Badung	57,32	41,81	50,17	56,93	40,21	49,09	
Kabupaten Buleleng	65,35	50,63	60,33	66,82	38,06	55,57	
Kabupaten Bangli	65,25	33,33	57,69	62,33	16,12	46,86	
Kabupaten Jemberana	69,71	54,02	63,62	67,59	39,58	53,09	
Total	63,24	45,08	56,72	59,19	38,07	50,55	

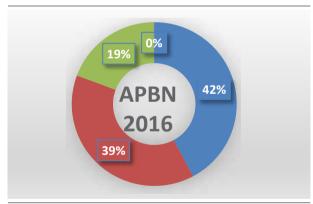
mencapai 50,55%, lebih rendah bila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 56,72%. Adapun daerah dengan persentase penyerapan realisasi belanja tertinggi adalah Kabupaten Buleleng, dengan persentase realisasi belanja mencapai 55,57% dari total anggaran belanja tahun 2016. Sementara Kota Denpasar merupakan Kabupaten dengan persentase penyerapan realisasi belanja terendah yang baru mencapai 46,09% di triwulan III 2016.

2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI TRIWULAN III 2016

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali Triwulan III 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Bali pada tahun 2016 mengalami penurunan sejalan dengan upaya pemerintah yang melakukan penghematan anggaran. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menekan defisit anggaran pada tahun 2016, seiring dengan potensi tidak tercapainya target penerimaan khususnya dari penerimaan pajak dan cukai. Tercatat, terjadi penurunan anggaran APBN sebesar -10,15% (yoy), dari sebelumnya pada tahun 2015 sebesar Rp 9,38 triliun menjadi Rp 8,43 triliun pada triwulan III 2016. Terdapat perubahan pagu anggaran untuk tahun 2016 setelah disetujuinya perubahan pada APBN-P tahun 2016, sehingga terjadi penurunan pagu anggaran dari sebelumnya sebesar Rp 8,51 triliun.

Anggaran tertinggi dialokasikan untuk belanja pegawai untuk kementerian/ lembaga vertikal yang beroperasi di Provinsi Bali. Adapun porsi anggaran terbesar APBN di Provinsi Bali di tahun 2016 adalah untuk belanja pegawai dengan pangsa mencapai 42% dengan nominal sebesar Rp 3,55 triliun, lebih tinggi dibandingkan porsi di tahun 2015 yang mencapai 38% dengan nilai nominal sebesar Rp 3,52 triliun. Belanja barang memiliki pangsa 39% dengan nilai nominal mencapai Rp 3,24 triliun, porsinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 35% namun dengan nilai nominal yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 3,29 triliun. Sedangkan belanja modal di tahun 2016 memiliki pangsa sebesar 19% dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp 1,62 triliun, lebih rendah baik secara porsi maupun nominal dibandingkan tahun 2015 dengan pangsa sebesar 25% dan nominal tercatat Rp 2,38 triliun. Penurunan pangsa dan nominal juga terjadi pada anggaran bantuan sosial dari sebelumnya memiliki porsi sebesar 2% dan nominal tercatat Rp 188, 42 miliar, turun pada tahun 2016 dengan porsi 0,08% dan nominal sebesar Rp 7.08 miliar.



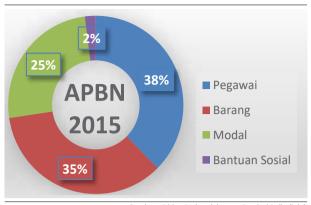
Sumber : Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, diolah

Grafik 2.3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016

Tabel 2.11 Realisasi APBN Provinsi Bali Triwulan III 2015-2016

Jenis Belanja		2015		2016				
	Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi Tw 3 (Rp Miliar)	%	Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi Tw 3 (Rp Miliar)	%		
Pegawai	3.523,45	2.581,73	73,27	3.556,63	2.802,48	78,80		
Barang	3.292,26	1.406,39	42,72	3.244,11	1.825,87	56,28		
Modal	2.379,38	789,29	33,17	1.623,13	669,43	41,24		
Bantuan Sosial	188,42	148,37	78,74	7,08	5,12	72,37		
Total	9.383,51	4.925,78	52,49	8.430,95	5.302,90	62,90		

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi bali



Sumber : Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, diolah Grafik 2.4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015

Realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Bali pada triwulan III 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan III 2015. Peningkatan realisasi ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi yang signifikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran melalui pelaksanaan pengadaan dan lelang khususnya untuk belanja modal dan barang ikut menentukan percepatan realisasi belanja di triwulan III 2016. Pada triwulan III 2016, realisasi belanja APBN mencapai 62,90%, lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 52,49%.

Secara nominal, serapan realisasi belanja APBN di triwulan III 2016 tercatat sebesar Rp 5,30 triliun, meningkat sebesar 7,66% (yoy) dibandingkan triwulan III 2015 yang sebesar Rp 4,93 triliun. Peningkatan serapan realisasi belanja yang signifikan secara nominal tersebut, terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan realisasi belanja barang yang tumbuh sebesar 29,83% (yoy). Kebijakan untuk mendorong akselerasi belanja pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, telah memberikan akselerasi pada pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan III 2016 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Realisasi nominal serapan komponen belanja pegawai di triwulan III 2016 tercatat sebesar Rp 2,80 triliun atau dengan realisasi mencapai 78,80% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan nominal realisasi triwulan III 2015 yang tercatat sebesar Rp 2,58 triliun atau dengan persentase realisasi serapan mencapai 73,27%. Tingginya realisasi belanja pegawai di triwulan III 2016, sebagai dampak akumulasi oleh adanya kebijakan pembayaran THR (gaji ke-14) di minggu ke- 4 Juni 2016 yang baru dilakukan pada tahun 2016.

Selanjutnya, realisasi belanja barang juga menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2016 dengan serapan realisasi dari pagu mencapai 56,28% dengan nominal tercatat sebesar Rp 1,83 triliun atau meningkat sebesar 29,83% (yoy), dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 1,41 triliun atau dengan persentase serapan realisasi belanja sebesar 42,72% dari total anggaran. Dalam upaya memberikan stimulus pada perekonomian dan upaya untuk mendorong peningkatan konektivitas antar daerah, pemerintah juga mendorong akselerasi belanja modal. Sementara itu, realisasi belanja modal APBN, yang pada periode triwulan laporan menunjukkan penurunan -15,19% (yoy), yaitu dari Rp 789,29 triliun menjadi Rp 669,43 triliun. Meskipun demikian, realisasi serapan belanja modal di triwulan laporan menunjukkan peningkatan dari 33,17% ditriwulan III 2015 menjadi 41,24% di triwulan III 2016. Sementara belanja bantuan sosial mengalami penurunan pada triwulan III 2016 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, baik dari sisi nominal maupun persentase realisasi.

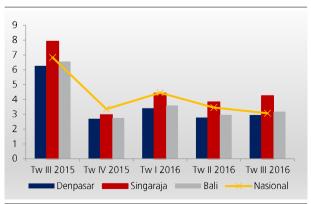




3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

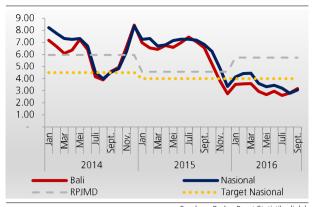
Setelah pada triwulan II 2016 inflasi Bali mengalami penurunan, pada triwulan III 2016 inflasi Bali kembali mengalami peningkatan. Namun demikian, pencapaian inflasi hingga triwulan III 2016 masih berada pada rentang proyeksi Bank Indonesia pada keseluruhan Tahun 2016 dan masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi sebesar 4%±1%. Pada triwulan III 2016 inflasi Bali tercatat sebesar 3,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,07% (yoy). Peningkatan pada triwulan III disebabkan karena adanya seiring dengan meningkatnya permintaan karena adanya perayaan Galungan, Kuningan, dan Idul Adha di bulan September 2016.

Berdasarkan kota sampel inflasi di Bali, inflasi tertinggi kembali terjadi di Kota Singaraja yang tercatat sebesar 4,25% (yoy) pada triwulan III 2016. Realisasi inflasi di Singaraja berada di atas inflasi Kota Denpasar yang tercatat sebesar 2,95% (yoy). Berbagai upaya yang telah dilakukan seperti pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga, penggalian informasi dengan *stakeholders/* instansi terkait, serta melalui forum koordinasi TPID dalam mengambil langkah – langkah antisipatif pengendalian inflasi telah menunjukkan hasil nyata dengan terkendalinya inflasi Bali yang rendah dan stabil.

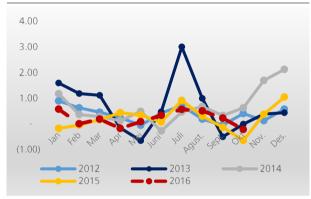


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)

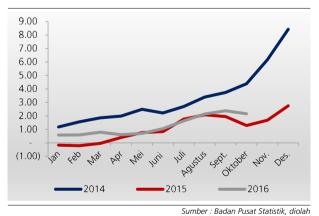


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.3 Inflasi Bulanan Bali (%mtm)



Grafik 3.4 Inflasi Kumulatif Bali (%ytd)

Secara bulanan, pola inflasi Bali searah selama 3 tahun terakhir. Inflasi Bali pada September 2016 tercatat sebesar 0,23% (mtm), dengan rincian kota sampel inflasi Denpasar sebesar 0,26% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,07% (mtm). Akumulasi inflasi (Januari –

September 2016) Kota Denpasar tercatat sebesar 2,15% (ytd), angka ini tercatat lebih tinggi dari periode yang sama pada Tahun 2015 yang tercatat sebesar 1,90% (ytd). Sementara akumulasi inflasi (Januari – September 2016) di Singaraja tercatat sebesar 3,44% (ytd), juga tercatat lebih tinggi dari periode yang sama pada Tahun 2015 sebesar 2,17% (ytd).

Berdasarkan realisasi hingga November 2016 serta tracking pergerakan harga baik melalui Survei Pemantauan Harga (SPH) dan PIHPS Provinsi Bali "SiGapura, pada triwulan IV 2016 inflasi Bali diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan permintaan jelang peak season liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Harga pada komoditas angkutan udara diperkirakan meningkat, adanya penyesuaian tarif listrik yang berlanjut, serta ekspektasi masyarakat seiring dengan gejolak harga dan ketersediaan stok juga mendorong peningkatan inflasi pada triwulan berjalan.

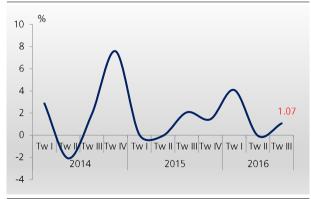
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Kondisi inflasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2016 (bulan Januari - Oktober 2016) tercatat cukup terkendali. Berdasarkan komposisi kelompok penyumbang inflasi, laju inflasi terutama disebabkan oleh komoditas yang tergolong dalam kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Peningkatan indeks harga pada triwulan III 2016 disebabkan seiring dengan masuknya Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Idul Adha. Meskipun demikian, tekanan inflasi masih dapat diredam berkat peran TPID Provinsi Bali dan seluruh TPID Kabupaten/Kota. Dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, inflasi Bali diperkirakan dapat mendukung tercapainya pencapaian target inflasi nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi sebesar 4%±1%.

a) Kelompok Bahan Makanan

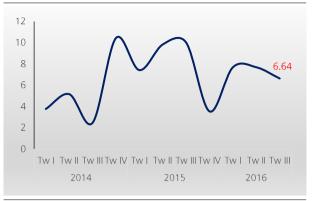
Inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan III 2016 tercatat sebesar 6,64% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,70% (yoy). Pencapaian ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama pada 2015 yaitu sebesar 10,02% (yoy). Secara triwulanan, laju inflasi kelompok ini tercatat sebesar 1,07% (gtg), mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,05% (qtq). Namun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya vang tercatat sebesar 2,06% (qtq). Laju inflasi kelompok bahan makanan didorong oleh peningkatan permintaan pada Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Idul Adha. Disamping itu, kondisi pasokan komoditas bumbu-bumbuan juga terganggu terutama pada komoditas cabai merah karena perubahan cuaca sehingga hasil produksi menurun.

Sementara itu, perkembangan inflasi kelompok bahan makanan sampai dengan November 2016 menunjukkan tren peningkatan terutama untuk komoditas bawang merah, cabai rawit merah, dan daging ayam. Tendensi peningkatan bawang merah dan cabai rawit merah seiring dengan kondisi cuaca musim penghujan sehingga menyebabkan busuk. Tendensi peningkatan harga juga didorong oleh peningkatan permintaan menjelang *peak season* pariwisata (libur sekolah, natal, dan tahun baru).

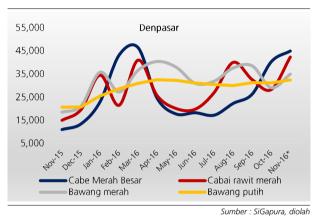


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

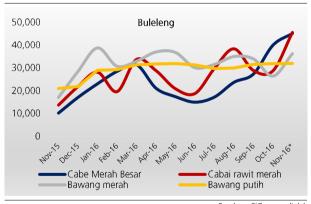
Grafik 3.5 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali



Grafik 3.7 Pergerakan Harga Komoditas dalam Bahan Makanan (Denpasar)

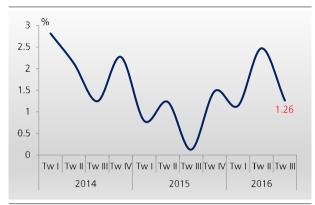


Sumber : SiGapura, diolah Grafik 3.8 Pergerakan Harga Komoditas dalam Bahan Makanan

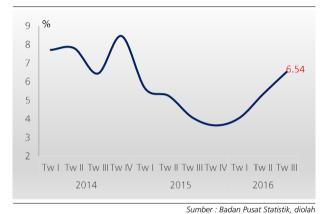
(Singaraja)

b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau pada triwulan III 2016 tercatat kembali meningkat menjadi sebesar 6,54% (yoy), lebih



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.9 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali



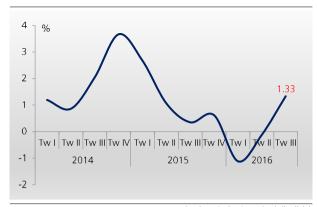
Grafik 3.10 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman,
Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,35% (yoy). Inflasi kelompok ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,09% (yoy). Kendati demikian, secara triwulanan kelompok ini mengalami penurunan indeks harga dari sebesar 2,47% (qtq) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 1,26% (qtq) pada triwulan III 2016. Sama halnya dengan kelompok bahan makanan, peningkatan harga komoditas pada kelompok ini terutama disebabkan adanya peningkatan permintaan jelang perayaan Hari Keagamaan Galungan, Kuningan, dan Idul Adha.

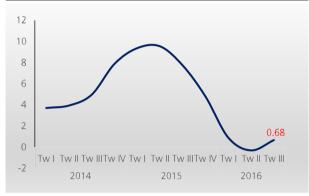
Perkembangan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sampai dengan November 2016 menunjukkan tren peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan menjelang peak season pariwisata (libur sekolah, natal, dan tahun baru). Peningkatan tersebut juga didukung oleh optimism tingkat pendapatan konsumen pada triwulan IV 2016 (hasil survei konsumen Bank Indonesia serta Indeks Tendensi Konsumen Bank Indonesia)

c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan gas baik secara triwulanan maupun tahunan kembali mengalami peningkatan dari periode pelaporan sebelumnya. Secara triwulanan kelompok ini mengalami peningkatan dari yang semula deflasi sebesar -0,12% (qtq) pada triwulan II 2016 menjadi inflasi sebesar 1,33% (qtq) pada triwulan laporan. Sementara secara tahunan, inflasi kelompok ini meningkat dari deflasi sebesar -0,29% (yoy) menjadi 0,68% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan pada kelompok ini didorong oleh adanya penyesuaian tarif listrik pada bulan Juli, September, dan Oktober 2016 pada ke-12 golongan tarif.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.11 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.12 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Tabel 3.1 Penyesuaian Tarif Listrik Periode Juli – Oktober 2016

			BIAYA PEMAKAINAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVarh)								
NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	NAIK	TURUN	NAIK	NAIK					
			JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER					
1	R-1/TR	1,300 VA	1,412.66	1,410.12	1,457.72	1,459.74					
2	R-1/TR	2,200 VA	1,412.66	1,410.12	1,457.72	1,459.74					
3	R-2/TR	3,500 VA s.d 5,500 VA	1,412.66	1,410.12	1,457.72	1,459.74					
4	R-3/TR	6,600 VA ke atas	1,412.66	1,410.12	1,457.72	1,459.74					
5	B-2/TR	6,600 VA s.d 200 kVA	1,412.66	1,410.12	1,457.72	1,459.74					
			Blok WBP = K x 1,009,65	Blok WBP = K x 1.007,83	Blok WBP = K x 1.031,20	Blok WBP = K x 1.032,62					
6	B-3/TR	di atas 200 kVA	Blok LWBP = 1.009,65	Blok LWBP = 1.007,83	Blok LWBP = 1.031,20	Blok LWBP = 1.032,62					
			kVarh = 1,086,62	kVarh = 1.084,66	kVarh = 1.109,81	kVarh = 1.111,34					
			Blok WBP = K x 1,009,65	Blok WBP = K x 1.007,83	Blok WBP = K x 1.031,20	Blok WBP = K x 1.032,62					
7	I-3/TM	di atas 200 kVA	Blok LWBP = 1.009,65	Blok LWBP = 1.007,83	Blok LWBP = 1.031,20	Blok LWBP = 1.032,62					
			kVarh = 1.086,62	kVarh = 1.084,66	kVarh = 1.109,81	kVarh = 1.111,34					
			Blok WBP dan Blok	Blok WBP dan Blok	Blok WBP dan Blok	Blok WBP dan Blok					
8	I-4/TT	30,000 kVA ke atas	LWBP = 972,76	LWBP = 971,01	LWBP = 993,42	LWBP = 994,80					
			kVarh = 972,76	kVarh = 971,01	kVarh = 993,42	kVarh = 994,80					
9	P-1/TR	6,600 VA s.d 200 kVA	1,412.66	1,410.12	1,457.72	1,459.74					
			Blok WBP = K x 1.009,65	Blok WBP = K x 1.007,83	Blok WBP = K x 1.031,20	Blok WBP = K x 1.032,62					
10	P-2/TM	di atas 200 kVA	Blok LWBP = 1.009,65	Blok LWBP = 1.007,83	Blok LWBP = 1.031,20	Blok LWBP = 1.032,62					
			kVarh = 1.086,62	kVarh = 1.084,66	kVarh = 1.109,81	kVarh = 1.111,34					
11	P-3/TR		1,412.66	1,410.12	1,457.72	1,459.74					
12	L/TR.TM.TT		1,596.65	1,593.78	1,628.24	1,630.49					

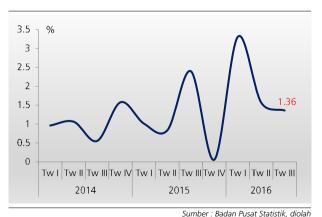
Sumber: PT. PLN (Persero) diolah

Perkembangan inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sampai dengan November 2016 menunjukkan tren peningkatan seiring dengan penyesuaian tariff listrik serta pembaharuan harga kontrak rumah di akhir tahun yang akan mendorong inflasi di kelompok tersebut pada triwulan IV 2016.

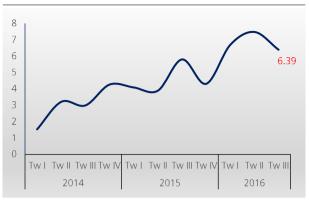
d) Kelompok Sandang

Berbeda dengan kelompok perumahan, air, listrik dan gas, inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami sedikit penurunan secara tahunan maupun triwulanan. Meski demikian. inflasi kelompok ini masih tercatat relatif tinggi. Secara triwulanan kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 6,39% (yoy) atau sebesar 1,57% (gtg) pada triwulan III 2016, meningkat dari sebesar 7,48% (yoy) atau sebesar 1,57% (qtq) pada triwulan II 2016. Peningkatan kelompok ini juga didorong oleh adanya peningkatan permintaan harga komoditas domestik seperti emas perhiasan di kedua kota sampel inflasi yang turut mendorong inflasi pada kelompok ini.

Perkembangan inflasi kelompok sandang pada triwulan IV 2016 diperkirakan mengalami peningkatan sesuai dengan pola musimannnya seiring dengan peningkatan permintaan menjelang *peak season* pariwisata (libur sekolah, natal, dan tahun baru). Ekpektasi peningkatan pendapatan konsumen pada triwulan tersebut (Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia dan Indeks Tendensi Konsumen BPS Provinsi



Grafik 3.13 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali



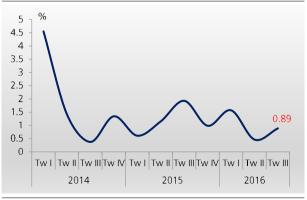
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.14 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali

Bali) berpotensi mendorong tendensi peningkatan harga kelompok bahan pangan.

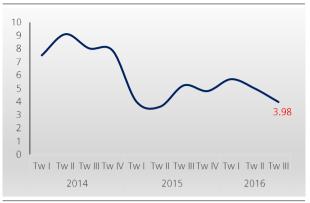
e) Kelompok Kesehatan

Tekanan inflasi kelompok kesehatan mengalami peningkatan secara triwulanan namun tercatat mengalami penurunan secara tahunan. Pada triwulan III 2016 kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 3,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,00% Sementara triwulanan (yoy). secara tercatat mengalami inflasi sebesar 0,89% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 0,46% (qtq). Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan indeks harga pada sub kelompok obat-obatan dan perawatan jasmani dan kosmetika.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

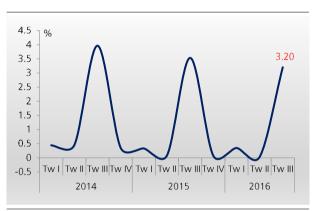
Grafik 3.15 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.16 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

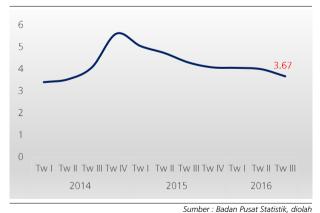
f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Sesuai dengan pola historisnya, inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga tercatat mengalami



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.17 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan

Olah Raga di Prov. Bali



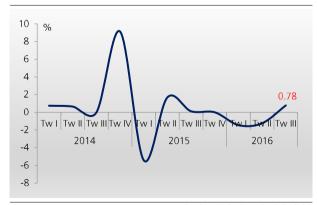
Grafik 3.18 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

peningkatan cukup tajam secara triwulanan dari sebesar 0,03% (qtq) menjadi sebesar 3,20% (qtq) pada triwulan III 2016. Namun demikian secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sedikit menurun dibandingkan dengab triwulan II 2016. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 3,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,99% (yoy).

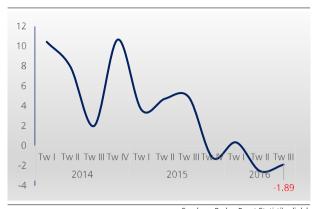
Perkembangan inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga pada triwulan IV 2016 diperkirakan mengalami peningkatan terutama rekreasi sesuai dengan pola musimannnya seiring dengan peningkatan permintaan menjelang *peak season* pariwisata (libur sekolah, natal, dan tahun baru).

g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan baik secara tahunan maupun triwulanan tercatat deflasi dan menahan laju inflasi secara umum meskipun mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kelompok ini tercatat inflasi sebesar 0,78% (qtq) setelah mengalami deflasi sebesar -1,23% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi kelompok ini meningkat meski masih tercatat deflasi dari sebesar -2,53% (yoy) menjadi deflasi sebesar -1,89% (yoy) pada triwulan laporan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.19 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

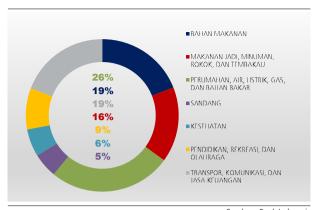


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.20 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

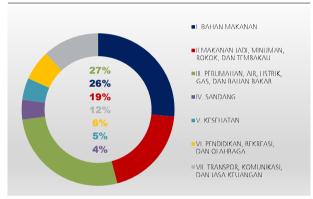
Sejalan dengan perkembangan inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga, kelompok transport, komunikasi, dan keuangan pada triwulan IV 2016 diperkirakan mengalami peningkatan sesuai dengan pola musimannnya seiring dengan peningkatan permintaan menjelang *peak season* pariwisata (libur sekolah, natal, dan tahun baru) yang mendorong jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

3.2.2. Inflasi Menurut Kota

Kota sampel inflasi Provinsi Bali adalah Kota Denpasar dan Singaraja. Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.



Sumber: Bank Indonesia
Grafik 3.21 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran
Kota Denpasar



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.22 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

a) Kota Denpasar

Laju inflasi Kota Denpasar pada triwulan III 2016 mengalami sedikit peningkatan dari 2,78% (yoy) menjadi sebesar 2,95% (yoy) pada triwulan II 2016.

Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

						2016					
No.	Kelompok Barang	Triwulan I				Triwulan II			Triwulan III		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	
1	Bahan Makanan	0.10	3.77	6.93	1.02	3.90	7.15	-0.21	4.77	6.18	
2	Makanan Jadi	0.40	1.25	4.33	0.33	3.81	5.58	0.87	5.18	6.82	
3	Perumahan, Air, LGA	-0.29	-1.32	1.07	0.13	-1.48	-0.35	0.22	-0.28	0.54	
4	Sandang	0.30	3.51	6.24	0.07	4.88	7.33	1.00	6.43	6.27	
5	Kesehatan	0.68	1.61	6.24	0.02	2.10	5.40	0.14	2.65	3.70	
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.18	0.21	4.13	-0.06	0.24	4.07	-0.25	2.91	3.01	
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.37	0.34	0.54	-2.34	-2.19	0.37	-1.37	- 1.36	
	UMUM	0.06	0.62	3.41	0.39	0.92	2.78	0.26	2.15	2.95	

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Namun demikian, pencapaian inflasi in masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada Tahun 2015 yang tercatat sebesar 6,27% (yoy). Di Denpasar, pada September 2016 inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks terutama pada kelompok pengeluaran kelompok sandang sebesar 1,00% (mtm); kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,87% (mtm); kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37% (mtm); dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,22% (mtm). Secara tahunan, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kelompok bahan makanan masih tercatat relatif tinggi meski menurun dari triwulan II 2016 sebesar 7,15% (yoy) menjadi sebesar 6,18% (yoy) pada triwulan III 2016. Hal ini disebabkan karena melandainya tekanan inflasi pasca lebaran namun tetap tinggi karena perayaan Hari Besar Keagamaan di bulan September 2016. Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang triwulan III tahun 2016, maka 3 komoditas yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi Kota Denpasar dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Denpasar Triwulan III 2016

No	Komoditas	Kontribusi (%,mtm)	(%, mtm)			
Juli						
1	Angkutan Udara	0,17	19,38			
2	Tarif listrik	0,08	2,03			
3	Kangkung	0,07	32,89			
Agustus						
1	Sekolah Menengah Atas	0,10	7,74			
2	Pasir	0,09	37,78			
3	Bawang Merah	0,08	12,07			
Septer	mber					
1	Tarif listrik	0,06	1,49			
2	Tarif Pulsa Ponsel	0,06	2,52			
3	Rokok Putih	0,05	5,06			

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Adanya tekanan inflasi yang bersumber dari angkutan udara di Kota Denpasar dipicu oleh meningkatnya permintaan seiring dengan periode libur panjang/peak season di Bali mengingat lokasi Bali yang merupakan tujuan utama wisata di Indonesia. Sementara untuk peningkatan indeks harga komoditas tariff listrik dikarenakan adanya penyesuaian tarif listrik oleh PT. PLN (Persero) pada bulan Juli, September, dan Oktober 2016. Namun demikian, tekanan inflasi pada triwulan III 2016 tertahan oleh beberapa komoditas dengan rincian di bawah ini:

Tabel 3.4 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Denpasar Triwulan III 2016

No	Komoditas	Kontribusi (%,mtm)	(%, mtm)				
Juli							
1	Bawang Merah	-0,02	-3,50				
2	Cabai Merah	-0,02	-7,40				
3	Jengki	-0,01	-5,95				
Agus	Agustus						
1	Angkutan Antar Kota	-0,05	-22,31				
2	Tarif Pulsa Ponsel	-0,05	-2,23				
3	Wortel	-0,05	-45,40				
Septe	ember						
1	Ikan Gembung/Kembung	-0,03	-16,01				
2	Cabai Rawit	-0,03	-14,64				
3	Telur Ayam Ras	-0,02	-3,41				

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

b) Kota Singaraja

Sama halnya dengan Kota Denpasar, inflasi Kota Singaraja tercatat mengalami peningkatan dari 3,832% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi 4,25% (yoy). Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi didorong oleh kelompok bahan makanan (8,97%, yoy), kelompok sandang (7,01%, yoy), dan kelompok pendidikan, rekreasi, & olahraga (6,96%, yoy). Sementara itu, penurunan terdalam terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi yang tercatat deflasi sebesar -4,58% (yoy). Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang Juli – September 2016,

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

Ma	Kalamaal Banaa	2016									
No.	Kelompok Barang		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	
1	Bahan Makanan	2.60	5.56	11.56	-0.03	4.63	10.46	-0.29	6.91	8.97	
2	Makanan Jadi	0.12	0.66	2.76	0.29	2.93	4.17	-0.33	3.96	5.14	
3	Perumahan, Air, LGA	-0.12	-0.24	0.10	0.05	-0.14	0.00	0.16	1.67	1.38	
4	Sandang	1.26	2.41	8.95	1.48	5.12	8.22	0.33	6.01	7.01	
5	Kesehatan	0.42	0.77	3.04	0.08	1.10	3.00	0.22	3.99	5.41	
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.37	0.74	3.64	0.00	0.74	3.59	2.67	6.71	6.96	
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.89	0.37	0.00	-4.32	-4.23	0.05	-4.58	-4.56	
	UMUM	0.81	1.56	4.42	0.13	1.65	3.83	0.07	3.44	4.25	

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.6 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Singaraja Triwulan III 2016

No	Komoditas	Kontribusi (%,mtm)	(%, mtm)			
Juli						
1	Biaya Tempat Tinggal	0,28	1,54			
2	Kontrak Rumah	0,22	10,18			
3	Cabai Rawit	0,15	12,86			
Agustus						
1	Cabai Rawit	0,23	12,36			
2	Sekolah Menengah Pertama	0,15	25,44			
3	Bawang Merah	0,11	9,40			
Septer	mber					
1	Sekolah Menengah Atas	0,10	7,27			
2	Akademi/Perguruan Tinggi	0,06	6,04			
3	Kacang Panjang	0,06	18,81			

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

komoditas yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi Singaraja terutama dari komoditas pada kelompok .

Sementara komoditas yang menahan laju inflasi pada triwulan III 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Singaraja Triwulan III 2016

No	Komoditas	Kontribusi (%,mtm)	(%, mtm)			
Juli						
1	Minyak Goreng	-0,05	-4,11			
2	Bawang Merah	-0,01	-1,50			
3	Bawang Putih	-0,01	-2,77			
Agustus						
1	Apel	-0,07	-11,41			
2	Angkutan Antar Kota	-0,06	-15,68			
3	Tarif Pulsa Ponsel	-0,03	-2,00			
Septem	ber					
1	Cabai Rawit	-0,13	-11,58			
2	Gula Pasir	-0,06	-11,62			
3	Bawang Merah	-0,02	-1,71			

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

3.3. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan penyebabnya, inflasi pada triwulan III tahun 2016 didorong oleh terutama didorong kelompok *volatile food*, dan *core inflation*, sementara kelompok *administered prices* tercatat cukup stabil.

Kelompok *volatile food* tercatat menjadi penyebab inflasi yang didorong karena adanya peningkatan permintaan seiring masuknya Hari Besar Keagamaan Galungan, Kuningan, dan Idul Adha. Inflasi kelompok *volatile food* di Denpasar tercatat sebesar 6,17% (yoy)

sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,15% (yoy). Sama halnya dengan Denpasar, kelompok *volatile food* Kota Singaraja juga tercatat menurun dari sebesar 10,45% (yoy) pada triwulan II menjadi sebesar 8,96% (yoy) pada triwulan III 2016.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.23 Disagregasi inflasi tahunan Denpasar



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.24 Disagregasi inflasi tahunan Singaraja

a) Volatile food

Pergerakan inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan III 2016 di Denpasar dan Singaraja masing-masing tercatat sebesar 6,17% (yoy) dan 8,97% (yoy). Pencapaian inflasi kelompok ini tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,15% (yoy) dan 10,45% (yoy) di Singaraja. Tekanan inflasi pada kelompok ini masih disebabkan adanya peningkatan permintaan jelang perayaan Hari Raya Keagamaan Galungan, Lebaran, dan Idul Adha meskipun tidak.

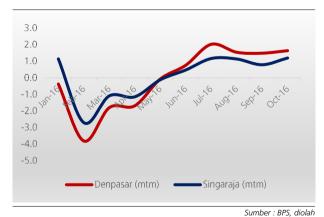
Peningkatan indeks harga terjadi pada komoditas bumbu- bumbuan dan buah-buahan. Kenaikan harga buah-buahan masih disebabkan karena produksi lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Bali. Selain itu berdasarkan informasi kontributor data PIHPS Provinsi Bali SiGapura kenaikan harga disebabkan harga komoditas cabai terjadi karena datangnya musim hujan yang membuat gagal panen dan tidak tahan lama (busuk). Kondisi ini telah terjadi pada Juli 2016 dan berlanjut hingga periode pelaporan. Sementara untuk komoditas buah-buahan mengalami kenaikan harga karena meningkatnya jumlah permintaan mengingat adanya momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi Umat Hindu. Selain itu, adanya penyakit busuk pada batang juga mendorong kenaikan harga pada kelompok ini. Untuk memenuhi kebutuhan maka komoditas pisang didatangkan dari luar Bali seperti Lombok dan Sumbawa. Laju inflasi kelompok volatile food tertahan seiring dengan masuknya musim panen untuk komoditas utama bawang merah dan stabilnya harga beras.

Terjaganya inflasi Bali sampai dengan Oktober 2015 tidak lepas dari upaya pengendalian harga pangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia secara sinergis melalui forum TPID. Berbagai langkah pengendalian telah dilakukan dalam merespon gejolak harga diantaranya melalui pasar murah, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui press release, talkshow dan melalui media informasi lainnya. Pasar murah yang merupakan kebijakan dari pemerintah guna mengantisipasi kenaikan harga turut melibatkan pelaku usaha lainnya untuk berkontribusi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga.

Perkembangan inflasi volatile food sampai dengan November 2016 menunjukkan tendensi peningkatan seiring dengan kondisi cuaca musim penghujan yang mengganggu produksi tanaman hortikultura seperti bawang dan cabai yang menjadi mudah busuk. Selain itu peningkatan permintaan sesuai dengan pola musimannya juga mendorong tendensi peningkatan harga kelompok *volatile food*.

b) Administered Prices

Kelompok administered prices pada triwulan 2016 mengalami inflasi di Denpasar yang tercatat sebesar 0,09% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar -2,01% (yoy). Sementara Singaraja masih tercatat deflasi sebesar -0,39% (yoy) meski tidak sedalam triwulan sebelumnya yang sebesar -0,71% (yoy). Hal ini merupakan akibat dari meningkatnya indeks harga pada subkelompok Tembakau dan Minuman Beralkohol serta subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air. Kenaikan laju inflasi pada triwulan ini terutama disumbang oleh komoditas rokok serta tarif listrik yang mengalami kenaikan pada bulan September dan Oktober 2016. Penyesuaian tarif listrik tegangan rendah (TR) tertinggi terjadi pada bulan September yang tercatat sebesar Rp1.457/kWh atau naik Rp47 dari Agustus 2016 yang sebesar Rp1.410/ kWh. Dengan adanya penyesuaian tarif listrik, secara bulanan komoditas ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,64% (mtm) di Denpasar dan 1,20% (mtm) di Singaraja.



Grafik 3.25 Pergerakan Inflasi Bulanan Komoditas Tarif Listrik

Perkembangan inflasi kelompok administered prices sampai dengan November 2016 menunjukkan tendensi peningkatan didorong oleh tendensi peningkatan harga tiket pesawat menjelang akhir tahun seiring dengan masuknya periode *peak season* pariwisata (libur sekolah, natal, dan tahun baru) yang mendorong kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

c) Core inflation

Secara fundamental tekanan inflasi kelompok inti tercatat cukup stabil. Laju inflasi kelompok inti cukup stabil didukung dengan ekspektasi inflasi yang relatif terkendali. Hal ini ditunjukkan dari Survei Konsumen (SK) KPwBI Provinsi Bali. Pada Juni 2016, kelompok inflasi inti tercatat relatif stabil di tengah kenaikan harga gula pasir secara nasional yang tercatat sebesar 0,09% (mtm), menurun dibandingkan Mei 2016 yang tercatat sebesar 0,14% (mtm).

Komoditas yang tercatat menyumbang inflasi tertinggi pada kelompok inti adalah pasir, biaya tempat tinggal, dan sewa rumah. Berdasarkan informasi pihak (*Real Estate* Indonesia) REI, kenaikan harga sewa rumah dimungkinkan terjadi seiring dengan adanya kenaikan harga material pembangunan yang juga terus naik. Hal ini dikarenakan berhentinya galian c di Karangasem sehingga mengurangi pasokan kebutuhan pasir. Selain itu, untuk memproses IMB saat ini harus mendapat ijin dari banjar dan desa. Untuk memperoleh ijin dimaksud, terdapat tarif yang harus dibayarkan oleh pengembang yang terkadang tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari biaya pembuatan IMB itu sendiri.

Ekspektasi harga di tingkat konsumen tercatat terjaga baik untuk periode 3 bulan maupun 6 bulan ke depan. Pada periode Agustus-Oktober 2016 indeks SK tercatat terus melandai dari 170 pada Agustus 2016 menjadi 155,5 pada Oktober 2016. TPID Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali sangat berperan dalam menjaga ekspektasi inflasi, melalui pelaksanaan Pasar Murah dan penyampaian *press release*. Selain itu, ditinjau dari ekspektasi inflasi masyarakat Bali berdasarkan Survei Penjualan Eceran yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, hingga Oktober 2016

ekspektasi dari sisi pedagang cukup terjaga seiring dengan kembali menguatnya nilai tukar rupiah pada awal September 2016. Penguatan rupiah didukung oleh sentimen positif perekonomian domestik, seiring dengan kondisi stabilitas makro ekonomi yang terjaga dan implementasi UU Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Sementara, dari sisi eksternal, penguatan rupiah terkait dengan meredanya risiko global, sejalan dengan meredanya sentimen terkait timing kenaikan FFR pada September 2016.

Perkembangan inflasi *core* sampai dengan November 2016 menunjukkan tendensi pergerakan yang stabil seiring dengan membaiknya ekspektasi konsumen. Meskipun demikian, masih terdapat resiko kenaikan inflasi *core* seiring dengan potensi kenaikan FFR pada Desember 2016.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus berupaya dan melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi di Tahun 2016 berbagai kegiatan optimalisasi forum rapat untuk merumuskan rekomendasi dan langkah antisipatif bagi pemerintah dan stakeholder terkait, TPID juga telah melakukan upaya dan tindakan nyata seperti pelaksanaan Pemantauan Kondisi Lapangan, Pengelolaan Ekspektasi Masyarakat, Pengembangan dan Pemanfaatan PIHPS Provinsi Bali dengan sebutan 'SiGapura (Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis)'. Selain pengelolaan ekspekstasi masyarakat melalui press release, talkshow, dan media komunikasi lainnya, TPID Provinsi Bali juga secara rutin melakukan pemantauan harga pasar, operasi pasar dan pasar murah, serta penguatan Koordinasi Kebijakan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kegiatan pasar murah, pemantauan lapangan, dan operasi pasar telah dilakukan dengan lebih terkoordinir dan menjangkau daerah-daerah yang difokuskan pada Kota IHK dan daerah tertinggal di Pulau Bali.



Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 3.26 Nilai Penjualan Eceran

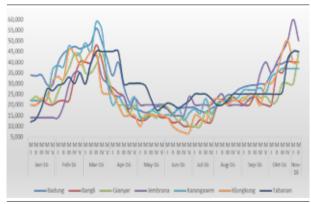


Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 3.27 Ekspektasi Konsumen

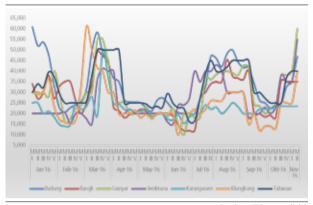
3.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI

Pemantauan pergerakan harga di kota-kota nonsampel inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga Komoditas Pangan Strategis (SiGapura) Provinsi Bali yang terus dilakukan pengkinian data secara berkala.



Sumber : SiGapura, diolah

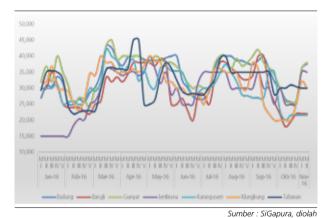
Grafik 3.28 Pergerakan Harga Konsumen Cabai Merah Besar



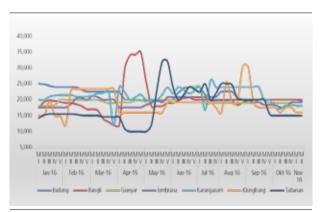
Sumber : SiGapura, diolah

Grafik 3.29 Pergerakan Harga Konsumen Cabai Rawit Merah

Hasil pemantauan harga terhadap beberapa komoditas penyumbang utama inflasi Bali sepanjang triwulan III 2016, harga pada komoditas bumbubumbuan cenderung meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan peningkatan harga cukup tinggi pada komoditas cabai merah besar. Sementara komoditas bawang merah mulai



Grafik 3.30 Pergerakan Harga Konsumen Bawang Merah



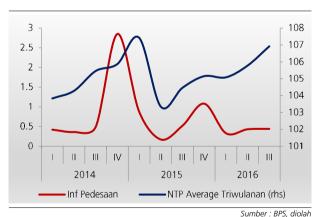
Sumber : SiGapura, diolah

Grafik 3.31 Pergerakan Harga Konsumen Telur Ayam Ras

mengalami koreksi harga pada triwulan III 2016 seiring dengan masuknya musim panen. Kondisi ini juga terjadi pada kedua kota sampel inflasi di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja).

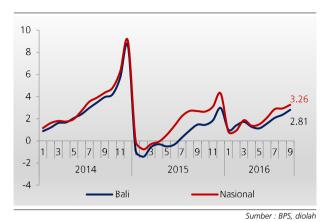
3.5. INFLASI PERDESAAN

Sama halnya dengan IHK sampel inflasi, IHK Perdesaan terdiri dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Tekanan inflasi perdesaan Bali yang dihitung dengan menggunakan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di sepanjang triwulan III 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi perdesaan Bali pada triwulan III 2016 secara kumulatif (Januari – September 2016) tercatat sebesar 2,81% (ytd), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi perdesaan nasional yang tercatat sebesar 3,26% (ytd). Selain itu, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dari sebesar 105,78 pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 106,92 pada triwulan III 2016.



Sumber : BPS, diola

Grafik 3.32 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)



Grafik 3.33 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)



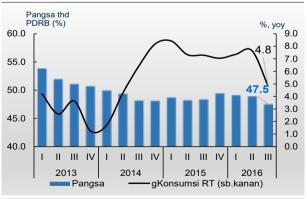


4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

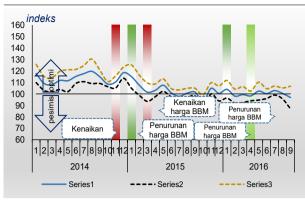
Dalam sistem keuangan, rumah tangga merupakan obyek yang memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai penyedia dana dan sebagai penerima pendanaan dari institusi keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga adalah tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit oleh rumah tangga.

Pada triwulan III 2016, kinerja konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan turut menjadi penyebab perlambatan perekonomian Bali. Konsumsi rumah tangga tercatat mengalami perlambatan dari sebesar 7,65% (yoy) pada triwulan Il 2016 menjadi sebesar 4,84% (yoy) pada triwulan III 2016 dengan pangsa konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian sebesar 47,5%. Perlambatan tersebut seiring dengan tendensi kenaikan harga (didorong oleh faktor musiman dan penyesuaian tarif listrik pada bulan Juli, September, dan Oktober 2016 pada ke-12 golongan tarif). Kondisi tersebut membatasi kemampuan belanja masyarakat serta tidak adanya lagi sumber pendapatan tambahan bagi PNS seperti pada triwulan sebelumnya (gaji ke 13 dan 14).



Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

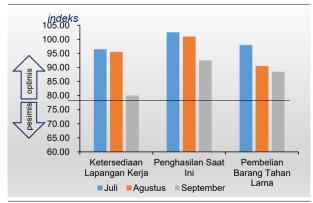
Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali diolah

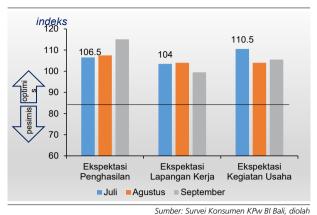
Grafik 4.2 Indeks Keyakinan Konsumen Rumah Tangga Bali

Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan penurunan optimisme rumah tangga dalam melakukan kegiatan konsumsi. Kondisi ini terlihat dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 100,06, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2016 yang mencapai 100,31. Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam rentang waktu April-Juni 2016, terjadi pelemahan keyakinan konsumen seiring dengan pelemahan pendapatan masyarakat. Namun demikian, rumah tangga masih melihat ada potensi perbaikan ekonomi di masa yang akan datang sebagaimana tergambar pada indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang mengalami peningkatan pada akhir triwulan III 2016 tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah seperti



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.3 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini



Grafik 4.4 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi 6 Bulan Mendatang

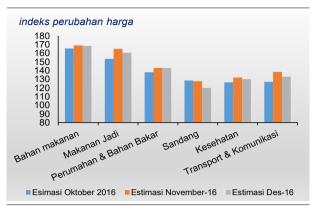
kecenderungan penurunan BI 7 days reverse repo rate serta kebijakan relaksasi penurunan LTV yang diikuti oleh tendensi penurunan suku bunga perbankan, merupakan faktor-faktor pendorong peningkatan ekpektasi konsumen.

Rumah tangga di Bali pada triwulan III 2016 masih memiliki optimisme yang tinggi terhadap kondisi penghasilan mereka. Begitu pula untuk 6 bulan ke depan, rumah tangga masih melihat adanya peningkatan pendapatan/penghasilan. Meskipun demikian, terjadi pelemahan indeks karena rumah tangga berubah menjadi pesimis terhadap ketersediaan lapangan kerja. Masih adanya ketidakpastian seiring dengan sikap wait and see investor menyebabkan ekspektasi rumah tangga akan ketersediaan jumlah lapangan kerja semakin berkurang.



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah





Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.6 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi

Di sisi lain, kondisi tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama dan akan terjadi peningkatan kembali lapangan kerja di semester I 2017. Hal tersebut tercermin dari ekspektasi rumah tangga terhadap lapangan pekerjaan 6 bulan yang masih optimis didukung dengan optimisme peningkatan kegiatan usaha.

Sumber kerentanan lainnya adalah terkait dengan adanya potensi tekanan harga. Pada triwulan IV 2016 mendatang, rumah tangga akan dihadapkan pada masa menghadapi *peak season* pariwisata (natal dan tahun baru). Sesuai dengan pola musimannya, tekanan harga bahan pangan dan makanan jadi pada periode tersebut relatif tinggi.

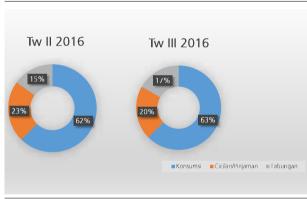
4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Pada triwulan III 2016, pengunaan keuangan rumah tangga masih didominasi oleh konsumsi sebesar 63% (Grafik 3.7). Kondisi tersebut sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2016 yang turut menjadi faktor penyebab perlambatan perekonomian secara keseluruhan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh tendensi kenaikan harga dan tidak adanya pendapatan tambahan seperti pada periode triwulan sebelumnya. Selain itu, pengeluaran pendidikan yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya berdampak pada berkurangnya anggaran masyarakat untuk

Tabel 4.1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Donggungan	Pengeluaran/bln								
Penggunaan	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	>Rp5 jt	Rata-rata			
Konsumsi	68.8%	64.6%	64.8%	62.2%	62.7%	64.6%			
Cicilan/Pinjaman	14.2%	19.4%	19.9%	24.3%	20.6%	19.7%			
Tabungan	17.0%	16.0%	15.3%	13.4%	16.7%	15.7%			
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

konsumsi masyarakat pada triwulan III 2016. Kondisi tersebut menyebabkan keyakinan rumah tangga untuk melakukan konsumsi serta dapat menutupi pembayaran cicilan hutang berkurang dari 23% pada triwulan II 2016, menjadi sebesar 19,7%. Sementara itu dana yang disisihkan untuk menabung relatif masih cukup stabil pada kisaran 15%.



Sumber: Survei Konsumen KPw Bl Bali, diolah

Grafik 4.7 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali

Apabila dilihat berdasarkan pendapatannya, tingkat pengeluaran konsumsi yang tertinggi dilakukan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah (Rp1-2 juta). Semakin tinggi tingkat pendapatannya semakin kecil tingkat pengeluarannya untuk konsumsi.

Sementara itu jika dilihat dari perilaku berutang, maka terdapat tendensi peningkatan risiko dari sisi kredit karena secara agregat terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki *debt service ratio* lebih dari 30% pendapatannya (DSR>30%). Pada triwulan III 2016, jumlah rumah tangga dengan DSR>30%

naik sebesar 27,8%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Institusi keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan DSR>30% memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab kredit yang kurang lancar. Peningkatan potensi risiko tersebut terjadi pada kelompok pendapatan terendah (Rp1 juta- Rp2 juta). Pada kelompok pendapatan tersebut, peningkatan rumah tangga dengan DSR>30% mencapai 83,9%.

Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

	Triwulan III 2016						
	D	ebt Service	Ratio (DSF	₹)			
Pengeluaran/ bln	0-10%	10%-20%	20%-30%	%0E<			
Rp1 - 2 jt	2.2%	4.0%	1.2%	1.8%			
Rp2,1 - 3 jt	11.4%	-7.9%	26.9%	5.7%			
Rp3,1 - 4 jt	10.4%	-8.2%	25.5%	4.7%			
Rp4,1 - 5 jt	3.4%	-2.4%	9.6%	3.5%			
>Rp5 jt	2.9%	-2.2%	5.2%	2.2%			
Total	30.3%	-16.6%	68.4%	18.0%			
	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)*						
Pengeluaran/ bln	0-10%	10%-20%	20%-30%	%0E<			
Rp1 - 2 jt	-27.5%	20.4%	-22.0%	83.9%			
Rp2,1 - 3 jt	-25.8%	-184.2%	311.6%	13.7%			
Rp3,1 - 4 jt	-2.8%	-189.4%	182.4%	56.1%			
Rp4,1 - 5 jt	-25.7%	-187.8%	217.7%	31.7%			
			407 40/	0.00/			
>Rp5 jt	143.7%	-752.2%	107.4%	-6.8%			

TMP = Tidak Memiliki Pinjaman/Cicilan

^{*} Perubahan triwulan III 2016 dibandingkan triwulan II 2016 Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Tabel 4.3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

	Triwulan III 2016							
			Tabungan					
Pengeluaran/ bln	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TBM			
Rp1 - 2 jt	4.5%	2.2%	0.8%	0.2%	1.5%			
Rp2,1 - 3 jt	17.1%	-17.1%	27.7%	1.8%	6.6%			
Rp3,1 - 4 jt	15.8%	-15.8%	27.7%	1.2%	3.5%			
Rp4,1 - 5 jt	6.4%	-6.4%	11.9%	1.2%	1.0%			
>Rp5 jt	4.2%	-4.2%	7.1%	0.3%	0.7%			
Total	48.1%	-41.3%	75.3%	4.7%	13.3%			

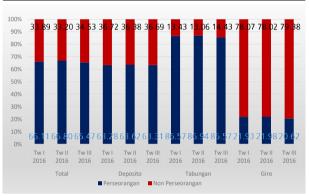
		Perubahan Tabungan*							
Pengeluaran/ bln	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	TBM				
Rp1 - 2 jt	50.5%	160.9%	0.3%	-66.6%	-59.0%				
Rp2,1 - 3 jt	26.3%	-338.0%	401.7%	-15.1%	-26.2%				
Rp3,1 - 4 jt	2.5%	-385.8%	652.5%	-36.1%	-47.3%				
Rp4,1 - 5 jt	23.0%	-393.3%	1087.3%	-12.2%	-68.3%				
>Rp5 jt	93.0%	-309.0%	1304.7%	0.3%	-55.4%				
Total	22.1%	-332.9%	551.5%	-24.1%	-44.6%				

TMB = Tidak Menabung

Di sisi lain, terjadi penurunan risiko pada perilaku menabung. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah rumah tangga yang tidak dapat menabung hingga 44,6%, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rumah tangga yang paling besar penurunannya dalam hal tidak dapat menabung berada pada kelompok pendapatan Rp 4,1 juta s.d Rp 5 juta. Rumah tangga yang tidak dapat menabung berisiko pada stabilitas sistem keuangan karena dapat mengganggu likuiditas institusi keuangan dari sisi sumber dana. Meskipun demikian, terdapat penambahan rumah tangga yang menabung di atas 30% pendapatannya (tabungan>30%) yaitu untuk kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi (>Rp 5 juta).

4.1.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan Di Perbankan

Sektor rumah tangga masih mendominasi dana pihak ketiga (DPK) yang berada di perbankan Bali. Hal ini tercermin dari pangsa DPK perseorangan pada triwulan III 2016 yang mencapai 65,47% dari keseluruhan DPK di Bali (Grafik 3.8). Sejalan dengan perlambatan kinerja konsumsi RT, pertumbuhan DPK perseorangan di perbankan turut mengalami perlambatan dari sebesar 4,64% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 2,61% (yoy) pada triwulan III 2016.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Komposisi DPK Bali



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali

^{*} Perubahan triwulan III 2016 dibandingkan triwulan II 2016 Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Preferensi rumah tangga dalam melakukan masih didominasi penempatan pada fasilitas tabungan dan deposito. Pada triwulan III 2016, porsi deposito perseorangan pada perbankan Bali mencapai 34,40% dibandingkan dengan total keseluruhan DPK perseorangan. Sementara itu porsi DPK dalam bentuk tabungan juga masih dominan dilakukan oleh nasabah perseorangan dengan porsi mencapai 59,92%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang sebesar 59,65%. Kondisi ini seiring dengan tendensi penurunan kinerja konsumsi masyarakat sehingga cenderung membutuhkan dana yang mudah dicairkan. Sementara itu, giro memiliki share sebesar 5,92% pada triwulan III 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang sebesar 5,94%.

Dari sisi pertumbuhannya, DPK perseorangan pada tabungan mengalami perlambatan dari sebesar 8,97% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar

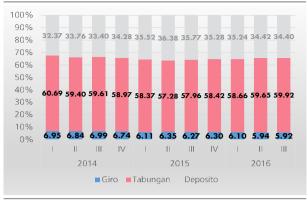
5,81% (yoy) pada triwulan III 2016. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan DPK perseorangan pada fasilitas deposito masih menunjukkan perlambatan, sama halnya dengan pertumbuhan DPK perseorangan fasilitas giro yang mengalami kontraksi pada triwulan III 2016 yang tercatat sebesar -3,13% (yoy).

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, pada triwulan III 2016 terdapat penambahan jumlah rekening sebesar 6,93% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penambahan rekening tersebut terjadi pada kategori simpanan bernilai kecil (<Rp10 juta) dan simpanan bernilai besar (>Rp20 M) dan rekening simpanan bernilai sedang (>100JT - 500JT dan >5M - 10M). Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kota/ kabupaten yang ada di Bali. Adapun penambahan rekening simpanan terbesar terjadi di Kab. Gianyar (bertambah sebesar 7,6%) dan penambahan rekening terendah terjadi di Kabupaten Karangasem (bertambah sebesar 5,5%).

Tabel 4.4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali

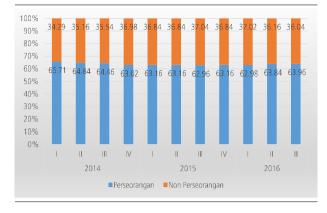
DAERAH		Jumlah	<10 JT	>10 JT - 100 JT	>100JT - 500JT	>500JT - 1 M	>1 M - 2 M	>2 M - 5M	>5M - 10M	>10M -15M	>15M - 20M	>20M
Kah Bulalana	Rek	303,850	264,658	33,654	4,810	243	106	42	5	0	2	3
Kab. Buleleng	Δ%	6.75	9.52	-11.20	10.98	11.47	-7.83	5.00	25.00		100.00	0.00
Kab. Jembrana	Rek	151,575	133,966	16,047	1,512	23	15	9	3	0	0	0
Nab. Jembrana	Δ%	5.74	8.43	-12.92	15.24	-32.35	36.36	28.57	0.00			
	Rek	182,189	151,699	27,304	3,037	80	49	20	0	0	0	0
Kab. Tabanan	Δ%	6.30	9.69	-9.56	10.12	6.67	11.36	20.00				
Kab Daduus	Rek	425,224	343,192	66,108	11,498	1,322	602	315	55	14	5	3
Kab. Badung	Δ%	5.46	7.79	-4.90	4.33	-1.78	0.84	-3.08	7.84		-16.67	0.00
K 1 0	Rek	184,430	153,340	27,055	3,770	134	86	43	0	1	0	0
Kab. Gianyar	Δ%	7.60	11.25	-9.64	13.21	-20.24	-2.27	38.71				
	Rek	80,587	67,663	11,429	1,367	76	45	6	0	1	0	0
Kab. Klungkung	Δ%	6.62	8.25	-2.53	11.05	16.92	2.27	40.00				
Kab. Bangli	Rek	72,756	61,424	10,387	914	13	17	1	0	0	0	0
Nab. Barigii	Δ%	7.57	12.24	-13.77	13.54	-70.45	21.43					
Kab.Karangasem	Rek	136,500	114,823	19,493	2,107	29	39	9	0	0	0	0
Nab.Nararigaserri	Δ%	5.50	5.91	1.63	24.09	-30.95	8.33	12.50				
	Rek	1,896,548	1,583,759	238,089	58,560	5,031	2,438	1,569	141	24	10	11
Kota Denpasar	Δ%	7.48	9.88	-6.85	11.04	0.44	10.14	5.02	- 17.54		0.00	- 15.38
5561 (1110) 5411	Rek	3,433,659	2,874,524	449,566	87,575	6,951	3,397	2,014	204	40	17	17
PROVINSI BALI	Δ%	6.93	9.44	-7.22	10.54	-0.71	-7.24	3.81	11.30		0.00	10.53

Rek = Jumlah rekening; D % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan III 2016 dibandingkan dengan triwulan II 2016 Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

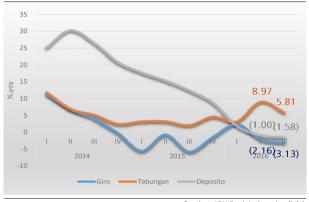


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Komposisi DPK Perseorangan di Bali

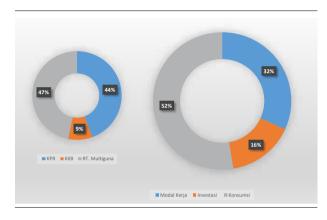


Grafik 4.12 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan



Grafik 4.13 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan

4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Dari sisi kredit perbankan, rumah tangga di Bali mendominasi penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari pangsa kredit untuk perseorangan yang mencapai 63,96% dibandingkan keseluruhan kredit yang direalisasikan untuk daerah ini pada triwulan III 2016 (Grafik 3.12). Sebagian besar kredit perseorangan tersebut digunakan untuk konsumsi yaitu sebesar 52%, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk modal kerja dan investasi sebesar masing-masing 32% dan 16%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali

Kredit konsumsi oleh perseorangan digunakan untuk berbagai keperluan. Paling besar adalah kredit multiguna yang mencapai pangsa sebesar 47% dari keseluruhan kredit konsumsi perseorangan. Penggunaan kedua terbesar adalah kredit kepemilikan rumah (KPR) yang mencapai pangsa 44%. Sementara itu kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) masih relatif kecil sebesar 9%.

Dari sisi pertumbuhan kreditnya, kredit perseorangan tumbuh sebesar 11,57% (yoy) pada triwulan III 2016, lebih rendah daripada periode sebelumnya yang tumbuh 12,29% (yoy). Perlambatan kredit tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan kredit kepemilikan kendaraan bermotor sebesar -10,07% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -8,08% (yoy). Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit kepemilikan rumah (KPR) turut menunjukkan kontraksi pertumbuhan yang tercatat sebesar -3,99%, yoy (Grafik 3.15). Peningkatan pertum¬buhan kredit multiguna dari sebesar 19,76% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 23,49% (yoy) pada triwulan pertumbuhan kredit perseorangan di Bali.

Dilihat dari sisi suku bunganya, suku bunga kredit perseorangan menunjukkan arah yang relatif stabil dan mulai mengarah ke suku bunga yang lebih rendah. Pada triwulan III 2016, suku bunga tertimbang kredit perseorangan di Bali mencapai 12,68% per tahun, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 12,83% per tahun.

Tabel 4.5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan III 2016

Daerah	Kredit	J	JUMLAH REKENING					
Daeran	(Rp Miliar)	%	KPR	KKB	Peralatan	Multiguna		
Kab. Buleleng	5,957	10.75	3,532	4,166	1,198	19,609		
Kab. Jembrana	2,368	4.27	5,570	1,674	550	5,277		
Kab. Tabanan	5,457	9.84	6,095	3,573	529	16,795		
Kab. Badung	9,665	17.44	6,803	4,945	673	23,064		
Kab. Gianyar	4,772	8.61	3,541	5,200	119	11,287		
Kab. Klungkung	1,745	3.15	301	734	47	6,969		
Kab. Bangli	1,735	3.13	4,636	825	25	2,688		
Kab. Karangasem	2,809	5.07	1,615	1,326	51	9,479		
Kota Denpasar	20,926	37.75	22,918	22,206	791	41,297		
PROVINSI BALI	55,435	100.00	55,011	44,649	3,983	136,465		

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Dari sisi risiko kreditnya, maka risiko kredit pada kredit rumah tangga masih menunjukkan tekanan yang minimal. Hal ini tercermin dari NPL kredit perseorangan yang berada pada level 2,28%. Bahkan NPL pada kredit konsumsi perseorangan hanya berada pada level 0,62%. Namun apabila dibandingkan dengan NPL pada triwulan II 2016 maka terjadi sedikit peningkatan risiko kredit meskipun masih berada di bawah *threshold* 5%. Secara spasial, kredit perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 37,75%, diikuti oleh penyaluran di Kabupaten Badung dengan pangsa sebesar 17,44%.

Kredit Kepemilikan Rumah

Masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan KPR di Bali menambah tekanan risiko pada pelaku usaha di bidang konstruksi perumahan dan penjualan real estate. Penjualan rumah baru yang masih rendah dapat menyebabkan tekanan pada kondisi keuangan pelaku usaha konstruksi dan real estate. Hal ini juga tercermin dari melambatnya kinerja lapangan usaha real estate (PDRB) pada triwulan III 2016 yang hanya tumbuh sebesar 4,52% (yoy) dari sebelumnya 5,53% (yoy). Dari jenis KPR-nya, perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan III 2016 terjadi di hampir semua jenis KPR terutama KPA dengan tipe kecil (s.d. T.21) dan tipe besar (> T.70). Meskipun demikian, terdapat pening-katan permintaan untuk KP Ruko dari sebesar 11,06% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 19,88% (yoy) pada triwulan III 2016. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh mulai terdapatnya optimisme dalam penjualan ruko seiring dengan relaksasi LTV dan perkiraan perkembangan kegiatan usaha yang masih prospektif.

Dari sisi risiko kredit KPR, perilaku rumah tangga dalam melakukan pembayaran cicilan pembayaran rumah masih terjaga meskipun terdapat potensi peningkatan tekanan. Pada triwulan III 2016, NPL gross KPR mencapai 1,67% sedikit meningkat dari

triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,45%. Risiko kredit yang perlu mendapatkan perhatian dari institusi keuangan adalah pada penyaluran KPA tipe sedang (T.21 s.d. T.70) yang telah melam-paui *threshold* 5% tercatat sebesar 16,73%.

Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Di sisi lain, masih terkontraksinya kredit kendaraan bermotor (KKB) di Bali pada triwulan III 2016 dengan pertumbuhan tercatat sebesar -10,07% (yoy), lebih dalam dari periode sebelumnya yang sebesar -8,08% (yoy). Berdasarkan hasil survei dan liaison, kontraksi tersebut disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat untuk belanja kendaraan, sehingga perkembangan terakhir menunjukkan konsu¬men lebih cenderung membeli mobil secara tunai dengan harga yang lebih murah.

Dilihat dari jenis kendaraan yang dibeli, kendaraan roda dua (motor) masih mengalami kontraksi pertumbuhan dari sebesar -12,83% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar -15,51% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu, kontraksi pada pembiayaan pembelian kendaraan roda empat (mobil) semakin dalam dan terkontraksi hingga -10,21% (yoy).

Untuk kredit kendaraan bermotor (KKB), meski¬pun pertumbuhan kreditnya mengalami kon¬trak¬si, namun NPL *gross* kredit ini relatif rendah pada kisaran 0,57%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,64%. KKB mobil mencatat NPL yang sangat rendah tercatat sebesar 0,47%. NPL tertinggi yang dimiliki oleh kendaraan roda dua (motor) yang tercatat sebesar 2,34%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelum¬nya yang sebesar 2,74%.

Kredit Multiguna

Besarnya penggunaan kredit konsumsi perseorangan secara multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, di luar kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal ini terjadi karena pengajuan kredit multiguna relatif mudah dengan menggunakan jaminan/agunan yang dimiliki oleh rumah tangga. Selain itu penggunaan dana yang diterima dapat secara leluasa

digunakan oleh rumah tangga dalam melakukan aktivitas konsumsi seperti merenovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.

Tabel 4.6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

Jenis KPR	Pangsa	Growth ((%,yoy)	NPL(%)		
Jenis KPK	%	TW II-16	TW III-16	TW II-16	TW III-16	
RT. KPR sd 21	22.33	-5.43	-17.41	0.24	0.37	
RT. KPR sd 70	32.33	6.79	-0.10	1.24	1.30	
RT. KPR 70+	38.96	6.52	0.09	2.01	2.45	
RT. KPA sd 21	0.35	-5.07	-5.92	0.00	0.00	
RT. KPA sd 70	0.92	-0.52	-5.43	19.06	16.73	
RT. KPA 70+	0.41	-27.11	-27.44	4.04	4.86	
RT. Ruko	4.71	11.06	19.88	0.89	0.82	
KPR	100	3.30	-3.99	1.45	1.67	

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali

Jenis KKB	Pangsa	Pangsa Growth (%,yoy)			NPL(%)			
Jenis KND	%	TW II-16	TW III-16	TW II-16	TW III-16			
Mobil	91.95	-6.96	-10.21	0.51	0.47			
Sepeda Motor	4.97	-12.83	-15.51	2.74	2.34			
Truk	2.00	-46.14	5.52	1.62	1.13			
lainnya	1.08	-4.01	6.04	0.13	0.14			
KKB	100	-8.08	-10.07	0.64	0.57			

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan III 2016

		Berdasarkan Nominal (% pangsa)										
Besar Pinjaman		Jangka Waktu										
	<1 tahun		1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah					
<10 JT		12.85	5.44	1.88	4.53	0.44	0.71					
>10 JT - 50 JT		34.10	38.31	31.01	34.57	3.70	7.32					
>50 JT - 100 JT		16.45	20.54	34.35	22.04	16.14	16.40					
>100JT - 500JT		19.02	19.44	26.97	36.46	64.19	60.58					
>500JT - 1 M		2.61	2.46	2.95	1.09	4.86	4.63					
>1 M		14.97	13.82	2.84	1.30	10.67	10.36					
Jumlah		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					

Berdasarkan Jumlah Rekening (%)											
Jangka Waktu											
<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah						
63.01	32.14	11.67	26.00	4.75	10.64						
30.55	54.42	63.71	64.09	17.09	32.63						
4.32	9.77	18.38	6.09	29.03	22.29						
1.89	3.32	6.07	3.75	47.62	33.36						
0.18	0.10	0.13	0.06	0.89	0.63						
0.05	0.25	0.05	0.02	0.61	0.44						
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						

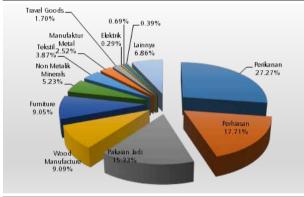
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.9 NPL Kredit Multiguna

Besar Pinjaman		Jangka Waktu									
	<1 tahun		1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah				
<10 JT		0.13	8.26	8.18	4.50	24.05	15.95				
>10 JT - 50 JT		0.11	1.01	1.39	2.41	0.62	0.64				
>50 JT - 100 JT		0.33	0.50	0.40	0.03	0.12	0.15				
>100JT - 500JT		0.29	0.80	0.00	0.00	0.30	0.30				
>500JT - 1 M		0.00	0.00	0.00	64.10	2.65	2.65				
>1 M		0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.28				
Jumlah		0.16	1.09	0.72	1.74	0.73	0.73				

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Pada triwulan III 2016, kredit multiguna tumbuh sebesar 23,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,76% (yoy). Jika dilihat pangsa berdasarkan besar pinjamannya dan jangka waktu kreditnya, kredit multiguna didominasi oleh kredit kelompok pinjaman >Rp 100 juta s.d Rp 500 juta dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun yang mencapai 64,19% dari keseluruhan nominal kredit multiguna. Secara jumlah kelompok tersebut juga memiliki rekening paling besar jumlahnya dengan pangsa sebesar 33,36%.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 4.16 Komposisi Ekspor Bali

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna berada dalam kondisi dengan risiko yang minimal. Pada triwulan III 2016, NPL kredit multiguna hanya sebesar 0,73% dan NPL pada konsentrasi kelompok terbesar hanya sebesar 0,30%. Adapun kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar berada pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp 10 juta dengan NPL tercatat sebesar 15,95%. Meskipun secara jumlah rekening pangsanya hanya sebesar 10,64% dari keseluruhan rekening multiguna, namun karena jumlah nominalnya hanya sebesar 0,71%, maka risiko kredit tersebut masih berdampak minor pada institusi keuangan di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur keuangan rumah tangga masih berdampak minimal pada institusi keuangan maupun pada sistem keuangan di Bali.

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

Sejalan dengan perlambatan perekonomian Bali pada triwulan III 2016, beberapa kinerja lapangan usaha utama Bali mengalami perlam-batan, antara lain konstruksi dan perdagangan besar dan eceran. Dari sisi permintaan, perlambatan terjadi pada kinerja konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta investasi. Peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bali yang terjadi pada triwulan III 2016 belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Dari sisi ekspor, komoditas perikanan masih mendominasi kinerja ekspor Provinsi Bali dengan pangsa sebesar 27,27%. Komoditas perikanan masih mencatat pertumbuhan nilai ekspor yang meningkat sejak awal tahun 2016, meskipun menghadapi tantangan untuk dapat tumbuh lebih tinggi. Salah satunya adalah regulasi pelarangan transshipment yang menahan laju peningkatan ekspor yang lebih tinggi mengingat peraturan tersebut menyebabkan penurunan produksi ikan segar (Tuna). Hal ini juga berdampak pada penurunan ekspor ikan segar meskipun permintaan akan komoditas tersebut masih tetap tinggi. Selain itu, pelarangan penggunaan kapal asing juga turut menahan peningkatan kinerja produksi perikanan. Berdasarkan hasil FGD dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) tertahannya produksi tersebut menyebabkan beberapa pelaku usaha penangkapan tuna gulung tikar. Perkembangan tersebut berdampak pada resiko tertahannya perkembangan korporasi mengingat pelaku usaha perikanan juga didominasi oleh lapangan industri pengolahan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja ekspor jasa pada triwulan III 2016 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, terdapat indikasi penurunan kualitas wisatawan yang datang sehingga banyak hotel yang mengambil langkah untuk menurunkan harga kamar yang juga berdampak pada kinerja korporasi khususnya perhotelan. Berdasarkan hasil FGD dengan perbankan, resiko perkembangan perhotelan bersumber dari adanya indikasi kejenuhan jumlah kamar yang terus mengalami peningkatan yang tidak diimbangi dengan kecepatan kunjungan wisatawan yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan perhotelan menerapkan persaingan harga yang berdampak pada penerimaan pendapatan yang tidak setinggi sebelumnya.

4.2.2. Kinerja Korporasi

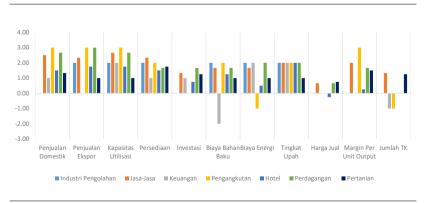
Omzet Penjualan

Sejalan dengan perlambatan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2016, beberapa kinerja lapangan usaha utama di ProvinsiBali mengalami perlambatan. Hasil liaison kepada pelaku usaha korporasi di Bali pada triwulan III 2016 mengkonfirmasi perlambatan pada sektor utama Provinsi Bali antara lain sektor perhotelan, sektor keuangan, dan sektor pertanian. Sementara itu sektor keuangan mencatat penurunan dengan nilai *likert scale* sebesar 1,00 yang menunjukkan perlambatan yang terjadi di bawah rata-rata normalnya. Sektor pertanian turut mencatatkan perlambatan seiring dengan nilai *likert scale* untuk penjualan domestik sebesar 1,33 dan penjualan ekspor sebesar 1.

Di sisi lain, masih terdapat sektor yang mengalami peningkatan antara lain sektor pengangkutan, perdagangan, dan jasa-jasa. Sektor pengangkutan mencatat peningkatan tertinggi dengan nilai *likert scale* penjualan ekspor nya sebesar 3. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan arus wisatawan pada periode *peak season* pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, sektor perdagangan menunjukan peningkatan dengan nilai *likert scale* penjualan ekspor sebesar 2,67 dan *likert scale* penjualan domestik sebesar 3. Sementara itu, jasa-jasa turut menunjukan peningkatan dengan nilai *likert scale* sebesar 2,5 untuk penjualan domestic dan 2,33 untuk penjualan ekspor.

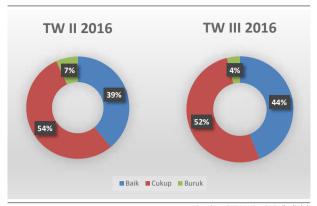
<u>Biaya</u>

Pada triwulan III 2016, hampir semua korporasi menyatakan mengalami peningkatan biaya produksi kecuali untuk keuangan. Peningkatan terbesar dialami oleh korporasi industri pengolahan dan pengangkutan dengan *likert scale* sebesar 2. Peningkatan biaya tersebut lebih disebabkan karena adanya kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk industri khususnya dan peningkatan jam kerja, mendorong peningkatan biaya energi. Peningkatan biaya bahan baku didorong oleh peningkatan harga beli bahan baku yang merupakan peningkatan harga yang terjadi setiap tahun.



Sumber: Liaison KPw BI Bali diolah

Grafik 4.17 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan Liaison Triwulan III 2016



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah Grafik 4.18 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di

Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.19 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral

Marjin Keuntungan

Bali

Kinerja korporasi dari sisi perolehan laba atau margin keuntungan secara umum mengalami penurunan, dan hanya pengangkutan yang dapat meningkatkan margin keuntungannya di atas rata-rata normalnya. Pada triwulan III 2016, margin industri pengolahan tidak mengalami pertumbuhan terlihat dari skala likert sebesar 0. Sementara itu, margin pada perikanan, jasa-jasa, perhotelan, dan perdagangan masih tumbuh namun di bawah rata-rata normalnya. Berdasarkan hasil liaison, margin pada sektor perhotelan cenderung melambat disebabkan oleh persaingan perhotelan di Provinsi Bali yang sudah cukup jenuh sehingga pelaku perhotelan sulit untuk dapat menaikkan margin.

Kondisi likuiditas keuangan korporasi

Secara umum, dari hasil SKDU, kondisi keuangan korporasi dari sisi likuiditas menunjukkan posisi yang lebih likuid. Pada triwulan III 2016, pangsa korporasi yang memiliki kondisi likuiditas baik mencapai 44%, meningkat daripada triwulan sebelumnya yang hanya sebanyak 39% dari total responden korporasi di Bali. Sejalan dengan kondisi tersebut, pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk mengalami penurunan dari sebesar dari 7% menjadi 4%.

Jika dilihat secara sektoralnya, korporasi yang berada pada kondisi likuiditas yang baik adalah korporasi yang bergerak di sektor listrik, gas, dan air bersih. Jumlah korporasi yang memiliki likuiditas keuangan yang baik di sektor tersebut mencapai 100%.

Tabel 4.10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang

Sektor	Memiliki Kredit Bank (% thd	Perkiraan Beban Angsuran (% Responden thd Responden Kredit)					
	total responden)	Bertambah berat	Tetap	Bertambah ringan			
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan							
Perikanan	33%	67%	33%	0%			
Pertambangan	67%	50%	50%	0%			
Industri Pengolahan	41%	6%	89%	6%			
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0%	0%	0%	0%			
Bangunan	0%	0%	0%	0%			
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	36%	14%	79%	7%			
Pengangkutan dan Komunikasi	25%	0%	100%	0%			
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	18%	0%	100%	0%			
Jasa-Jasa	100%	0%	75%	25%			
All Sektor	37%	14%	80%	7%			

Sumber: SKDU KPw BI BAli, diolah

Beban Angsuran Hutang Korporasi

Dari sisi kemampuan membayar hutang, korporasi di Bali secara umum memiliki risiko yang relatif terjaga. Kondisi ini tercermin dari SKDU pada triwulan III 2016 yang menunjukkan hanya terdapat 14% korporasi yang menyatakan bahwa beban angsuran perbankan ke depan akan semakin berat. Persepsi tersebut berasal dari korporasi pertanian dikarenakan tingginya alih fungsi lahan pertanian serta anomaly cuaca yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

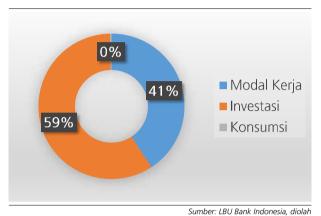
Sementara itu terdapat 7% korporasi yang sedang memiliki kredit perbankan menyatakan bahwa beban angsuran kredit ke depan akan semakin ringan terhadap pendapatan perusahaan. Jumlah responden SKDU yang masih memiliki hutang ke perbankan hanya sebesar 37% dari keseluruhan responden.

4.2.3. *Eksposure* Perbankan Pada Sektor Korporasi

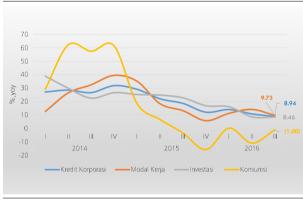
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai meskipun eskposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 32,4% dari total kredit di Bali. Hal tersebut mengingat, kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Bali pada triwulan III 2016 mencapai Rp 28,04 triliun, tumbuh sebesar 8,94% (yoy). Kondisi tersebut lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,08% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh perlambatan kredit investasi dan modal kerja korporasi. Kredit investasi korporasi mengalami perlambatan dari sebesar 8,62% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 8,46% (yoy) pada triwulan III 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, kredit modal

kerja mengalami perlambatan dari sebesar 14,15% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 9,73% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu, meskipun masih terkontraksi, kredit konsumsi mengalami perbaikan dari pertumbuhan sebesar -10,91% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi -1% pada triwulan III 2016.

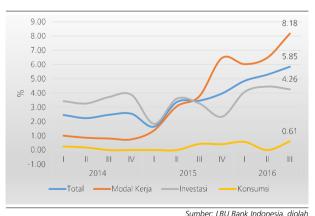


Grafik 4.20 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.22 NPL Kredit Korporasi

Sementara itu, dari sisi kualitas kredit terjadi penurunan seiring dengan NPL yang mengalami peningkatan dari sebesar 5,29% pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 5,85% pada triwulan III 2016. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan di kredit korporasi modal kerja dan konsumsi.

Kredit Modal Kerja Korporasi

Posisi kredit modal kerja korporasi pada triwulan III 2016 mencapai Rp11,4 triliun. Dari sisi risiko kreditnya terjadi peningkatan tekanan dari sisi kredit modal kerja tersebut. Hal ini terlihat dari NPL yang meningkat dari 6,48% pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 8,18% pada periode laporan.

Posisi kredit investasi korporasi pada triwulan II 2016 mencapai Rp16,5 triliun. Sementara itu dari sisi risiko kredit, NPL kredit investasi korporasi masih memiliki risiko yang terjaga di bawah *threshold* 5%. Pada triwulan III 2016, NPL kredit ini hanya sebesar 4,26%, sedikit lebih rendah dibanding NPL pada periode sebelumnya yang mencapai 4,45%.

4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)

4.3.1. Jaringan Kantor dan Aset

Pada triwulan III 2016, jumlah bank umum di Bali mengalami pertambahan menjadi sebanyak 53 bank. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah BPR turut mengalami peningkatan yaitu menjadi masih tetap sama yaitu sebanyak 138 BPR.

4.3.2. Kondisi Umum Perbankan Bali

Secara umum, perkembangan kinerja bank umum di Bali masih menunjukkan perkembangan yang relatif baik, tercermin dari pertumbuhan positif kredit dan dana pihak ketiga (DPK) serta aset, meskipun ketiga indikator tersebut menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Perkembangan resiko kredit (rasio NPL) masih relatif terjaga, rasio NPL sedikit menunjukkan peningkatan, namun masih berada dalam batas toleransi. Sementara itu, pertumbuhan aset perbankan juga masih menunjukkan perlambatan pada triwulan III-

Tabel 4.11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

Votogovi	2012	2012	2014	2015	2016				
Kategori	2012	2013	2014		1	Ш	III		
Bank Umum				42	42	43	53		
Jumlah Kantor	656	652	657	704	702	696	716		
BPR	137	137	138	138	137	137	138		
Jumlah Kantor	170	286	286	286	306	309	312		
Total Bank Umum & BPR	137	137	138	180	179	180	191		
Total Jumlah Kantor	826	938	943	990	1008	1005	1028		

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.12 Perkembangan Perbankan Bali

Indikator Bank Umum dan		201	15	2016			
BPR (Miliar Rp)		Ш	III	IV		Ш	III
Total Aset	94.997	98.520	102.822	104.155	103.065	106.370	110.549
Pertumbuhan (% yoy)	14,40	12,27	11,10	9,45	8,49	7,97	7,51
Dana Pihak Ketiga	78.068	79.828	83.022	82.513	82.823	85.181	87.147
Pertumbuhan (% yoy)	12,99	11,23	9,19	7,98	6,09	6,71	4,97
Kredit	65.295	67.521	68.924	71.135	71.442	74.169	75.764
Pertumbuhan (% yoy)	15,39	13,78	11,36	10,58	9,41	9,84	9,92
NPL (%)	1,56	2,05	2,02	2,13	2,60	2,62	2,96

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

2016 dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp110,55 triliun atau tumbuh sebesar 7,51% (yoy), lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Perkem-bangan DPK maupun kredit juga masih menunjukkan pertumbuhan yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, seiring dengan aktivitas dunia usaha yang telah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sehingga masih terdapat ruang peningkatan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

Secara umum, berbagai indikator kinerja perbankan Bali pada triwulan III-2016 masih sesuai dengan indikator yang telah ditargetkan. Selain itu, pertumbuhan kinerja perbankan juga searah dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami perlambatan ekonomi di triwulan yang sama. Meskipun demikian, masih terdapat potensi perbaikan kinerja perbankan di triwulan mendatang, meskipun perlu untuk dicermati mengenai tantangan kondisi perekonomian global yang pemulihannya cenderung lambat dan transmisinya terhadap perkembangan ekonomi domestik khususnya Bali.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Bali adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi Global yang antara lain dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan ekspor barang dan jasa dari Provinsi Bali. Sementara itu, ketidakpastian di sektor keuangan masih akan dihadapi seiring dengan masih adanya potensi kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) pada periode akhir tahun 2016. Ekonomi Eropa diperkirakan akan masih tumbuh terbatas, ditengah belum pulihnya kepercayaan pelaku pasar pasca brexit. Sedangkan ekonomi China sebagai negara terbesar kedua asal wisatawan mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Bali, diperkirakan masih akan tumbuh melambat di tahun 2016.

Meskipun demikian masih terdapat optimisme bagi pelaku usaha, khususnya untuk industri pariwisata sebagai salah satu bidang usaha yang mendominasi ekonomi Bali seiring dengan dampak dari kebijakan bebas visa yang telah diimplementasikan sejak tahun 2015, telah mendorong peningkatan jumlah Wisman yang signifikan sepanjang tahun 2016. Kondisi ini juga didukung oleh kondisi keamanan yang tetap solid dan berbagai promosi yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata vaitu hotel, travel agent dan restoran untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Pertumbuhan ekonomi Bali yang diperkiarakan akan tetap tumbuh tinggi (di atas nasional) di triwulan IV-2016 dan implementasi paket deregulasi kebijakan pemerintah, diperkirakan akan turut mendorong peningkatan kinerja perbankan di triwulan ke depan, meskipun terdapat resiko fiskal yang berpotensi membatasi pertumbuhan ekonomi dan kinerja perbankan ke depan.

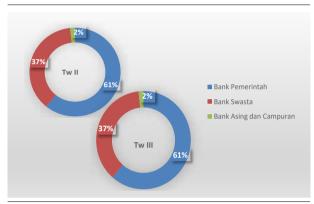
4.4. KINERJA BANK UMUM DI PROVINSI BALI4.4.1. Aset dan Aktiva Produktif

Perkembangan total aset bank umum di Provinsi Bali pada periode triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp 98,11 triliun, atau tumbuh sebesar 6,31% (yoy). Pertumbuhan ini lebih lambat bila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya yang mencapai 6,62% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset bank umum di Provinsi Bali, disinyalir merupakan dampak dari masih melambatnya pertumbuhan DPK, khususnya Giro. Bila dilihat dari jumlah dari kelompok banknya, bank pemerintah masih memiliki aset terbesar di antara bank lainnya. Dibandingkan dengan triwulan II-2016, aset bank pemerintah mengalami penurunan proporsi dibandingkan dengan aset bank swasta dan bank asing & campuran.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Pangsa Aset Berdasarkan Jenis Bank

4.4.2. Dana Pihak Ketiga

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum pada triwulan III-2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 79,39 triliun atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,72% (yoy), melambat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,48% (yoy). Perlambatan terjadi pada komponen giro dan tabungan yang masing-masing melambat dari 2,12% (yoy) menjadi -0,52% (yoy) dan 9,92% (yoy) menjadi 6,46% (yoy), sedangkan komponen deposito di periode yang sama mengalami peningkatan dari tumbuh sebesar 1,93% (yoy) menjadi 2,63% (yoy). Berdasarkan kelompok bank, DPK pada semua kelompok bank tumbuh melambat. Perlambatan paling dalam dialami oleh bank asing dan campuran, yaitu dari -10,29% (yoy) menjadi -18,32% (yoy). Perlambatan tersebut terutama terjadi pada jenis simpanan giro, dari -4,15% (yoy) menjadi -23,9% (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh perlambatan giro untuk kelompok nasabah bukan lembaga keuangan swasta nasional.

Tabel 4.13 Perkembangan Indikator Bank Umum Bali

In Alberton Donale University			2016				
Indikator Bank Umum	Tw I	Tw 2	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Aset (Rp milyar)	85.393	88.520	92.288	92.842	91.469	94.376	98.107
g Asset (%, yoy)	13,78	11,34	10,09	8,23	7,12	6,62	6,31
Kredit (Rp milyar)	57.967	59.777	60.972	62.855	63.074	65.603	67.039
g Kredit Umum (%, yoy)	15,18	13,16	10,68	9,87	8,81	9,75	9,95
Modal Kerja (Rp milyar)	22.941	23.765	24.012	24.504	24.416	25.852	26.288
g Modal Kerja (%, yoy)	14,77	11,62	7,89	7,72	6,43	8,78	9,48
Investasi (Rp milyar)	13.626	13.876	14.141	14.588	14.446	15.042	15.539
g Investasi (%, yoy)	20,04	16,62	12,66	8,83	6,01	8,41	9,89
Konsumsi (Rp milyar)	21.400	22.137	22.819	23.764	24.213	24.709	25.212
g Konsumsi (%, yoy)	12,70	12,73	12,53	12,86	13,14	11,62	10,49
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	72.015	73.580	76.545	75.507	75.567	77.610	79.393
g DPK (%, yoy)	12,71	10,65	8,52	7,09	4,93	5,48	3,72
Deposito (Rp milyar)	26.690	27.514	27.445	26.544	27.819	28.044	28.167
g Deposito (%, yoy)	30,24	26,73	16,63	7,36	4,23	1,93	2,63
Giro (Rp milyar)	12.862	13.709	15.002	13.065	13.898	13.999	14.923
g Giro%, yoy)	5,17	-0,87	6,32	9,19	8,06	2,12	-0,52
Tabungan (Rp milyar)	32.463	32.357	34.098	35.898	33.850	35.567	36.303
g Tabungan(%, yoy)	4,14	4,51	3,66	6,14	4,27	9,92	6,46
NPL (Gross)	1,34	1,91	1,89	2,06	2,38	2,35	2,67
LDR	80,49	81,24	79,66	83,24	83,47	84,53	84,44



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan DPK Bank Umum

DPK bank pemerintah dan bank swasta nasional juga mengalami perlambatan, masing-masing dari 6,05% (yoy) menjadi 3,89% (yoy) dan dari 5,61% (yoy) menjadi 4,99% (yoy). Perlambatan DPK di kedua jenis bank tersebut, didorong oleh perlambatan yang terjadi pada komponen tabungan yaitu dari 13,64% (yoy) menjadi 9,07% (yoy) untuk bank pemerintah dan dari 5,12% (yoy) menjadi 3,61% (yoy) untuk bank swasta. Selain perlambatan tabungan, perlambatan juga terjadi pada DPK jenis giro yang mengalami kontraksi pada triwulan III 2016 sebesar -0,52% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,12% (yoy). Penurunan pertumbuhan giro terutama terjadi pada DPK bank pemerintah terutama dipengaruhi oleh perlambatan giro pemerintah. Perlambatan giro pemerintah di Bank Pemerintah tersebut diperkirakan merupakan dampak percepatan realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih progresif di triwulan III 2016. Selain itu, kebijakan penundaan pencairan DAU oleh pemerintah pusat sejak bulan September 2016, ikut mempengaruhi menurunnya giro pemerintah tersebut.

4.4.3. Kredit

Meskipun kinerja penghimpunan dana yang mengalami perlambatan, fungsi penyaluran kredit perbankan oleh bank umum secara keseluruhan tetap tumbuh lebih tinggi dibanding kinerja di periode triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tahunan kredit bank umum di Provinsi Bali pada triwulan III 2016 tumbuh sebesar 9,95% (yoy) atau tercatat sebesar Rp 67,04 triliun, tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang sebesar 9,75% (yoy). Kinerja pertumbuhan kredit yang lebih baik tersebut, terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit untuk kelompok bank pemerintah yang tumbuh dari 12,59% (yoy) di triwulan II 2016 menjadi 13,55% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu, untuk kelompok bank swasta dan bank asing dan campuran masih menunjukkan perlambatan.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan Kredit Bank Umum

Meningkatnya kinerja penyaluran kredit tersebut, terutama didorong oleh meningkatnya kinerja kredit produktif (konsumsi dan investasi) yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode triwulan III 2016, kredit investasi tumbuh sebesar 9,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,41% (yoy). Sementara kredit modal kerja di periode yang sama juga tumbuh lebih tinggi yaitu dari 8,78% (yoy) di triwulan II 2016 menjadi 9,48% (yoy) pada triwulan III 2016. Sementara itu, kredit konsumsi pada periode laporan tercatat sebesar Rp25,21 triliun atau tumbuh sebesar 10,49% (yoy), melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat hanya tumbuh sebesar 11,62% (yoy).

Meskipun menunjukkan peningkatan pertumbuhan kredit, namun tingkat intermediasi perbankan yang tergambar melalui indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada triwulan III 2016 menunjukan penurunan bila dibandingkan kinerja di periode sebelumnya. Pada triwulan III 2016 LDR bank umum di Bali mencapai 84,44%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 84,53%. Kondisi tersebut seiring peningkatan nominal kredit yang lebih rendah dibandingkan pertambahan nominal penghimpunan dana dari masyarakat.

Perkembangan kualitas kredit perbankan pada triwulan III 2016 sedikit menunjukkan perkembangan peningkatan yang tercermin dari indikator *Non Performance Loans* (NPLs) *Gross* yang meningkat dari dari 2,35% pada triwulan II 2016 menjadi 2,67% pada triwulan III 2016.

4.4.5. Bank Perkreditan Rakyat

Perkembangan kinerja BPR pada triwulan III 2016 menunjukkan perlambatan baik dari indisktor aset, kredit maupun penghimpunan DPK. Perkembangan Aset BPR tumbuh sebesar 18,11% (yoy), lebih rendah dari periode triwulan sebelumnya yang sebesar 19,93% (yoy), dengan nilai nominal aset di periode laporan tercatat mencapai Rp12,44 triliun.

Perlambatan aset BPR di Provinsi Bali, disebabkan oleh melambatnya kinerja penghimpunan dana maupun penyaluran kredit perbankan ke masyarakat.

Pada triwulan III 2016, penyaluran kredit BPR tumbuh melambat yaitu sebesar 9,72% (yoy) atau dengan nominal kredit sebesar Rp8,73 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,61% (yoy). Perlambatan kredit tersebut, terutama disebabkan oleh melambatnya secara signifikan pertumbuhan kredit kredit modal kerja yang hanya tumbuh sebesar 7,53% (yoy), jauh lebih rendah bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,49% (yoy). Sejalan dengan perlambatan kredit tersebut, penghimpunan DPK juga menunjukkan pertumbuhan yang melambat, yaitu tumbuh dari 21,17% (yoy) ditriwulan II 2016 menjadi tumbuh sebesar 19,70% (yoy) di triwulan III 2016 atau tercatat sebesar Rp 7,75 triliun. Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi baik untuk deposito maupun tabungan. Perlambatan pada kinerja kredit dan DPK tersebut menyebabkan tingkat intermediasi BPR mengalami penurunan yang disertai penurunan kualitas risiko kredit pada periode laporan yang masing-masing tercatat sebesar 75,53% dan 5,19%.

Tabel 4.14 Perkembangan Indikator BPR di Bali

Indikator BPR		20	15	2016			
IIIUIKATOI DEN	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Aset (Rp milyar)	9.604	10.001	10.534	11.313	11.595	11.994	12.442
g Asset (%, yoy)	20,31	21,22	20,82	20,61	20,74	19,93	18,11
Kredit (Rp milyar)	7.328	7.744	7.952	8.279	8.367	8.566	8.725
g Kredit (%, yoy)	17,11	18,77	16,81	16,28	14,18	10,61	9,72
Modal Kerja (Rp milyar)	3.710	3.919	4.058	4.263	4.299	4.330	4.363
g Modal Kerja (%, yoy)	15,05	17,70	17,07	18,17	15,88	10,49	7,53
Investasi (Rp milyar)	908	968	985	1.034	1.068	1.088	1.107
g Investasi (%, yoy)	29,95	30,16	20,51	18,97	17,59	12,45	12,38
Konsumsi (Rp milyar)	2.710	2.857	2.909	2.983	3.001	3.147	3.254
g Konsumsi (%, yoy)	16,11	16,75	15,26	12,86	10,72	10,15	11,87
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	6.053	6.248	6.478	7.007	7.256	7.571	7.753
g DPK (%, yoy)	16,53	18,67	17,76	18,66	19,87	21,17	19,70
Deposito (Rp milyar)	4.039	4.444	4.644	5.054	5.354	5.628	5.751
g Deposito (%, yoy)	14,74	26,58	32,11	33,92	32,58	26,66	23,84
Tabungan (Rp milyar)	2.015	1.805	1.834	1.953	1.902	1.943	2.003
g Tabungan(%, yoy)	20,30	2,83	-7,64	-8,37	-5,61	7,67	9,21
NPL (Gross)	3,31	3,10	3,03	2,69	4,27	4,75	5,19
LDR	80,11	81,67	80,54	76,33	76,98	76,24	75,53

4.5. AKSES KEUANGAN

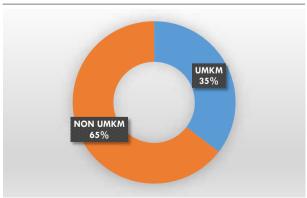
4.5.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

Sejalan dengan kondisi kredit perbankan secara umum, laju pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami peningkatan, dari yang semula tumbuh sebesar 15,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 16,06% (yoy) di periode laporan. Peningkatan laju penyaluran kredit **UMKM** dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran kredit di kategori perdagangan dengan pangsa kredit terbesar (60,75%) yang semula tercatat mampu tumbuh dari sebesar 19% (yoy) pada triwulan sebelumnya meniadi sebesar 19,52%(yoy). Disamping itu, kategori penyediaan akomodasi makan dan minum juga tercatat mengalami peningkatan dari 20,7% (yoy) menjadi 24,55% (yoy) sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kinerja kredit UMKM di periode laporan.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.27 Pertumbuhan Kredit UMKM



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit

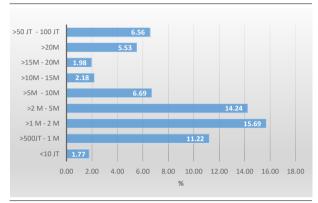
Perkembangan positif realisasi kredit tersebut diiringi dengan kualitas kredit yang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang turun dari 2,01% menjadi sebesar 1,92%. Penurunan tersebut seiring dengan perkembangan positif kegiatan usaha UMKM di triwulan II 2016. Perbaikan kualitas kredit dialami oleh sebagian besar kategori utama di Provinsi Bali.

Dari data yang ada, pangsa kredit UMKM di periode triwulan tercatat mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 35,31% dari total kredit, dibandingkan pangsa di triwulan sebelumnya yang sebesar 35,03%. Hal tersebut menunjukan bahwa perbankan turut memiliki perhatian dan kontribusi positif dalam rangka pengembangan UMKM di Bali. Disamping itu, berdasarkan sektor ekonominya, pangsa kredit UMKM terbesar masih berada pada kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 70%. Sementara itu, berdasarkan nominal kreditnya, maka pangsa realisasi kredit UMKM terbesar berada pada rentang nominal Rp100-Rp500 juta rupiah, yakni sebesar 22,6% dari total kredit UMKM yang ada di Bali.

Disisi lain, berdasarkan sebaran wilayahnya maka konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar berada di Kota Denpasar yakni dengan pangsa sebesar 34%, diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 18% dan Kabupaten Gianyar sebesar 12%. Perkembangan tersebut didukung dengan kuaitas kredit yang terjaga untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar yang emmiliki NPL relatif terjaga masing-masing sebesar 1,46% dan 1,64%. Sementara itu, untuk Kabupaten Badung, meskipun NPLnya masih dibawa batas aman sebesar 5%, Kabupaten Badung memiliki tingkat NPL tertinggi sebesar 3,49%.

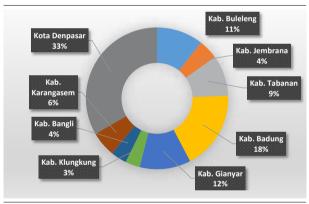
Sementara itu berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit UMKM masih terkonsentrasi di sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 70%, diikuti oleh sektor keuangan, jasa perusahaan, pertanian dan jasa-jasa dengan pangsa sebesar 9%, 6% dan 7 %, sementara sektor ekonomi lainnya memiliki pangsa relatif rendah dibawah 5%. Lebih lanjut, tendensi peningkatan tingkat NPL kredit

UMKM di periode laporan secara sektoral disebabkan oleh peningkatan tingkat NPL pada beberapa sektor utama seperti sektor konstruksi, perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan akomodasi, industri dan perdagangan.



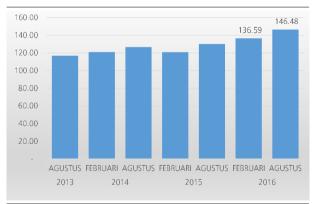
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.29 Pangsa Nominal Kredit UMKM



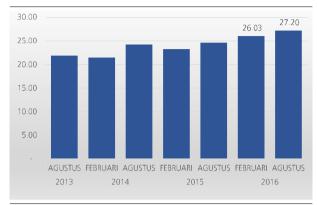
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.30 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten



Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.31 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja



Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.32 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja

4.6.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

Indikator akses keuangan di Bali terutama dari sisi penghimpunan dana mengalami peningkatan, begitu juga dari sisi kredit. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali tetap menunjukkan tren peningkatan, dimana pada triwulan laporan rasio tersebut tercatat sebesar 146,48%. Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Bali yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan kerja yang juga memiliki rekening seperti siswa sekolah maupun mahasiswa. Sementara itu, rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Bali menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 27,20% di bulan Agustus 2016. Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan masih sedikit digunakan oleh masyarakat di provinsi ini dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang.



KPW BI PROVINSI BALI *ROADSHOW* PANEN KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI BALI

Sebagai upaya pengendalian inflasi Bali dari sisi supply dan dukungan terhadap program ketahanan pangan Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di tahun 2016 telah mengembangkan 13 demplot dan klaster komoditas Utama penyumbang inflasi Bali di hampir seluruh Kabupaten di Bali. Sebagai pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi daerah, komoditas vang dikembangkan adalah komoditas yang secara struktural menyumbang inflasi, diantaranya padi/ beras yang telah menyumbang inflasi sebanyak 8 kali, bawang merah sebanyak 6 kali dan cabai merah sebanyak 4 kali selama tahun 2015. Komoditas padi dikembangkan di Kabupaten Gianyar dan Jembrana, sementara komoditas cabai merah di Kabupaten Karangasem dan untuk komoditas bawang merah dikembangkan di Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Buleleng.



Pada tanggal 21 Oktober 2016 lalu Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali beserta Gubernur Bali menggelar panen raya padi perlakuan organik di Subak Getas, Kab. Gianyar. Hasil pengubinan awal yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016 bersama BPS Kab. Gianyar, dari 3 titik areal pengubinan didapatkan hasil rata-rata 9,52 ton/Ha meningkat sebesar 27% dari panen tahap I yang rata-rata sebesar 7,5 ton/Ha dan meningkat sebesar 73% dari kondisi awal yang rata-rata hanya 5,5 ton/Ha.



Tidak hanya itu, panen padi perlakuan organik di klaster padi KTTI Pulagan juga menuai hasil yang menggembirakan, hasil panen padi non-organik yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang hasil panennya semula rata-rata hanya 5,5 ton/Ha pada hasil panen tanam tahap pertama meningkat menjadi rata-rata 7,8 ton/Ha (perlakuan organik), hasil panen tanam tahap kedua menjadi 9,4 ton/Ha (perlakuan organik) dan hasil panen tanam tahap ketiga menjadi 9,86 ton/Ha (perlakuan organik), meningkat sebesar 79% dari semula. Teknik budidaya baru System of Rice Intensification atau SRI yang dikombinasikan dengan jajar legowo 2:1 serta penggunaan pupuk organik berbasis Microalfafa MA-11 terbukti membawa perkembangan yang pesat pada pertumbuhan padi dimana padi dengan varietas cigeulis pada umur 65 hari sudah berbulir dan umur 90 hari sudah siap panen. Sedangkan dengan metode konvensional, rata-rata baru siap panen dengan waktu 110 sampai 115 hari. Dari hasil pengamatan, rata-rata padi memiliki tinggi 110 cm dan jumlah anakan mencapai rata-rata 25 dengan bulir sebanyak 217 tiap malainya. Selain pertumbuhan yang pesat, teknik budidaya dengan perlakuan organik ini juga mampu mengembalikan biota sawah yang selama ini hampir punah seperti belut sawah, kodok dan cacing tanah.



Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2016, di Kab. Bangli dilaksanakan panen bawang merah perlakuan organik pada kelompok binaan KPw BI Prov. Bali yaitu Kelompok Sari Pertiwi bersama Kodam IX/ Udayana, Pemerintah Kabupaten Bangli, Bulog, Badan Pusat Statistik dan Polres Bangli. Berdasarkan hasil pengubinan bersama Dinas Pertanian Kab. Bangli pada tanggal 3-5 Juni 2016, di saat bukan musim tanam didapatkan hasil rata-rata sebesar 22,4 ton/Ha dengan hasil tertinggi mencapai 34,2 ton/Ha meningkat sebesar 135% dari sebelumnya hanya sebesar 9,5 ton/Ha. Jumlah umbi yang dihasilkan juga meningkat tajam, dari sebelumnya berkisar antara 8-12 umbi saat ini menjadi berkisar antara 12-18 umbi. Selanjutnya panen tahap II pada bulan September 2016 (musim panen) hasil ubinan panen kelompok rata-rata sebesar 32,90 ton/Ha untuk varietas Bima Brebes dan rata-rata sebesar 24,68 ton/ Ha untuk varietas Bali Karet.



Pada tanggal 15 Juni 2016 dilaksanakan panen bawang merah perlakuan organik di Subak Yangai, Desa Bungkulan, Kab. Buleleng. Subak Yangai yang terletak di pesisir pantai ini sangat rawan terkena hempasan air laut yang dapat merusak tanaman. Namun berkat pendampingan yang intensif serta teknologi pertanian baru yaitu MA-11, berdasarkan hasil pengubinan dengan Dinas Pertanian Kab. Buleleng, panen bawang merah di Subak Yangai diperoleh rata-rata sebesar 18,6 ton/ Ha dengan rentang antara 16,5 - 21,5 ton/Ha. Pengembangan komoditas bawang merah di Subak Yangai ini merupakan langkah Bank Indonesia dalam mempelopori budidaya bawang merah di dataran rendah mengingat daerah penghasil bawang merah di Provinsi Bali didominasi daerah dataran tinggi, yaitu di Kab. Bangli.



Selanjutnya, 21 Juni 2016 di Subak Babakan Pendem, Kab. Jembrana dilaksanakan panen padi tadah hujan perlakuan organik dengan hasil rata-rata sebesar 7,6 ton/Ha meningkat sebesar 70,7% dari sebelumnya yang hanya 4,5 ton/Ha dengan perlakuan nonorganik menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan sebagai sumber air hanya dipanen setahun sekali. Di musim kering sawah ini dibiarkan tidak diolah sama sekali karena air sulit didapat atau tidak ada sama sekali. Mencermati ini, Bank Indonesia pengembangan demplot menginisiasi melaksanakan penanaman sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Pengembangan komoditas padi di Subak Babakan Pendem ini merupakan langkah Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mempelopori budidaya padi dengan sistem tadah hujan secara organik yang diharapkan dapat diterapkan pada area yang lebih luas.

pertanian yang cukup tinggi. Data Tahun 2014, luas wilayah pertanian, perkebunan, dan hutan rakyat di Kabupaten Gianyar mencapai 73,5%, yaitu sebesar 27.069 Ha dari 36.800 Ha luas wilayah Kabupaten Gianyar dengan jumlah petani mencapai 48.000 Namun pemanfaatan lahan pertanian orang. tersebut belum digunakan untuk budidaya bawang merah. Hal ini membuat pasokan bawang merah di Kabupaten Gianyar sangat bergantung pada daerah lain. Berdasarkan hal tersebut, KPw BI Provinsi Bali dan Pemkab Gianyar berinisiatif untuk mempelopori pengembangan komoditas bawang merah di Kab. Gianyar, yaitu milik Subak Kembengan dengan mengubah lahan yang sebelumnya ditanami padi menjadi lahan bawang merah sebagai demplot uji coba dengan harapan dapat menjadi rujukan bagi subak-subak lain di Kab. Gianyar.



Pada tanggal 24 Juni 2016 di Subak Kembengan, Kab. Gianyar dilaksanakan panen bawang merah perlakuan organik yang merupakan pengembangan bawang merah pertama di Kab. Gianyar. Berdasarkan hasil pengubinan bersama BPS Kab. Gianyar, panen menghasilkan rata-rata sebesar 11,6 ton/ Ha. Kabupaten Gianyar memiliki potensi di bidang



Roadshow panen di bulan Juni ini berakhir di Kelompok Mertha Buana, Kab. Karangasem dimana pada tanggal 27 Juni 2016 dilaksanakan panen cabai merah perlakuan organik dengan perkiraan hasil ratarata sebesar 14,4 ton/Ha dalam 15 kali pemetikan. Kabupaten Karangasem memiliki potensi tinggi untuk pengembangan cabai. Hal ini terbukti pada

Tahun 2013 Kabupaten Karangasem pernah menjadi Kabupaten penghasil cabai tertinggi di Provinsi Bali, yaitu sebesar 35,9% atau 12.885 ton dari total produksi Provinsi Bali sebesar 35.856 ton. Untuk mengembalikan capaian tersebut, KPw BI Provinsi Bali dan Pemkab Karangasem berinisiatif untuk mengembangkan komoditas cabai merah di Kab. Karangasem, yaitu milik Kelompok Mertha Buana, dengan memanfaatkan daerah ladang perkebunan yang sebelumnya digunakan untuk tanaman tahunan sehingga kurang memberikan hasil yang optimal bagi kelompok, menjadi lahan demplot tanaman cabai. Masyarakat yang awalnya bekerja serabutan kini telah beralih menjadi petani cabai merah perlakuan organik.

Melalui pemberian bantuan teknis, semua kelompok binaan diajarkan teknik budidaya dengan perlakuan organik. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan unsur hara tanah serta menjaga keseimbangan ekosistem, selain meningkatkan produktifitas. Perlakuan organik tersebut dilakukan dengan menggunakan pupuk organik berbasis MA-11 (Microbacter Alfalfa). Di samping itu, kelompok juga diajarkan membuat biofarm, pestisida dan fungisida nabati berbasis MA-11 dengan bahan dasar tanaman di lingkungan sekitar. Selain mengurangi penggunaan pupuk kimia, hal ini juga mampu menurunkan biaya produksi.

Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak sebatas pada budidaya berbasis MA-11, tetapi juga pada teknik pengamatan (analisa pertumbuhan penanggulangan hama), penghitungan panen dengan teknik pengubinan sesuai standar BPS, penghitungan harga pokok produksi (HPP). Diharapkan melalui program ini petani dapat termotivasi untuk terus menekuni bidang pertanian dengan mengubah pola tanam lama yang bersifat full-kimia untuk berangsur kembali ke pola tanam semi-organik dan selanjutnya diharapkan dapat menuju kepada sistem tanam padi yang full-organik. Para petani yang selama ini mengandalkan pupuk dan pestisida kimia kini telah memperoleh pengalaman baru budidaya padi semi-organik dan pemahaman mengenai dampak negatifnya. Melalui budidaya organik telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas lahan, dengan harga jual lebih tinggi dan mengurangi biaya produksi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kedepan, diharapkan keberhasilan-keberhasilan dalam demplot-demplot pertanian dapat diimplementasikan pada tataran area yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan yang pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi yang bersumber dari kelompok volatile food.





5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5.1.1. Transaksi Kliring

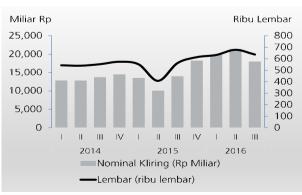
Tabel 5.1 Perkembangan Perputaran Kliring

Indikator		20)14		2015					2016	
markator	1	- 11	III	IV	1	ll l	III	IV	1	ll l	III
PERPUTARAN KLIRING											
Lembar (ribu lembar)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637
- Rata-rata lembar per hari (ribu lei	8.91	9.47	9.06	9.11	8.89	6.69	9.37	9.75	10.74	10.78	10.80
Nominal Kliring (Rp Miliar)	12,853	12,833	13,753	14,507	13,548	10,096	14,002	18,258	19,865	21,429	18,005
- Rata-rata nominal per hari (Rp M	211	225	225	230	219	166	233	290	337	335	305
· ·											
TOLAKAN CEK/BG KOSONG											

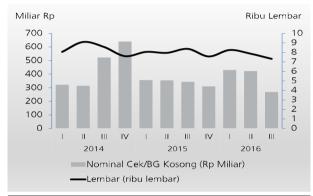
TOLAKAN CEK/BG KOSONG											
Lembar (ribu lembar)	8.06	9.09	8.56	7.60	8.05	7.95	8.4	7.6	8.3	7.9	7.3
- Rata-rata lembar per hari (ribu lei	0.13	0.16	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.12	0.14	0.13	0.14
Nominal Cek/BG Kosong (Rp Miliar)	321	314	522	640	356	354	343.0	310.0	430.0	422.0	268.0
- Rata-rata nominal per hari (Rp mi	5.26	5.51	8.56	10.15	5.74	5.80	5.72	4.92	7.3	6.7	4.5

Seiring dengan perlambatan aktivitas perekonomian, transaksi aktivitas non tunai menunjukkan perlambatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Pada triwulan III 2016 jumlah nominal perputaran kliring mencapai Rp 18 triliun, tumbuh melambat dari 112,25% (yoy) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 28,58% (yoy) pada triwulan III 2016. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi lembar kliring pada triwulan III 2016 juga tumbuh melambat sebesar 13,34% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 13,34% (yoy).

Pada triwulan III 2016 jumlah tolakan cek/bilyet giro kosong tercatat sebesar 7,3 ribu lembar dengan nominal sebesar Rp 268 miliar. Jumlah lembar tolakan tersebut mengalami penurunan sebesar -12,52% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,9 ribu lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai



Grafik 5.1 Perkembangan Kliring



Grafik 5.2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong

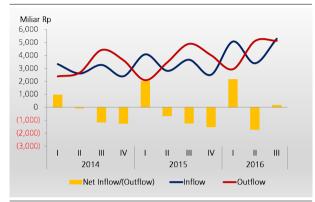
1,14% dari total lembar kliring yang ditransaksikan pada triwulan III 2016. Sedangkan secara nominal, tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan sebesar -21,86% (yoy). Nominal tolakan tersebut mencapai 1,48% dari keseluruhan nominal transaksi kliring triwulan III 2016.

5.1.2. Perkembangan Aliran Uang Kartal (*Inflow* dan *Outflow*)

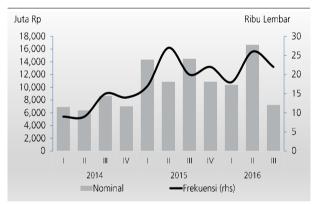
Sejalan dengan perkembangan perekonomian, aliran uang kartal pada triwulan III 2016 menunjukkan posisi net *inflow* tercatat sebesar Rp 160 miliar, dengan *outflow* tercatat sebesar Rp 5,12 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 5,1 triliun. Sementara *inflow* tercatat sebesar Rp 5,2 triliun pada triwulan III 2016, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 3,39 triliun.

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

Indikator	2014			2015					2016		
ilidikatoi		ll l	III	IV	ı	Ш	III	IV		ll l	III
Inflow (Miliar Rp)	3,331	2,607	3,269	2,392	4,086	2,810	3,669	2,507	5,076	3,395	5,287
Outflow (Miliar Rp)	2,382	2,669	4,422	3,630	2,089	3,464	4,899	4,018	2,937	5,107	5,127
Net Inflow/(Outflow)	949	(62)	(1,153)	(1,238)	1,996	(654)	(1,230)	(1,512)	2,138	(1,712)	160
Penukaran (Miliar Rp)	84	81	93.7	93	64.29	16	17	18	21	21	19
Temuan Uang Palsu (lembar)	1,155	1,001	986	1591	1,477	882	1,013	1,372	1,934	1,409	1,029
Frekuensi Kas Keliling	9	9	15	14	17	27	20	22	18	26	22
Nominal Kas keliling (Juta Rp)	6,906	6,375	8,647	7,005	14,342	10,865	14,489	10,877	10,393	16,663	7,234



Grafik 5.3 Perkembangan Uang Kartal di Bali



Grafik 5.4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

5.1.3. Temuan Uang Palsu dan Penyediaan Uang Layak Edar

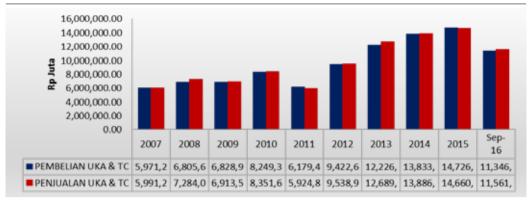
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali secara konsisten menekan peredaran uang palsu melalui kerjasama dengan pihak Polda Bali. Berdasarkan data terakhir, jumlah uang palsu yang teridentifikasi pada triwulan III 2016 sebanyak 1.029 lembar, lebih sedikit dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1.409 lembar. Sosialisasi ciri-ciri keaslian

uang Rupiah oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus dilakukan kepada masyarakat umum dan pelaku usaha di Bali untuk meminimalisir peredaran uang palsu. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa mengintensifkan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menekan peredaran uang palsu melalui berbagai kesempatan.

Bank Indonesia terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat (clean money policy) dengan menarik uang lusuh/ rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia (inflow). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan kegiatan kas keliling. Di Provinsi Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan salah satu daerah terpencil di Provinsi Bali. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan III 2016 mencapai 22 kali.

5.1.4. Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Bali

Transaksi jual - beli valas di Provinsi Bali terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Total transaksi jual - beli valas tahun 2016 mencapai Rp22,91 triliun, meningkat sebesar 0,26% (Januari - September 2016) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan III 2016, total pembelian dan penjualan valas masingmasing sebesar Rp11,35 dan Rp11,56 triliun.



Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali

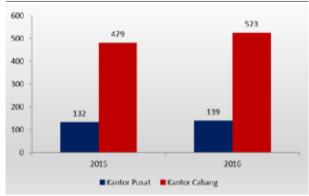
Sumber: LKPBUv2, diolah

Peningkatan transaksi jual - beli valas tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman di sepanjang tahun 2016. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisman triwulan III 2016 tumbuh sebesar 27,21% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 5.6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali

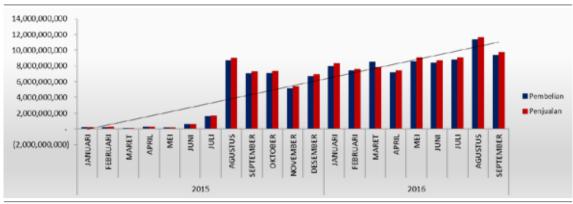
Selain faktor jumlah kunjungan wisman, peningkatan transaksi jual - beli valas juga didorong oleh peningkatan jumlah KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB) Berizin di Provinsi Bali. Berdasarkan jumlah kantornya, sampai dengan Oktober 2016, terdapat 664 Kantor KUPVA BB Berizin yang terdiri dari 141 Kantor Pusat (KP) dan 523 Kantor Cabang (KC). Jumlah tersebut meningkat sebanyak 53 Kantor dibandingkan akhir tahun 2015, dengan masing-masing peningkatan sebanyak 9 KP dan 44 KC.



Sumber: BISKOMVA, diolah

Grafik 5.7 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

Implementasi Ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Provinsi Bali juga ikut mendorong peningkatan transaksi penukaran valas di Bali, khususnya transaksi yang dilakukan wisman di hotelhotel yang telah bekerjasama dengan Penyelenggara KUPVA BB Berizin. Hal tersebut terkonfirmasi dari total transaksi salah satu KUPVA BB yang memiliki 45 kantor cabang yang berlokasi di beberapa hotel di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang disampaikan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, jumlah transaksi seluruh kantor cabangnya yang berlokasi di hotel selama tahun 2016 (sampai September 2016) mencapai Rp 114,83 miliar, meningkat signifikan sebesar 244,84% (Januari - September 2016) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 45,5 miliar.



Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel

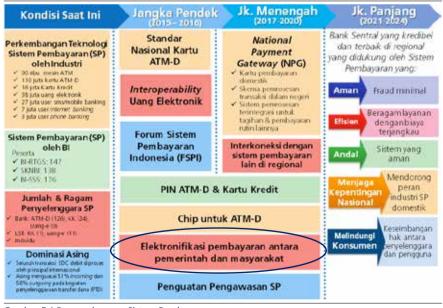
Sumber: LKPBUv2, diolah

5.1.5. Pengembangan Elektronifikasi Pembayaran

Elektronifikasi pembayaran secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran secara tunai menjadi non tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif. Adapun elektronifikasi pembayaran pemerintah adalah tata cara pembayaran pemerintah, baik berupa pembayaran masyarakat kepada pemerintah maupun pembayaran pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara elektronik

(non tunai). Elektronifikasi pembayaran diharapkan dapat membuka lebih luas akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sesuai dengan *road map* pengembangan sistem pembayaran ke depan, elektronifikasi pembayaran antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu yang sasaran yang hendak dicapai dalam jangka pendek (2015 – 2016) dan jangka menengah (2017 – 2020).



Gambar 5.1 Pengembangan Sistem Pembayaran

Retail Transaction	Government	Business	Person
Government	Distribusi APBN/APBD	Pembayaran barang dan jasa Subsidi/insentif kepada BUMN/BUMD	Bansos Subsidi/insentif Gaji PNS Honorarium/Upah Pegawai Kontrak
Business	Pajak PNBP (izin, Retribus), Fiducia, HGB, kontrak kerja, denda dl)	X itidak termasuk dalam jenin elektronifikasi pembayaran pemerintah)	X (tidak termasuk dalam jenis elektrondikasi pembayaran pamerntah)
Person	Pajak PNBP (izin, retribusi, paspor, denda dli)	X (tidak termasuk delam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah)	X İtidak termasuk dalam ersis elektronifik asi pembayaran pemerintahi

Gambar 5.2 Jenis-jenis Elektronifikasi Pembayaran Pemda

Upaya tersebut merupakan salah satu langkah reformasi pada modernisasi sistem pembayaran. Selain itu, hal tersebut juga sebagai langkah untuk mendukung Peraturan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, dengan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi. Penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran/penyetoran penerimaan negara, serta untuk mewujudkan *good governance*.

Jenis-jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah P2G (Person to Government)
 Merupakan skema berbagai macam pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena dibayarkan kepada pemerintah, maka transaksi P to G merupakan transaksi yang mendatangkan penerimaan bagi pemerintah. Untuk konteks pemerintah daerah, jenis penerimaan diklasifikasikan menjadi dua,

yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.



• Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah G2P (Government to Person)

Merupakan bentuk penyaluran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alur pengeluaran pemerintah secara umum dilakukan melalui rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara berperan penting dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat. Mekanisme belanja

pemerintah pusat diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan belanja daerah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.



Manfaat elektronifikasi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah diantaranya sebagai berikut:

- Bagi masyarakat:
 - Mempermudah akses/mekanisme dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi pembayaran;
 - 2. Mudah mengakses histori pembayaran; dan
 - 3. Dapat mengurangi biaya korespondensi dan/ atau transportasi.

• Pemerintah Daerah:

- Memperlancar proses penerimaan dana dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat;
- 2. Mempercepat rekonsiliasi data penerimaan dan penelusuran arus dana sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas;
- 3. Mengurangi potensi *shadow economy* (korupsi dan penggelapan); dan
- Pengurangan jumlah loket tunai yang dibutuhkan dan efisiensi pengelolaan rekening pemerintah yang tersentralisasi.

Namun demikian, dalam perkembangannya akselerasi penggunaan non tunai dirasakan masih perlu ditingkatkan sehingga dibutuhkan inisiatif dari Bank Indonesia untuk mempercepat implementasinya di sektor penerimaan dan pengeluaran pemerintah, termasuk kaitannya dengan perbankan dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam rangka peningkatan transaksi non tunai untuk layanan keuangan oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Kota Denpasar telah menandatangani No.17/9/PPTBI/PEKI/DPR No.415.4/19/KB/BKS/2015 Kesepahaman tanggal 30 Juni 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Salah satu tindak lanjut Nota Kesapahaman tersebut diwujudkan melalui penyusunan bisnis model transaksi penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar yang dapat dimigrasikan menjadi non tunai, diantaranya penerimaan pajak Pemkot Denpasar. KPwBI Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali juga telah menyelenggarakan sosialisasi pembayaran PBB dan Pajak Air Tanah secara non tunai dalam rangka mendorong elektronifikasi transaksi pembayaran.

5.1.6. Perkembangan Layanan Keuangan Digital (LKD) di Provinsi Bali

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat lembaga keuangan kepada formal, berbagai otoritas telah mengeluarkan kebijakan di bidang keuangan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan April 2014 telah berupaya untuk meningkatkan jangkauan dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan. Dalam aturan tersebut, dimungkinkan bank dan Lembaga Selain Bank (LSB) penerbit uang elektronik bekerjasama dengan pihak ke tiga atau agen yang bertindak atas nama bank untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia di berbagai daerah akan layanan sistem pembayaran dan keuangan formal. Layanan dimaksud dikenal dengan nama Layanan Keuangan Digital (LKD).

Berdasarkan data yang disampaikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, jumlah agen LKD di Provinsi Bali cenderung menunjukkan peningkatan di sepanjang tahun 2016. Sampai dengan bulan Mei tahun 2016, jumlah agen LKD di Provinsi Bali mencapai 2.132 agen, dengan jumlah agen terbanyak di Kota Denpasar sebanyak 870 agen (40,81%) dari total agen LKD di Provinsi Bali.

Tabel 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Total Provinsi Bali	1,732	1,818	1,987	2,135	2,132
Kota Denpasar	812	839	855	876	870
Kab. Buleleng	429	436	439	442	437
Kab. Karangasem	122	125	139	160	158
Kab. Badung	122	136	144	158	157
Kab. Tabanan	32	46	140	146	151
Kab. Gianyar	74	87	106	143	144
Kab. Bangli	34	39	49	84	85
Kab. Jembrana	76	78	78	78	78
Kab. Klungkung	31	32	37	48	52



MINIMALISASI KASUS PENIPUAN KUPVA BB TIDAK BERIZIN, BI BALI LUNCURKAN SIKUPVA



Sebagai salah satu lokasi wisata favorit di dunia, setiap tahunnya Bali dikunjungi oleh tidak kurang dari tiga juta wisatawan mancanegara. Selama ini kemajuan industri pariwisata telah berkontribusi besar terhadap perekonomian Bali. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau yang lebih populer dikenal dengan Money Changer merupakan salah satu bagian dari jasa layanan yang sangat bertalian erat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri pariwisata di Bali. Perkembangan KUPVA Bukan Bank Berizin di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dari data terakhir Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Bali, total KUPVA BB Berizin di Bali sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebanyak 662 kantor dengan 139 diantaranya adalah kantor pusat, dan tersebar di seluruh Provinsi Bali. Peningkatan jumlah KUPVA BB yang pesat ini juga didorong oleh adanya regulasi terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI yang berdampak pada melonjaknya jumlah pembukaan Kantor Cabang KUPVA BB di berbagai hotel dan restoran.

Dalam perkembangannya, muncul stigma kepada penyelenggara KUPVA BB yang dianggap sebagai salah satu perusak citra pariwisata di Bali. Hal ini disebabkan oleh ulah nakal pedagang Uang Kertas Asing (UKA) liar atau tidak berizin yang melakukan kecurangan/penipuan kepada sejumlah wisatawan asing. Seringnya, KUPVA BB Tidak Berizin menggunakan kedok KUPVA BB Berizin sehingga masyarakat, khususnya wisatawan asing sulit untuk membedakannya. Oleh karena itu, sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat, KPw BI Provinsi Bali, sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan dan pembinaan KUPVA BB berinisiatif membuat suatu inovasi berupa sistem berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa layanan KUPVA BB mengenai lokasi KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali. Website ini menggunakan fitur Google Maps dan terdapat menu "Find Authorized Money Changer Near You" yang memungkinkan pengguna mendeteksi KUPVA BB Berizin terdekat dari lokasi orang tersebut berada. Bahkan, pengguna juga dapat melihat foto kantor dan fasilitas serta dalam pengembangan ke depan, juga dapat dilihat informasi rate/kurs valuta asing masing-masing KUPVA BB tersebut. Website yang dapat diakses melalui alamat www.balimoneychanger.com dibuat sangat aplikatif dengan tampilan yang menarik dan mudah diakses baik dari komputer desktop atau *smartphone*. Terdapat menu "comment" yang memungkinkan pengunjung website mengirimkan pertanyaan/saran/kritik ataupun memberikan *sharing* jika terdapat pengalaman yang pernah dirasakan terkait KUPVA BB di Provinsi Bali.

Dalam rangka mensosialisasikan website www. balimoneychanger.com, KPw BI Provinsi Bali akan melakukan berbagai strategi komunikasi antara lain melalui penyampaian surat kepada asosiasi pariwisata seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) di Provinsi Bali yang berisi himbauan kepada pelaku pariwisata untuk mengingatkan terhadap

BANK INDONESIA

*** talimar sychanger com

*** BANK INDONESIA

**** AND AUTHORIZED MONEY
CHANGER NEAR YOU

**** PT. Ball Artha Mandiri

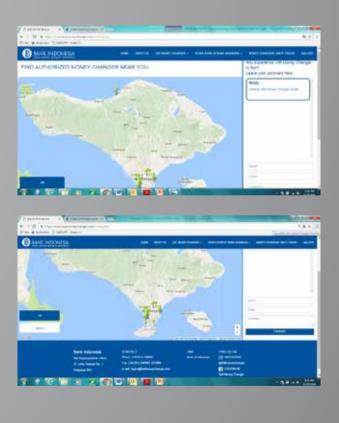
**** PT. Ball Artha Mandiri

**** And Authorized Money

*** And Authorized Money

**** And Authorized

praktek KUPVA BB Tidak Berizin dan meminta para wisatawan (tamu/kliennya masing-masing) untuk mengunjungi website www.balimoneychanger.com untuk mengetahui informasi mengenai lokasi KUPVA BB Berizin. Untuk memperkuat sosialisasi, KPw BI Provinsi Bali juga menggunakan sarana SMS Blast yang disebar di Bandara Internasional Ngurah Rai dan titik-titik pariwisata, seperti Kuta, Seminyak, Canggu dan Ubud dan pemasangan papan reklame/billboard di 2 (dua) titik pariwisata yaitu di Jl. Raya Kuta dan Jl. Raya Kerobokan (Seminyak) yang berisi himbauan agar menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia dan melakukan penukaran valas ke Rupiah hanya dengan menggunakan KUPVA BB Berizin (Authorized Money Changer). Strategi komunikasi juga dilakukan melalui social media seperti Facebook



dan Intagram. Berbagai strategi komunikasi yang dilakukan ini ternyata membuahkan hasil positif. Berdasarkan data pertengahan bulan November 2016, website www.balimoneychanger.com telah dikunjungi oleh ± 1000 orang sejak diluncurkan pada awal November 2016 lalu dan juga telah mendapatkan berbagai masukan, saran dan kritik dari pengunjung website.

Keberadaan KUPVA BB tidak berizin sangat meresahkan wisatawan asing dan sangat merugikan kita semua, sebab dapat mempengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata di Provinsi Bali. Pembuatan SIKUPVA merupakan suatu wujud keseriusan KPw BI Provinsi Bali untuk meningkatkan layanan terhadap *stakeholder* dan suatu upaya preventif untuk meminimalisasi kasus penipuan KUPVA liar/tidak berizin terhadap wisatawan asing. Hal ini demi menjaga citra positif yang telah terbentuk di mata wisatawan asing terhadap dunia pariwisata Bali.





6.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Pasokan tenaga kerja Provinsi Bali mengalami peningkatan, terlihat dari jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2016 yang mengalami peningkatan baik secara tahunan maupun dibanding Februari 2016. Pada Agustus 2016 jumlah penduduk usia kerja di Bali tercatat sebanyak 3,2 juta orang, atau meningkat 1,52% dibanding Agustus 2015 dan meningkat 0,77% dibanding Februari 2016. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut menjadi indikasi terdapat peningkatan potensi tenaga kerja di Bali. Seiring dengan peningkatan penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 tercatat meningkat dibanding Februari 2016, ataupun Agustus 2015. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 tercatat sebanyak 2,46 juta jiwa atau meningkat 3,38% dibanding Februari 2016, dan meningkat sebesar 3,84% dibanding Agustus 2015. Peningkatan pada angkatan kerja diikuti oleh meningkatnya angkatan kerja yang bekerja. Jumlah angkatan yang bekerja pada Agustus 2016 tercatat sebesar 2,42 juta jiwa, atau meningkat sebesar 3,95% dibanding Agustus 2015 dan sebesar 3,62% dibanding Februari 2016. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut juga diikuti oleh membaiknya tingkat penyerapan kerja di Provinsi Bali pada Agustus 2016. Kondisi ini tercermin dari menurunnya pengangguran di Bali pada Agustus 2016. Jumlah angkatan kerja yang menganggur di Bali oada Agustus 2016 tercatat sebesar 46,48 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 1,54% dibanding periode Agustus 2015, dan menurun sebesar 7,7% dibanding periode Februari 2016. Penurunan jumlah pengangguran pada angkatan kerja tersebut berdampak positif pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang pada periode yang sama tercatat sebesar 1,89%. TPT periode Agustus 2016 lebih rendah dibanding TPT Agustus 2015 dan Februari 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 1,99% dan 2,12%.

Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan. TPAK yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2015, dan Februari 2016. TPAK pada Agustus 2016 tercatat sebesar 77,24%, lebih tinggi dibanding Agustus 2015 yang sebesar 75,51% dan dibanding Februari 2016 yang sebesar 75,28%.



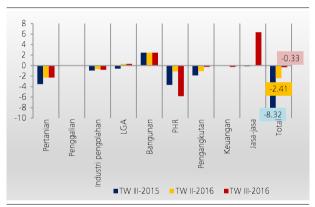
Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)

VECTATANI LITANAA	20	14	20)15	20)16
KEGIATAN UTAMA	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
PENDUDUK USIA 15+	3,066.50	3,092.88	3,118.04	3,141.29	3,164.65	3,189.02
ANGKATAN KERJA	2,410.42	2,316.76	2,458.78	2,372.02	2,382.47	2,463.04
BEKERJA	2,377.39	2,272.63	2,425.17	2,324.81	2,332.06	2,416.56
PENGANGGURAN	33.03	44.13	33.61	47.21	50.40	46.48
BUKAN ANGKATAN KERJA	656.08	776.12	659.25	769.27	782.19	725.98
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)	78,61	74,91	78,86	75,51	75,28	77.24
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	1,37	1,90	1,37	1,99	2.12	1.89
PEKERJA TIDAK PENUH	545.76	513.33	560.33	479.04	970.35	512.82

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada periode laporan turut dikonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali. Berdasarkan hasil SKDU, penggunaan tenaga kerja secara umum menunjukkan perbaikan pada triwulan III-2016 dibanding triwulan II-2016, dan dibanding triwulan III-2015. Secara umum, nilai SBT penggunaan tenaga kerja pada triwulan III-2016 tercatat sebesar -0,33%, lebih tinggi dibanding triwulan II-2016 dan triwulan III-2015 yang masingmasing sebesar -2,41% dan -8,32%. Meskipun secara umum kondisi penggunaan tenaga kerja menunjukkan perbaikan, namun nilai minus pada SBT tersebut menunjukkan jumlah responden (pelaku usaha) yang mengkonfirmasi pengurangan penggunaan tenaga kerja lebih banyak dari yang menambah jumlah tenaga



Sumber: SKDU KPw BI Provinsi Bali Grafik 6.2 Perkembangan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU)



Sumber: SK KPw BI Provinsi Bali Grafik 6.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan

Kegiatan usaha yang Akan Datang

kerja. Selanjutnya, optimisme akan peningkatan perkembangan tenaga kerja di Bali juga dicerminkan dari hasil Survei Konsumen (SK). Berdasarkan hasil SK, terlihat bahwa tingkat keyakinan konsumen akan Ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang cenderung optimis, yaitu sebesar 105 (indeks diatas 100 menunjukkan optimisme konsumen).

Struktur lapangan pekerjaan secara umum tidak mengalami perubahan. Sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pada Agustus 2016, lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali, yaitu sebesar 728,76 ribu orang, atau 30,16% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Lapangan usaha pertanian kemudian menempati posisi kedua dengan 506,25 ribu orang bekerja pada lapangan usaha ini, atau sebesar 20,95% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Sementara lapangan usaha jasa kemasyarakatan menempati posisi ketiga dengan menyerap 433,38 ribu orang atau 17,93% penduduk yang bekerja di Bali.

Terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali. Pada Agustus 2016, penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan Perdagangan mengalami penurunan sebesar 0,20% dibanding Februari 2016, sementara lapangan pekerjaan pertanian turun sebesar 1%, lapangan pekerjaan jasa kemasyarakatan turun sebesar 0,03%. Lapangan pekerjaan lain yang mengalami penurunan pada periode yang sama adalah lapangan pekerjaan konstruksi (turun 0,16%), transportasi, pergudangan dan komunikasi (turun sebesar 0,13%), serta lapangan pekerjaan lainnya yang turun sebesar 0,07%. Di sisi lain, terdapat lapangan pekerjaan yang menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2016 dibanding Februari 2016. Lapangan pekerjaan

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang)

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	201	4	20	15	2016		
LAFANGAN FENENJAAN UTAMIA	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	
Pertanian	590,169	528,506	569,493	520,775	511,861	506,251	
Industri	337,080	316,598	398,873	287,534	329,478	370,531	
Konstruksi	230,524	205,470	177,619	196,696	168,845	171,097	
Perdagangan	674,595	658,312	721,776	768,075	708,012	728,757	
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	71,982	70,658	66,368	75,472	90,360	90,611	
Keuangan	73,168	82,431	107,945	92,546	97,228	109,977	
Jasa Kemasyarakatan	381,219	393,056	371,973	368,535	418,862	433,377	
Lainnya	18,657	17,601	11,126	15,172	7,418	5,954	
TOTAL	2,377,394	2,272,632	2,425,173	2,324,805	2,332,064	2,416,555	

Sumber: BPS Provinsi Bali

industry menunjukkan peningkatan sebesar 1,2%, dan lapangan pekerjaan keuangan menunjukkan peningkatan sebesar 0,38% pada periode yang sama. dan lapangan pekerjaan lainnya turun sebesar -51,1%. Disisi lain, penyerapan tenaga kerja dari lapangan pekerjaan Industri, Transportasi, pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, serta Jasa Kemasyarakatan pada Februari 2016 tercatat meningkat dibanding Agustus 2015.

Jenis pekerjaan yang dominan pada Agustus 2016 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,31 juta jiwa atau sebesar 54,32% dari total penduduk yang bekerja, sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 1,10 juta jiwa atau sebesar 45,68% pada periode yang sama. Komposisi tersebut relatif sama dengan kondisi pada Februari 2016, dan Agustus

2015. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Bali yang bekerja masih tergantung pada kegiatan informal.

Penyerapan tenaga kerja di Bali masih didominasi oleh penduduk yang tergolong pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu. Jumlah pekerja penuh waktu di Bali pada Agustus 2016 tercatat sebanyak 1,9 juta jiwa atau sebesar 78,78% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding Februari 2016, dan Agustus 2015 yang masing-masing tercatat sebanyak 1,36 juta orang dan 1,84 juta orang, atau dengan share 58,39% dan 79,39% dari total penduduk yang bekerja. Pada periode yang sama, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami penurunan, dari 970,35 ribu jiwa pada Februari 2016 menjadi 512,82 ribu jiwa pada Agustus 2016.

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang)

STATUS PEKERJAAN UTAMA	201	4	20	15	2016		
STATUS PENERJAAN UTAMA	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	
BERUSAHA SENDIRI	372,167	317,218	376,927	315,131	325,000	382,946	
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	419,827	366,108	408,236	363,442	452,674	435,670	
PEKERJA BEBAS	206,182	203,142	156,313	229,079	154,760	196,060	
PEKERJA TAK DIBAYAR	382,741	302,542	335,974	319,772	305,130	298,025	
PEKERJA INFORMAL	1,380,917	1,189,010	1,277,450	1,227,424	1,237,564	1,312,701	
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	86,533	98,476	89,456	98,779	84,896	88,872	
BURUH/KARYAWAN	909,944	985,146	1,058,267	998,602	1,009,604	1,014,982	
PEKERJA FORMAL	996,477	1,083,622	1,147,723	1,097,381	1,094,500	1,103,854	
TOTAL	2,377,394	2,272,632	2,425,173	2,324,805	2,332,064	2,416,555	

Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang)

PENDUDUK YANG BEKERJA	201	14	20	15	2016		
PENDUDUK TANG BEKERJA	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	
PEKERJA TIDAK PENUH	545,757	513,334	560,330	479,037	970,346	512,816	
PEKERJA PENUH	1,831,637	1,759,298	1,864,843	1,845,768	1,361,718	1,903,739	
TOTAL	2,377,394	2,272,632	2,425,173	2,324,805	2,332,064	2,416,555	

Sumber: BPS Provinsi Bali

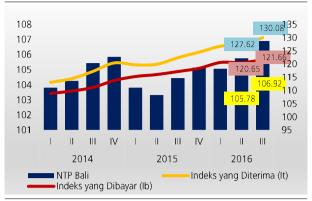
Kualitas pendidikan penduduk yang bekerja mengalami sedikit perbaikan. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya penduduk yang bekerja tingkat SMA/SMK keatas sebesar 8,14% pada Agustus 2016 dibanding Februari 2016. Disisi lain, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan sampai dengan SMP mengalami penurunan sebesar 0,44% pada periode yang sama. Namun demikian, dari sisi penyerapan tenaga, sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah), dengan porsi sekitar 35,45% dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pekerja berpendidikan tinggi mencakup 15,29%, dan sisanya merupakan pekerja berpendidikan menengah yang memilliki porsi sebesar 49,26%.

6.2 NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2016 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu, dan dibanding triwulan II 2016. Peningkatan NTP secara umum mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan petani dengan peningkatan daya beli petani di pedesaan. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peningkatan NTP terjadi pada subsektor Hortikultura, Perkebunan rakyat, Peternakan dan Perikanan. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 2,49% (qtq) pada triwulan III-2016, atau meningkat dari 103,37 di triwulan II-2016 menjadi 105,95 di triwulan III-2016. Selanjutnya, NTP subsektor peternakan meningkat sebesar 1,21% (qtq), atau dari 114,7 di triwulan II-2016 menjadi 116,09 di triwulan III-2016. Sementara NTP subsektor hortikultura dan perikanan masing-masing meningkat sebesar 0,92%(gtg) dan 0,38%(gtg) pada periode yang sama. Peningkatan NTP pada keempat subsektor ini terjadi karena laju kenaikan Indeks Yang Diterima Petani (IT) lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Yang Dibayar Petani (IB). Di sisi lain, NTP subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 0,34%(qtq).

Tabel 6.5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	201	4	20	15	2016		
rendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	
< SD KE BAWAH	1.002.707	875.729	942.764	930.013	858.390	856.765	
SMP	360.432	337.08	365.809	334.988	369.220	365.427	
SMA	476.634	482.68	432.128	457.522	400.619	494.948	
SMK	274.374	264.75	342.283	274.841	294.369	329.935	
Diploma I / II / III	84.42	99.321	106.837	107.783	129.394	104.804	
UNIVERSITAS	178.827	213.072	235.352	219.658	280.072	264.676	
TOTAL	2.377.394	2.272.632	2.425.173	2.324.805	2.332.064	2.416.555	



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.4 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya

Tabel 6.6 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali

Cubasidas		20	15			2016		
Subsektor	I	II	III	IV	ı	ll l	III	
		Ta	naman Panga	an				
IT Tanaman Pangan	114.67	112.35	117.26	122.71	123.40	120.30	121.05	
IB Tanaman Pangan	118.36	119.20	120.54	121.83	124.45	124.39	125.58	
NTP-Tanaman Pangan	96.89	94.25	97.28	100.72	99.16	96.71	96.39	
			Hortikultura					
IT Hortikultura	119.52	119.93	121.13	123.29	127.08	128.09	130.56	
IB Hortikultura	116.28	116.98	118.19	119.44	121.57	121.60	122.81	
NTP-Holtikultura	102.78	102.52	102.50	103.22	104.52	105.34	106.31	
		Tanama	n Perkebunar	Rakyat				
IT Perkebunan Rakyat	115.08	116.35	117.13	118.66	120.90	124.89	129.30	
IB Perkebunan Rakyat	115.41	116.12	117.33	118.52	120.77	120.81	122.00	
NTP-Perkebunan Rakyat	99.71	100.20	99.82	100.12	99.83	103.37	105.95	
			Peternakan					
IT Peternakan	126.72	127.75	130.77	131.05	133.48	134.36	136.68	
IB Peternakan	112.53	113.25	114.17	115.38	117.27	117.14	117.74	
NTP-Peternakan	112.61	112.80	114.54	113.58	113.81	114.70	116.09	
			Perikanan					
IT Perikanan	123.17	123.86	126.01	124.93	125.10	125.33	126.78	
IB Perikanan	117.39	118.42	119.74	120.55	122.77	122.55	123.50	
NTP-Perikanan	104.92	104.59	105.23	103.65	101.90	102.27	102.65	
	Provinsi Bali							
IT	119.80	120.01	122.51	124.61	126.83	127.62	130.08	
IB	115.38	116.13	117.27	118.50	120.69	120.65	121.66	
NTP Bali	103.83	103.34	104.46	105.15	105.08	105.78	106.92	

Halaman ini sengaja dikosongkan





7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2017 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu tumbuh pada kisaran 6,11%-6,51% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama didorong oleh sebagian besar komponen terutama konsumsi. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama antara lain lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali

Sisi permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2017, didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, investasi (PMTB), ekspor, serta konsumsi rumah tangga. Perkiraan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertunda pada 2016, akan meningkatkan kinerja konsumsi pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur. Beberapa proyek antara lain adalah peningkatan kapasitas jalan (pembangunan *short cut*), jembatan, irigasi (pembangunan waduk) dan penyediaan air minum. Di samping itu, pelaksaan pilkada Buleleng pada Februari 2017 diperkirakan akan turut mendorong peningkatan kinerja konsumsi pemerintah.

Sejalan dengan realisasi pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah pada triwulan I 2017, kinerja investasi diperkirakan akan meningkat. Perbaikan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi makro regional yang semakin kondusif, merupakan faktor pendorong kuat terhadap peningkatan kinerja investasi. Di samping itu, optimisme pelaku usaha juga didorong oleh tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali sebagai respon terhadap kecenderungan penurunan suku bunga BI 7 day *Reverse Repo rate* dan relaksasi ketentuan LTV.

Dari sisi kineria komponen ekspor, perkiraan perbaikan perekonomian negara tujuan ekspor³ akan mendorong peningkatan kinerja pada triwulan I 2017. Selain itu, upaya eksportir selama ini untuk terus melakukan diversifikasi pasar serta peningkatan kualitas produk di tengah semakin ketatnya persaingan, diperkirakan akan membantu peningkatan kinerja komponen ekspor. Untuk komponen ekspor jasa, event hari raya dan liburan seperti imlek, nyepi, dan periode setelah tahun baru, diperkirakan dapat memberikan dorongan peningkatan kinerja. Tidak ketinggalan termasuk upaya beberapa hotel untuk meningkatan promosi serta penjualan melalui online booking, sales call, dan program diskon. Sementara itu perkiraan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dengan didukung dengan perkiraan stabilitas harga BBM, TTL, dan kebutuhan pokok.

Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017 didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha, antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan peternakan, perdagangan besar dan eceram, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan. Perkembangan produksi pertanian pada triwulan I 2017, diperkirakan

³ Salah satu negara utama tujuan ekspor Provinsi Bali, USA menunjukkan peningkatan permintaan ekspor terutama untuk komoditas garmen.

akan menghasilkan tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016 karena kondisi cuaca yang diperkirakan lebih mendukung (sesuai ramalan BMKG).

Perkiraan peningkatan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum didorong oleh berlangsungnya imlek, nyepi, dan pasca tahun baru. Selain itu, perkiraan penambahan rute penerbangan dari dan ke Bali serta pelaksanaan MICE, berpotensi mendorong peningkatan. Peningkatan lapangan usaha ini. pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sejalan dengan kondisi tersebut, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran turut diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan perkiraan peningkatan kunjungan wisatawan. sisi lain, risiko perlambatan pada triwulan I 2017 bersumber dari isu keamanan dan kenyamanan serta resiko terjadinya bencana alam yang memiliki dampak signifikan terhadap industri pariwisata. Terdapat juga potensi anomali cuaca, yang akan mempengaruhi kinerja produksi lapangan usaha pertanian.

Perkiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2017

perkembangan terakhir, Dengan perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan perekonomian Bali tahun 2016, dengan kisaran 6,20%-6,60% (yoy). Dari sisi permintaan, perkiraan peningkatan didorong oleh hampir semua komponen. Dari komponen konsumsi Pemerintah, perkiraan peningkatan terjadi seiring dengan adanya perkembangan positif tax amnesty yang mendorong peningkatan pendapatan negara serta pengelolaan anggaran pemerintah yang semakin efisien dengan target yang realistis. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan perekonomian, terutama pembangunan infrastruktur diperkirakan akan juga turut motor penggerak akselerasi peningkatan kinerja konsumsi pemerintah di tahun 2017.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, optimisme akselerasi pada komponen investasi didorong oleh optimisme pelaku usaha seiring dengan tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali sebagai respon terhadap kecenderungan penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate. Dukungan kemudahan regulasi terkait dengan investasi dengan penghapusan bidang usaha restoran dari Daftar Negatif Investasi dan penghapusan sejumlah Perda, ditambah dengan rencana relaksasi ketentuan LTV untuk kredit perumahan turut mendukung optimisme peningkatan kinerja investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga di tahun 2016 diperkirakan mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan UMP dan potensi menurunnya harga BBM dan LPG, serta terjaganya TTL sepanjang tahun. Dari sisi penawaran, perkiraan peningkatan perekonomian bersumber dari perkiraan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian seiring dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah serta pembangunan irigasi. Selain itu, perkiraan peningkatan ekonomi Bali di tahun 2017 didukung oleh perkiraan peningkatan industri pariwisata dan industri pengolahan. Industri pariwisata diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah dalam merebranding dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata. Sementara, perkiraan peningkatan industri pengolahan didorong oleh upaya pelaku usaha dalam meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan alternatif segmen pasar baru (domestik dan ekspor). Meskipun demikian, optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tersebut masih menghadapi resiko antara lain isu keamanan yang berdampak terhadap industri pariwisata, resiko anomali cuaca dan bencana alam, regulasi pemerintah, serta resiko seiring dengan revisi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi global.

Berdasarkan perkembangan terakhir, sebagai dampak dari pemulihan perekonomian Amerika yang tidak

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Negara	⊤ Pangsa Ekspor Bali	Pertumbuhan Ekonomi					
Negara	Tangsa Ekspor bali	2015	2016**	2017**			
USA	24.56	2.6	1.6	2.2			
Japan	8.53	0.5	0.5	0.6			
Australia	9.30	2.5	2.9	2.7			
Singapore	6.59	2.0	1.7	2.2			
Hongkong	4.90	2.4	1.4	1.9			
World Output		3.2	3.1	3.4			

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) Oktober 2016

Keterangan :

**) angka proyeksi IMF

secepat perkiraan, terdapat revisi ke bawah prospek perekonomian dunia pada tahun 2017. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 yang sebelumnya diperkirakan sebesar 3,2%(yoy), direvisi ke bawah menjadi sebesar 3,1%(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Penyesuaian proyeksi (revisi ke bawah) juga terjadi pada beberapa negara tujuan utama ekspor Provinsi Bali yaitu USA dan Jepang. Revisi ke bawah tersebut, terjadi seiring dengan peningkatan ketidakpastian global dengan keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dengan demikian, revisi pertumbuhan ekonomi ke bawah tersebut terutama terkonsentrasi di negara-negara Eropa. Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja perekonomian Tiongkok sepanjang tahun 2016 turut menunjukkan pertumbuhan yang masih tertahan. Perkembangan terakhir pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (negara utama tujuan ekspor Bali) berpotensi berdampak pada kinerja ekspor Provinsi Bali. Hal tersebut seiring dengan rencana Trump untuk melakukan proteksi perdagangan. Selain itu, rencana untuk menaikan bunga surat utang USA juga dapat mempengaruhi perkembangan investasi di Provinsi Bali.

7.2. INFLASI BALI TAHUN 2017

Inflasi Bali triwulan I 2017 diperkirakan berada dalam kisaran 3,05±1% (yoy), sehingga inflasi Bali keseluruhan tahun 2017 diperkirakan akan berada



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi Bl

Grafik 7.2 Proyeksi Inflasi Bali

dalam kisaran 4%±1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan inflasi Bali tahun 2016 yang sebesar 3,14%±1% (yoy). Perkiraan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy) sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, secara tahunan meningkatnya inflasi pada tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu tekanan kelompok *core inflation* diperkirakan masih stabil.

Tekanan inflasi kelompok administered prices bersumber dari rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menaikkan tarif untuk pelanggan listrik 900 watt mulai 1 Januari 2017. Selain itu, adanya tendensi kenaikan harga minyak dunia berpotensi mendorong penyesuaian ke atas harga BBM di tahun 2017. Rencana pengurangan subsidi LPG 3kg dan pengalihan ke gas bumi juga berpotensi mendorong tekanan inflasi administered prices. Sementara itu, seiring dengan perkiraan peningkatan kinerja industri pariwisata di tahun 2017, maka terdapat potensi tendensi kenaikan inflasi di tahun 2017 seiring engan peningkatan permintaan. Namun demikian, seiring dengan terjaganya pasokan bahan pokok utama khususnya komoditas beras hingga 6 bulan ke depan (data ketersediaan Perum Bulog Divre Bali sejumlah 17.000 ton beras setara dengan ketahanan penyaluran 6 bulan ke depan) tekanan inflasi volatile food diharapkan tidak mengalami lonjakan terlalu tinggi.

Tekanan inflasi kelompok inti diperkirakan stabil, seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah serta ekspektasi inflasi yang terjaga. Terkendalinya tekanan inflasi inti didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

7.3 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

Sebagai upaya nyata menjaga laju inflasi Bali agar tetap stabil, Wakil Gubernur Bali selaku Ketua TPID Provinsi Bali beserta seluruh jajaran secara rutin forum koordinasi *High Level Meeting* guna menetapkan langkah strategis pengendalian inflasi di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali. Berbagai langkah kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan tersebut, yaitu:

1. Melakukan pertemuan rutin melalui forum koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun se-Provinsi Bali, baik rapat tim teknis maupun rapat tim kebijakan dalam menyusun langkah – langkah responsif menyikapi gejolak harga.

- 2. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui talkshow dan press release dan media lainnya mengenai kecukupan dan upaya menjaga ketersediaan barang terutama menjelang Hari Raya Keagamaan dan periode peak season.
- 3. Optimalisasi penyampaian informasi harga dan ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan mendukung integrasi PIHPS nasional.

Adapun langkah pengendalian inflasi ke depan yang akan dilakukan pada triwulan IV 2016 sebagaimana disampaikan dalam *High Level Meeting* TPID periode November 2016 adalah sebagai berikut:

- TPID Provinsi Bali akan menghimbau kepada maskapai penerbangan yang beroperasi di Provinsi Bali agar tidak menaikkan tarif terlalu tinggi pada periode peak season.
- 2. Optimalisasi Pasar Lelang dan Revitalisasi Pasar di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali guna memperlancar pasokan kepada masyarakat.
- Kepada seluruh TPID diminta untuk mempersiapkan kecukupan pasokan menjelang periode peak season akhir tahun termasuk penyelenggaraan Pasar Murah bekerjasama dengan Disperindag, BULOG, dan pihak terkait lainnya.
- 4. Menghimbau kepada ASDP untuk memprioritaskan angkutan komoditas pangan pada saat *peak season* akhir tahun.
- Mendorong segera disahkannya RUTR kabupaten pemasok bahan galian yang mendukung pembangunan perumahan.
- 6. Pelaksanaan Capacity Building Kontributor PIHPS Se-Provinsi Bali serta penguatan infrastruktur teknologi dan informasi berupa bantuan sejumlah 9 (sembilan) komputer untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota sebagai upaya penguatan pengkinian kualitas data PIHPS Provinsi Bali "SiGapura".

Daftar Singkatan

Administered price	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan
	harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/
	kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan
	pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
	daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap
	tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat
	tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung
	pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan
	pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan
	di suatu bank.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat
	dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-
	penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi
	masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada
	di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi
	bahan pangan (volatile foods), serta harga barang/jasa yang ditentukan
	oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Feronikel	Hasil olahan nikel mentah (ore nickel) dengan kadar antara 20-30% Ni
	dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan <i>stainless steel</i>
Imported inflation	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh
	perkembangan harga di luar negeri (eksternal)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan
	konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang,
	dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga
	barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode
	tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan
	konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap
macks regardian Ronsumen (IRR)	macks yang menanjakkan level keyakman konsumen temadap

	kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan
Investasi	mendatang, dengan skala 1–100. Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
 Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasiyang bersifat kualitatif
Eldisori	dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang
	disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
NPI	Nikcel Pig Iron. Hasil olahan ore nickel dengan kandungan 5-10% Ni.
Non Performing Loan (NPL)	Besarnya jumlah kredit bermasalah pada suatu Bank dibanding dengan total keseluruhan kreditnya
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah respondenyang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" danmengabaikan jawaban "sama".
SBT	Saldo Bersih Tertimbang. Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan
	harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
West Texas Intermediate	Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan
	minyak dunia.
Yoy	Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun
	sebelumnya.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Causa Iman Karana

Koordinator Penyusun

Suarpika Bimantoro

Editor

Teguh Setiadi

Tim Penulis

Umran Usman Putriana Nurman Ganis Arimurti Rai Gian Danny Ikhsan Utama

Kontributor

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Ni Made Wiwik Sulasih

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988

